



# 2023

---

# Laporan TAHUNAN

## Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT

TELEPON/FAX: (0751) 751122 EMAIL: [pps\\_bungus@yahoo.com](mailto:pps_bungus@yahoo.com)

**#2024**  
KKP BEYOND

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**djpt**  
bersinergi

**PPS BUNGUS  
RANCAK**  
Responsif Akuntabel Normatif Cermat Adaptif Komitmen



## Kata Pengantar



**Widodo, S.Pi, M.Sc**  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Samudera Bungus

Puji dan syukur Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Tahun 2023" dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Tahunan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik keberhasilannya maupun hal-hal lain yang harus dilakukan

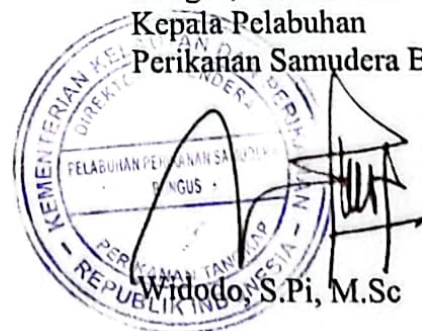
peninjauan kembali agar dapat mencapai keberhasilan, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas PPS Bungus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai media pertanggung jawaban, laporan ini berisikan tentang Laporan Kegiatan Selama Tahun 2023. Seluruh hasil realisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dituangkan secara transparan dan akuntabel dalam Laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu kami akan terus berupaya menyempurnakan dan penyajian Laporan Tahunan di masa yang akan datang.

Demikianlah laporan ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Bungus, Januari 2024

Kepala Pelabuhan  
Perikanan Samudera Bungus



Widodo, S.Pi, M.Sc



# BAB I

# PENDAHULUAN

# Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km<sup>2</sup>, sektor kelautan dan Perikanan menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Potensi pembangunan ekonomi kelautan Indonesia dikelola dengan inovatif dan baik menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan, dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Kegiatan produksi perikanan terbagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap (*capture fisheries*) dan perikanan budidaya (*aquaculture*).

Kegiatan ekonomi kelautan dan Perikanan di Indonesia terbagi dalam 11 sektor ekonomi kelautan yaitu (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pertambangan dan energi (ESDM), (6) pariwisata bahari, (7) hutan bakau, (8) perhubungan laut, (9) sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, dan (11) SDA non-konvensional. Total potensi nilai ekonomi kesebelas sektor kelautan Indonesia itu diperkirakan sebesar 1,33 triliun dolar AS/tahun atau 1,3 kali PDB Indonesia saat ini atau 7 kali lipat APBN 2017. Lebih dari itu, potensi lapangan kerja yang bisa dihasilkan dari kesebelas sektor kelautan tersebut adalah sekitar 45 juta orang atau 35% dari total angkatan kerja Indonesia (126 juta orang, yang berusia antara 15 sampai 64 tahun). Sementara itu, tingkat pemanfaatan (pembangunan) ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan baru sekitar 25% dari total potensinya. Dengan kata lain, peluang untuk mengembangkan (*room for expansion*) ekonomi kelautan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa sejatinya masih sangat besar.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan penjabaran dari misi pembangunan nasional. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap.
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap.
3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.



Pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan tangkap yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdayaguna tinggi. Pelabuhan perikanan yang modern setidaknya memberikan gambaran bahwa nelayan dan pengusaha perikanan kita benar benar memperhatikan kualitas produk perikanan. Aktivitas unit penangkapan ikan di laut, keberangkatannya dari pelabuhan harus dilengkapi dengan bahan bakar, perbekalan makanan, es dan lain-lain secukupnya. Dan aktifitas tersebut juga perlu campur tangan dari pemerintah. Agar bisa menyediakan keperluan keperluan yang di inginkan nelayan sebelum berangkat ke laut, Informasi tentang data harga dari kebutuhan ikan di pelabuhan perlu dikomunikasikan dengan cepat dari pelabuhan ke kapal di laut. Setelah selesai melakukan pekerjaan di laut kapal akan kembali dan masuk ke pelabuhan untuk membongkar dan menjual ikan hasil tangkapan. Pola pelabuhan sebagai keluar masuknya unit penangkapan dalam hal ini kapal perikanan harus selalu terkontrol. Kontrol inilah yang setidaknya saling menguntungkan, baik untuk pemerintah maupun untuk pengusaha perikanan dan nelayan.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah salah satu dari 22 pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mempunyai visi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perikanan Terpadu yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Sedangkan Misinya adalah 1) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Memadai dan Ramah Lingkungan, 2) Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah (*Value Added*) dan Daya Saing Produk Perikanan Untuk Kesejahteraan Nelayan, 3) Meningkatkan Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan yang Akurat dan Update. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPS Bungus) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada dibawah pembinaan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mendukung kegiatan perikanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, disamping melaksanakan tugas tersebut, Pelabuhan Perikanan juga menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan.

## Fungsi Pemerintahan

- a) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- b) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- c) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- d) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- e) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- f) Pelaksanaan kesyahbandaran;
- g) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- h) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- i) Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- j) Pemantauan wilayah pesisir;
- k) Pengendalian lingkungan;
- l) Kepabeanan; dan/atau;
- m) Keimigrasian.

## Fungsi Pengusahaan

- a) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- b) Pelayanan bongkar muat ikan;
- c) Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- d) Pemasaran dan distribusi ikan;
- e) Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- f) Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- g) Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- h) Wisata bahari; dan/atau
- i) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Peranan Pelabuhan Perikanan

Merujuk pada fungsi-fungsi pelabuhan perikanan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan produksi perikanan yang berujung pada peningkatan pendapatan negara, pemerintah daerah, dan masyarakat nelayan. Pembangunan pelabuhan perikanan bertujuan sebagai penggerak utama ekonomi bagi masyarakat nelayan, memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi wilayah, dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sebagai pusat ekonomi perikanan, pelabuhan perikanan diharapkan mampu menghasilkan pendapatan sendiri melalui pelayanan jasa yang meliputi penggunaan fasilitas, jasa, dan barang. Selain itu, pelabuhan perikanan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dan sekitarnya serta membuka peluang usaha baru karena aktivitas di pelabuhan.



# **BAB II**

## **PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

# Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran Kegiatan Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

Pada tahun 2023 anggaran yang dialokasikan untuk Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahap pertama sesuai dengan DIPA 032.03.2.531488/2023 Tanggal 30 November 2022 yaitu sebesar **Rp. 16.305.580.000,-** (*Enam belas miliar tiga ratus lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pada Tahun anggaran 2023 Pengelola Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Widodo, S.Pi, M.Sc
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Bayu Eko Wibowo, S.St.Pi
3. PPSPM : Risdianto, S.Kom
4. Bendahara Pengeluaran : Eva Susanti
5. Bendahara Penerimaan : Netti Hamidah

Adapun rincian kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Sumber dana dan Realisasi Penyerapan Anggaran terhadap Target Penyerapan anggaran pada TA. 2023

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2023 (Rp.)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>		<b>3.696.266.000,-</b>	<b>3.662.695.777,-</b>	<b>99,09%</b>
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	376.400.000,-	370.879.698,-	98,53%
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3.161.616.000,-	3.134.987.546,-	99,16%
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000,-	4.000.000,-	100%
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	154.250.000,-	152.828.533,-	99,08%
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>12.609.314.000,-</b>		
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.609.314.000,-	12.530.796.378,-	99,38%



Realisasi anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar Rp. 16.193.492.155,- atau sebesar 99,31 persen dari pagu sebesar Rp. 16.305.580.000,-. Sehingga pada tahun ini sisa anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 112.087.845,- atau 0,69% dari total Pagu Anggaran Tahun 2023.

Tabel 2. Rincian Anggaran, Penyerapan dan Sisa Anggaran Tahun 2023

Uraian				Pagu Revisi	Realisasi TA 2023		SISA ANGGARAN	
JUMLAH SELURUHNYA				16.305.580.000	16.193.862.395	99,31 %	111.717.605	0,69 %
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			3.696.266.000	3.663.065.777	99,10 %	33.200.223	0,91 %
HB.2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan			376.400.000	371.249.698	98,63 %	5.150.302	1,39 %
	ACA	Perizinan Produk		350.000.000	345.970.448	98,85 %	4.029.552	1,16 %
	ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan		350.000.000	345.970.448	98,85 %	4.029.552	1,16 %
		052	Implementasi kebijakan bidang kapal perikanan	350.000.000	345.970.448	98,85 %	4.029.552	1,16 %
		052.0A	Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan/Pengukuran/Pengujian/Inspeksi Kapal Perikanan	350.000.000	345.970.448	98,85 %	4.029.552	1,16 %
			521211 Belanja Bahan	26.740.000	26.607.800	99,51 %	132.200	0,50 %
			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	316.360.000	312.602.648	98,81 %	3.757.352	1,20 %
			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.900.000	6.760.000	97,97 %	140.000	2,07 %
	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		13.000.000	11.903.000	91,56 %	1.097.000	9,22 %
	BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan		13.000.000	11.903.000	91,56 %	1.097.000	9,22 %
		052	Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan	13.000.000	11.903.000	91,56 %	1.097.000	9,22 %
		052.0A	Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN)	13.000.000	11.903.000	91,56 %	1.097.000	9,22 %
			521211 Belanja Bahan	8.550.000	7.453.000	87,17 %	1.097.000	14,72 %
			521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1.450.000	1.450.000	100,00 %	0	0,00 %
			524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000	3.000.000	100,00 %	0	0,00 %
	PCA	Perizinan Produk		13.400.000	13.376.250	99,82 %	23.750	0,18 %
	PCA.001	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan		13.400.000	13.376.250	99,82 %	23.750	0,18 %
		052	Pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan	13.400.000	13.376.250	99,82 %	23.750	0,18 %
		052.0A	Sosialisasi dan Asistensi Pelayanan Buku Pelaut bagi Awak Kapal Perikanan dan E-PKL (Pelaksanaan Dalam Kantor/Balai Nelayan/Pemerintah)	13.400.000	13.376.250	99,82 %	23.750	0,18 %
			521211 Belanja Bahan	5.950.000	5.926.250	99,60 %	23.750	0,40 %
			521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1.450.000	1.450.000	100,00 %	0	0,00 %
			524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.000.000	6.000.000	100,00 %	0	0,00 %
HB.2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			3.161.616.000	3.134.987.546	99,16 %	26.628.454	0,85 %
<b>*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.</b>								
	BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi		2.492.836.000	2.468.730.300	99,03 %	24.105.700	0,98 %
	BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar		2.442.736.000	2.418.708.063	99,02 %	24.027.937	0,99 %
		051	Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	297.166.000	296.165.905	99,66 %	1.000.095	0,34 %
		051.0A	Pengelolaan dan Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	124.714.000	124.469.710	99,80 %	244.290	0,20 %
			521211 Belanja Bahan	37.350.000	37.312.650	99,90 %	37.350	0,10 %
			521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.200.000	5.195.000	99,90 %	5.000	0,10 %
			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.526.000	25.523.281	99,99 %	2.719	0,01 %
			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.600.000	12.580.000	99,84 %	20.000	0,16 %
			524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	44.038.000	43.858.779	99,59 %	179.221	0,41 %
		051.0C	LAYANAN KESYAHBANDARAN PELABUHAN PERIKANAN	103.446.000	102.955.689	99,53 %	490.311	0,48 %
			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103.446.000	102.955.689	99,53 %	490.311	0,48 %
		051.0D	Pengelolaan dan Operasional PSM di Pelabuhan Perikanan	46.436.000	46.197.506	99,49 %	238.494	0,52 %
			521211 Belanja Bahan	10.200.000	10.012.250	98,16 %	187.750	1,88 %
			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.836.000	33.835.256	100,00 %	744	0,00 %
			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000	2.350.000	97,92 %	50.000	2,13 %
		051.0E	Desimilasi Regulasi Kesyahbandaran dan Teman SPB di Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PNBSP Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan Terukur	18.330.000	18.303.000	99,85 %	27.000	0,15 %
			521211 Belanja Bahan	12.830.000	12.803.000	99,79 %	27.000	0,21 %
			521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1.000.000	1.000.000	100,00 %	0	0,00 %

					524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.500.000	4.500.000	100,00 %	0	0,00 %
				051.0F		SOSIALISASI PELAKSANAAN MIGRASI PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DI PPS BUNGUS	4.240.000	4.240.000	100,00 %	0	0,00 %
					521211	Belanja Bahan	2.440.000	2.440.000	100,00 %	0	0,00 %
					521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.800.000	1.800.000	100,00 %	0	0,00 %
				052		Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan	56.460.000	55.956.335	99,11 %	503.665	0,90 %
				052.0A		Pengelolaan dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan	23.400.000	23.352.035	99,80 %	47.965	0,21 %
					524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.600.000	5.598.000	99,96 %	2.000	0,04 %
<b>*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.</b>											
					524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17.800.000	17.754.035	99,74 %	45.965	0,26 %
				052.0B		SOSIALISASI SHTI DI PELABUHAN PERIKANAN	16.430.000	16.325.400	99,36 %	104.600	0,64 %
					521211	Belanja Bahan	10.930.000	10.825.400	99,04 %	104.600	0,97 %
					521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.000.000	1.000.000	100,00 %	0	0,00 %
					524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.500.000	4.500.000	100,00 %	0	0,00 %
				052.0C		SOSIALISASI SHTI DI PELABUHAN BINAAN	16.630.000	16.278.900	97,89 %	351.100	2,16 %
					521211	Belanja Bahan	11.130.000	10.778.900	96,85 %	351.100	3,26 %
					521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.000.000	1.000.000	100,00 %	0	0,00 %
					524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.500.000	4.500.000	100,00 %	0	0,00 %
				053		Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan	61.735.000	60.938.600	98,71 %	796.400	1,31 %
				053.0A		Pengelolaan dan Operasional Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan	31.910.000	31.711.400	99,38 %	198.600	0,63 %
					521211	Belanja Bahan	10.560.000	10.491.000	99,35 %	69.000	0,66 %
					524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.300.000	8.275.400	99,70 %	24.600	0,30 %
					524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.050.000	12.945.000	99,20 %	105.000	0,81 %
				053.0B		Sosialisasi CPIB di Pelabuhan Perikanan	16.078.000	15.957.300	99,25 %	120.700	0,76 %
					521211	Belanja Bahan	9.078.000	8.957.300	98,67 %	120.700	1,35 %
					521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.000.000	1.000.000	100,00 %	0	0,00 %
					524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.000.000	6.000.000	100,00 %	0	0,00 %
				053.0C		Pelaksanaan Pelayanan Sertifikasi SCPIB	13.747.000	13.269.900	96,53 %	477.100	3,60 %
					521211	Belanja Bahan	1.797.000	1.789.900	99,60 %	7.100	0,40 %
					524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.950.000	11.480.000	96,07 %	470.000	4,09 %
				054		Pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan	1.654.992.000	1.633.743.669	98,72 %	21.248.331	1,30 %
				054.0A		Pengelolaan dan Operasional Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) di Pelabuhan Perikanan	36.412.000	36.361.075	99,86 %	50.925	0,14 %
					524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000	850.000	94,44 %	50.000	5,88 %
					524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	35.512.000	35.511.075	100,00 %	925	0,00 %
				054.0B		SOSIALISASI PENGUSAHAAN FASILITAS DAN PELAYANAN PUBLIK	6.830.000	6.823.780	99,91 %	6.220	0,09 %
<b>*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.</b>											
					521211	Belanja Bahan	5.830.000	5.823.780	99,89 %	6.220	0,11 %
					521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.000.000	1.000.000	100,00 %	0	0,00 %
				054.0C		PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN PELANGGAN DAN KPI	15.570.000	15.540.000	99,81 %	30.000	0,19 %
					521211	Belanja Bahan	10.070.000	10.040.000	99,70 %	30.000	0,30 %
					524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.500.000	5.500.000	100,00 %	0	0,00 %
				054.0D		PERSIAPAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK	141.198.000	138.919.140	98,39 %	2.278.860	1,64 %
					521211	Belanja Bahan	62.678.000	61.399.140	97,96 %	1.278.860	2,08 %
					522151	Belanja Jasa Profesi	1.800.000	1.800.000	100,00 %	0	0,00 %
					524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.720.000	75.720.000	98,70 %	1.000.000	1,32 %
				054.0E		SOSIALISASI SIJAKA	17.640.000	17.449.000	98,92 %	191.000	1,09 %
					521211	Belanja Bahan	10.340.000	10.149.000	98,15 %	191.000	1,88 %
					521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.800.000	1.800.000	100,00 %	0	0,00 %
					524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.500.000	5.500.000	100,00 %	0	0,00 %
				054.0F		HARMONISASI DATA PELAYANAN, REVIEW SOP DAN STANDAR PELAYANAN DI PELABUHAN PERIKANAN	32.249.000	32.094.500	99,52 %	154.500	0,48 %
					521211	Belanja Bahan	32.249.000	32.094.500	99,52 %	154.500	0,48 %
				054.0G		PENYEDIAAN TENAGA PENGINPUT DATA PENANGKAPAN IKAN TERPADU	134.179.000	118.373.192	88,22 %	15.805.808	13,35 %
					522191	Belanja Jasa Lainnya	134.179.000	118.373.192	88,22 %	15.805.808	13,35 %

				054.0H	Pengelolaan dan Operasional ISO 14001 di Pelabuhan Perikanan	48.610.000	48.526.000	99,83 %	84.000	0,17 %
				521211	Belanja Bahan	4.860.000	4.803.000	98,83 %	57.000	1,19 %
				522151	Belanja Jasa Profesi	27.750.000	27.750.000	100,00 %	0	0,00 %
				522191	Belanja Jasa Lainnya	16.000.000	15.973.000	99,83 %	27.000	0,17 %
				054.0I	LAYANAN DUKUNGAN APLIKASI SELARASKAN	6.000.000	5.999.905	100,00 %	95	0,00 %
				524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.000.000	5.999.905	100,00 %	95	0,00 %
				054.0J	PENDAMPINGAN KEGIATAN KALAJU DI SUMATERA BARAT	3.750.000	3.300.000	88,00 %	450.000	13,64 %
				524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000	3.300.000	88,00 %	450.000	13,64 %
				054.0K	PERJALANAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS	930.869.000	929.939.685	99,90 %	929.315	0,10 %
<b>*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.</b>										
				524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	904.619.000	903.864.050	99,92 %	754.950	0,08 %
				524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.250.000	26.075.635	99,34 %	174.365	0,67 %
				054.0L	PELAKSANAAN PERINGATAN HARI BESAR, SAJAMEH DAN BULAN CINTA LAUT	19.085.000	18.979.756	99,45 %	105.244	0,55 %
				521211	Belanja Bahan	19.085.000	18.979.756	99,45 %	105.244	0,55 %
				054.0M	PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI Mendukung Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur	204.100.000	203.005.174	99,46 %	1.094.826	0,54 %
				522191	Belanja Jasa Lainnya	180.100.000	179.398.200	99,61 %	701.800	0,39 %
				524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.000.000	23.606.974	98,36 %	393.026	1,66 %
				054.0N	PELAKSANAAN MONITORING DAN PELAPORAN ONLINE	58.500.000	58.432.462	99,88 %	67.538	0,12 %
				521211	Belanja Bahan	42.400.000	42.379.800	99,95 %	20.200	0,05 %
				522191	Belanja Jasa Lainnya	16.100.000	16.052.662	99,71 %	47.338	0,29 %
				055	Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan	275.653.000	275.644.264	100,00 %	8.736	0,00 %
				055.0A	Operasional K5 di pelabuhan perikanan	87.282.000	87.275.414	99,99 %	6.586	0,01 %
				521211	Belanja Bahan	69.282.000	69.275.414	99,99 %	6.586	0,01 %
				522191	Belanja Jasa Lainnya	18.000.000	18.000.000	100,00 %	0	0,00 %
				055.0B	K5 di dermaga dan kolam pelabuhan	165.945.000	165.945.000	100,00 %	0	0,00 %
				522191	Belanja Jasa Lainnya	165.945.000	165.945.000	100,00 %	0	0,00 %
				055.0C	K5 di tempat pembuangan sampah sementara	12.396.000	12.395.000	99,99 %	1.000	0,01 %
				521211	Belanja Bahan	12.396.000	12.395.000	99,99 %	1.000	0,01 %
				055.0D	K5 di lokasi cold storage dan wilayah industri	10.030.000	10.028.850	99,99 %	1.150	0,01 %
				521211	Belanja Bahan	10.030.000	10.028.850	99,99 %	1.150	0,01 %
				056	Pelaksanaan tata kelola dan operasional SPDN di pelabuhan perikanan	1.650.000	1.650.000	100,00 %	0	0,00 %
				056.0A	Pengelolaan dan Operasional Kegiatan SPDN di Pelabuhan Perikanan	1.650.000	1.650.000	100,00 %	0	0,00 %
				524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.650.000	1.650.000	100,00 %	0	0,00 %
				057	Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan	95.080.000	94.609.290	99,50 %	470.710	0,50 %
				057.0A	Pengelolaan dan Operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	37.000.000	36.790.263	99,43 %	209.737	0,57 %
<b>*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.</b>										
				524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.700.000	30.615.263	99,72 %	84.737	0,28 %
				524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.300.000	6.175.000	98,02 %	125.000	2,02 %
				057.0D	PELAKSANAAN PENDATAAN PRODUKSI PERIKANAN UNTUK MENUNJANG PNBP PASCA PRODUKSI	21.378.000	21.175.027	99,05 %	202.973	0,96 %
				524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.378.000	21.175.027	99,05 %	202.973	0,96 %
				057.0E	KEIKUTSERTAAN PELAKSANAAN PAMERAN DALAM RANGKA PENAS TANI KE XVI 2023	36.702.000	36.644.000	99,84 %	58.000	0,16 %
				521211	Belanja Bahan	25.452.000	25.419.000	99,87 %	33.000	0,13 %
				524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.250.000	11.225.000	99,78 %	25.000	0,22 %
				BGA.004	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	50.100.000	50.022.237	99,84 %	77.763	0,16 %
				051	Pendampingan dan Supervisi Operasional dalam menunjang pelaksanaan PNBP pasca produksi/sistem kontrak	27.900.000	27.822.742	99,72 %	77.258	0,28 %
				051.0A	TANPA SUB KOMPONEN	27.900.000	27.822.742	99,72 %	77.258	0,28 %
				524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	27.900.000	27.822.742	99,72 %	77.258	0,28 %
				052	Pelaksanaan Pemantauan dan Analisis di Pelabuhan Perikanan	22.200.000	22.199.495	100,00 %	505	0,00 %
				052.0C	PEMANTAUAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN PNBP PASCA PRODUKSI	22.200.000	22.199.495	100,00 %	505	0,00 %



						524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.200.000	22.199.495	100,00 %	505	0,00 %
						RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	1.500.000	1.500.000	100,00 %	0	0,00 %
						RAL.001	Sarana pelabuhan perikanan mendukung pelaksanaan PIT dan PNBK Perikanan Tangkap yang disediakan	1.500.000	1.500.000	100,00 %	0	0,00 %
						051	Pengadaan sarana penunjang operasional pelabuhan perikanan	1.500.000	1.500.000	100,00 %	0	0,00 %
						051.0A	Pengadaan sarana penunjang operasional pelabuhan perikanan	1.500.000	1.500.000	100,00 %	0	0,00 %
						523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000	1.500.000	100,00 %	0	0,00 %
						RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	667.280.000	664.757.246	99,62 %	2.522.754	0,38 %
						RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	667.280.000	664.757.246	99,62 %	2.522.754	0,38 %
						051	Pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di UPT Pusat untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	667.280.000	664.757.246	99,62 %	2.522.754	0,38 %
						051.0A	REHABILITASI FASILITAS PELABUHAN	667.280.000	664.757.246	99,62 %	2.522.754	0,38 %
						532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	332.640.000	331.404.930	99,63 %	1.235.070	0,37 %
						533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.000.000	47.000.000	100,00 %	0	0,00 %
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.												
						534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	102.170.000	101.500.000	99,34 %	670.000	0,66 %
						534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	185.470.000	184.852.316	99,67 %	617.684	0,33 %
						HB.2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000	4.000.000	100,00 %	0	0,00 %
						QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4.000.000	4.000.000	100,00 %	0	0,00 %
						QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	4.000.000	4.000.000	100,00 %	0	0,00 %
						052	Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)	4.000.000	4.000.000	100,00 %	0	0,00 %
						052.0A	Pelaksanaan Fasilitasi Pendanaan Usaha Nelayan melalui Pojok Pendanaan Nelayan	4.000.000	4.000.000	100,00 %	0	0,00 %
						521211	Belanja Bahan	1.000.000	1.000.000	100,00 %	0	0,00 %
						521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.000.000	3.000.000	100,00 %	0	0,00 %
						HB.2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	154.250.000	152.828.533	99,08 %	1.421.467	0,93 %
						QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	125.000.000	123.587.178	98,87 %	1.412.822	1,14 %
						QGA.001	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	125.000.000	123.587.178	98,87 %	1.412.822	1,14 %
						051	Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur	125.000.000	123.587.178	98,87 %	1.412.822	1,14 %
						051.0A	Operasional Sekretariat Unit Pengelola Perikanan LPP WPPNRI 572	17.645.000	16.998.320	96,34 %	646.680	3,80 %
						521211	Belanja Bahan	17.645.000	16.998.320	96,34 %	646.680	3,80 %
						051.0B	Operasional Unit Pengelola Perikanan LPP WPPNRI 572 Mendukung Perikanan Terukur di Zona Industri Perikanan	107.355.000	106.588.858	99,29 %	766.142	0,72 %
						522151	Belanja Jasa Profesi	5.600.000	5.600.000	100,00 %	0	0,00 %
						524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.248.000	47.243.858	99,99 %	4.142	0,01 %
						524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	54.507.000	53.745.000	98,60 %	762.000	1,42 %
						QKB	Pemantauan produk	29.250.000	29.241.355	99,97 %	8.645	0,03 %
						QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	29.250.000	29.241.355	99,97 %	8.645	0,03 %
						051	Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan	29.250.000	29.241.355	99,97 %	8.645	0,03 %
						051.0A	Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan	29.250.000	29.241.355	99,97 %	8.645	0,03 %
						521211	Belanja Bahan	7.310.000	7.302.250	99,89 %	7.750	0,11 %
						521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.600.000	1.600.000	100,00 %	0	0,00 %
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.												
						524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.388.000	4.388.000	100,00 %	0	0,00 %
						524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	750.000	100,00 %	0	0,00 %
						524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.750.000	11.750.000	100,00 %	0	0,00 %
						524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	3.452.000	3.451.105	99,97 %	895	0,03 %



						521111	Belanja Keperluan Perkantoran	226.423.000	224.937.935	99,34 %	1.485.065	0,66 %
						521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	154.908.000	154.908.000	100,00 %	0	0,00 %
						521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	322.871.000	322.793.100	99,98 %	77.900	0,02 %
						522191	Belanja Jasa Lainnya	1.558.754.000	1.558.352.619	99,97 %	401.381	0,03 %
						002.0G	PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI	183.057.000	182.972.400	99,95 %	84.600	0,05 %
						521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	183.057.000	182.972.400	99,95 %	84.600	0,05 %
						EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	274.000.000	273.351.000	99,76 %	649.000	0,24 %
						EBB.951	Layanan Sarana Internal	75.000.000	74.925.000	99,90 %	75.000	0,10 %
						051	Pengadaan sarana perkantoran	75.000.000	74.925.000	99,90 %	75.000	0,10 %
						051.0A	TANPA SUB KOMPONEN	75.000.000	74.925.000	99,90 %	75.000	0,10 %
						532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000	74.925.000	99,90 %	75.000	0,10 %
						EBB.971	Layanan Prasarana Internal	199.000.000	198.426.000	99,71 %	574.000	0,29 %
						051	Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran	199.000.000	198.426.000	99,71 %	574.000	0,29 %
						051.0A	PENGADAAN DAN REHABILITASI PRASARANA PERKANTORAN	199.000.000	198.426.000	99,71 %	574.000	0,29 %
						532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	49.000.000	48.951.000	99,90 %	49.000	0,10 %
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.												
						533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	150.000.000	149.475.000	99,65 %	525.000	0,35 %
						EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	52.000.000	48.119.943	92,54 %	3.880.057	8,06 %
						EBC.954	Layanan Manajemen SDM	52.000.000	48.119.943	92,54 %	3.880.057	8,06 %
						051	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai	52.000.000	48.119.943	92,54 %	3.880.057	8,06 %
						051.0A	MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DAN PENERAPAN DISPLIN PEGAWAI	31.208.000	31.207.447	100,00 %	553	0,00 %
						524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.208.000	31.207.447	100,00 %	553	0,00 %
						051.0B	PENGUATAN INTEGRITAS DAN SUBSTANSI TEKNIS BAGI PNS PENGANGKATAN TAHUN 2023	11.000.000	10.812.496	98,30 %	187.504	1,73 %
						524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.000.000	10.812.496	98,30 %	187.504	1,73 %
						051.0C	SOSIALISASI KEPEGAWAIAN TERKAIT TASPEN, KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI	9.792.000	6.100.000	62,30 %	3.692.000	60,52 %
						521211	Belanja Bahan	3.050.000	3.050.000	100,00 %	0	0,00 %
						521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.800.000	1.800.000	100,00 %	0	0,00 %
						524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.942.000	1.250.000	25,29 %	3.692.000	295,36 %
						EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	249.740.000	245.748.555	98,40 %	3.991.445	1,62 %
						EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	74.700.000	71.483.675	95,69 %	3.216.325	4,50 %
						053	Penyusunan arsitektur informasi kinerja, sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan dan anggaran	74.700.000	71.483.675	95,69 %	3.216.325	4,50 %
						053.0A	PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA RAKERNIS	74.700.000	71.483.675	95,69 %	3.216.325	4,50 %
						524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	74.700.000	71.483.675	95,69 %	3.216.325	4,50 %
						EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	83.109.000	82.522.996	99,29 %	586.004	0,71 %
						052	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran	83.109.000	82.522.996	99,29 %	586.004	0,71 %
						052.0A	MONEV DAN PELAPORAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	83.109.000	82.522.996	99,29 %	586.004	0,71 %
						524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.109.000	65.702.135	99,38 %	406.865	0,62 %
						524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17.000.000	16.820.861	98,95 %	179.139	1,06 %
						EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	91.931.000	91.741.884	99,79 %	189.116	0,21 %
						054	Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	91.931.000	91.741.884	99,79 %	189.116	0,21 %
						054.0A	PELAPORAN KEUANGAN LINGKUP DITJEN PERIKANAN TANGKAP	91.931.000	91.741.884	99,79 %	189.116	0,21 %
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.												
						524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.901.000	35.717.789	99,49 %	183.211	0,51 %
						524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	750.000	100,00 %	0	0,00 %
						524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	55.280.000	55.274.095	99,99 %	5.905	0,01 %

Dengan beralihnya pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang telah mengimplementasikan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam hal ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) turut ikut serta dalam melaksanakan Visi, Misi dan Tujuan



yang ingin dicapai oleh Ditjen Perikanan Tangkap dengan melaksanakan Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diturunkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap maupun yang ditetapkan sendiri oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Bungus hasil BSC Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET					REALISASI				% CAPAIAN
				TAHUNAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta).	1.337				1.337				2.646,73	234,18
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton).	5.770	1.440	2.880	4.320	5.770	2.158,7	3.942,4	5.478,96	7.287,74	126,30
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (Persen).	100				100				100	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	83	83	83	83	83	84,42	84,17	84,86	84,58	101,90
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	80				80					93,75
4.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	80				80				82,35	102,94
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	30,01	7	15	20	30,01					36,27
5.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal).	50				50				372	744
6.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen).	30				30				30,36	101,2

7.	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	10	Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai)	45,10				45,10				80,74	187,89
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75	75	75	75	75	100	100	78.12	92	122,67
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	93				93				95,34	102,52
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	80		71		80		69,1		87,44	109,30
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	77,5				77,5				86,70	111,87
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	77,5				77,5				97,50	125,81
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	93,75		82		93,75		95,87		94,74	101,06
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	82				82				88,36	107,76
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,21	70	75	80	88,21				88,61	100,45

Pembahasan masing – masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Membandingkan realisasi indikator triwulan I, II dan III tahun 2023 terhadap target capaian triwulan IV tahun 2023;
2. Membandingkan realisasi indikator tahun 2023 terhadap target tahun 2023;

3. Membandingkan realisasi indikator tahun 2022 terhadap target indikator tahun 2023 yang merupakan awal RPJMN dan tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJMN. Hal ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPS/Kepala Bappenas);
4. Membandingkan realisasi indikator tahun 2023 terhadap target indikator yang sifatnya standar nasional (apabila ada) dengan tujuan untuk mengukur pencapaian PPS Bungus terhadap capaian Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan capaian nasional;
5. Menyajikan analisa (penyebab) terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target tahun 2023 berdasarkan faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator;
6. Menyajikan besarnya jumlah sumberdaya yang digunakan berupa alokasi anggaran dalam upaya mencapai target indikator tahun 2023 sesuai dengan yang terdapat pada dokumen penganggaran (RKAKL). Analisa ini terbatas pada internal process perspective dan learning and growth perspective dikarenakan kedua perspektif ini sifatnya proses dan input (masukan) yang dapat langsung diukur efeknya terhadap pencapaian indikator, sedangkan kedua perspektif lainnya yakni stakeholder perspective dan customer perspective merupakan dampak atau hasil dari pencapaian indikator;
7. Menyajikan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator tahun 2023.





**BAB III**  
**PERKEMBANGAN**  
**CAPAIAN IKU**

# Analisa Capaian Kinerja

Pada Tahun 2023, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut :

## **Sasaran Kinerja (SK) 1: Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus**

Sasaran kinerja pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah “Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Indikator Nilai PNBP PPS Bungus adalah seluruh penerimaan PPS Bungus yang merupakan pelaksanaan dari fungsi perusahaan PPS Bungus sebagai unit Pelaksanan Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP PPS Bungus didasarkan pada PP Nomor 75 Tahun 2015 yang diperbaharui dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. Ada dua jenis penerimaan di PPS Bungus, yakni penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan fungsional di PPS Bungus, yaitu: Pelayanan Penggunaan tanah dan bangunan, tanah yang dipakai di kawasan Pelabuhan perikanan, pelayanan penggunaan peralatan dan mesin, pelayanan peralatan di kawasan pelabuhan perikanan, pelayanan penggunaan peralatan pengolahan, pelayanan penggunaan transportasi, pelayanan tambat untuk kapal perikanan, pelayanan tambat untuk kepala non perikanan, pelayanan docking dengan perkerjaan, pelayanan perbaikan kapal, pelayanan pengadaan air, pelayanan bengkel pelayanan pas masuk harian, pelayanan pas masuk berlangganan, pelayanan kebersihan di kawasan pelabuhan, pelayanan kebersihan kolam pelabuhan, dan pendapat jasa lainnya.

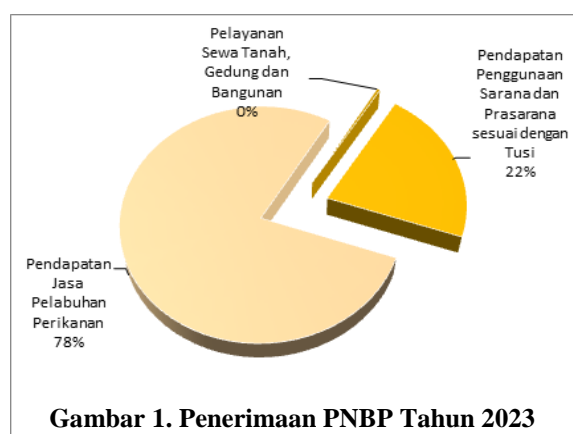
## **Indikator Kinerja (IK) 1 – Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus**

### **Target dan Realisasi**

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan.

Tabel 4. Target dan Realisasi Nilai PNBP di PPS Bungus

Anggaran	Jenis Jasa	Target 2023 (Rp.)	Realisasi 2023 (Rp.)
425131	<b>Pelayanan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan</b>		<b>10.661.078</b>
425151	<b>Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi</b>	<b>240.000.000</b>	<b>572.019.636</b>
	Pelayanan Penggunaan Tanah dan Bangunan	107.000.000	105.939.468
	Tanah yang dipakai di kawasan Pelabuhan Perikanan	13.750.000	32.384.785
	Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin	100.000.000	418.296.933
	Pelayanan peralatan di kawasan pelabuhan perikanan	3.750.000	9.880.450
	Pelayanan Penggunaan Peralatan Pengolahan	3.000.000	1.768.000
	Pelayanan Penggunaan Transportasi	12.500.000	3.750.000
425621	<b>Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan</b>	<b>940.860.000</b>	<b>2.064.051.170</b>
	Pelayanan tambat untuk Kapal Perikanan	25.000.000	238.085.208
	Pelayanan Tambat untuk Kapal Non Perikanan	345.000.000	733.300.700
	Pelayanan Docking dengan Pekerja	257.360.000	170.622.300
	Pelayanan Perbaikan Kapal	23.000.000	162.020.000
	Pelayanan Pengadaan Air	22.000.000	146.598.000
	Pelayanan Bengkel	3.000.000	2.148.000
	Pelayanan Pas Masuk Harian	113.000.000	62.274.100
	Pelayanan Pas Masuk Berlangganan	135.000.000	42.390.000
	Pelayanan Kebersihan di Kawasan Pelabuhan	9.500.000	22.973.017
	Pelayanan Kebersihan Kolam Pelabuhan	6.000.000	87.310.382
	Pendapatan Jasa Lainnya	2.000.000	396.329.463
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>1.337.000.000</b>	<b>2.646.731.884</b>



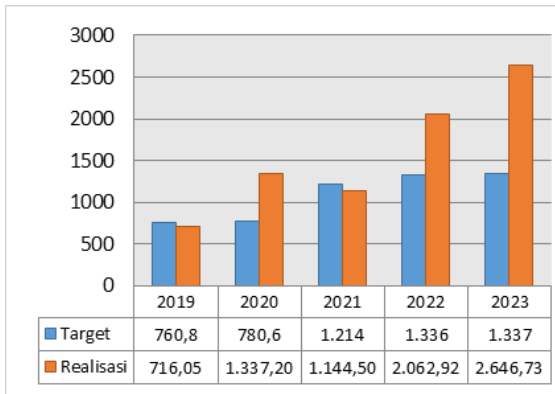
Gambar 1. Penerimaan PNBP Tahun 2023

Realisasi PNBP paling besar pada Tahun 2023 berasal dari akun pendapatan jasa pelabuhan Perikanan dengan penerimaan terbanyak dari pelayanan tambat untuk kapal non perikanan sebesar Rp. 733,3 Juta (27,7%) dari total penerimaan tahun 2023. Sedangkan realisasi dari akun pendapatan penggunaan sarana dan prasarana, penerimaan terbanyak berasal dari Pelayanan

Penggunaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.418,2 Juta (15,8%) dari total penerimaan tahun 2023.

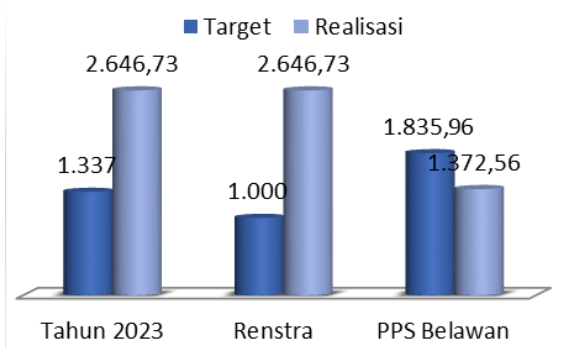
Tabel 5. Capaian Penerima PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 1 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
IK 1 Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
113,74	263,55	1.144,5	2.062,92	2.646,73	1.337	2.646,73	197,96	1.000	2.646,73



**Gambar 2. Capaian PPS Bungus**

mensosialisasikan dan melakukan penagihan kepada stakeholder, telah menjadikan jumlah penerimaan tahun 2023 meningkat, dengan kenaikan sebesar 43,55% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 dan telah mencapai peningkatan sebesar 103,69% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2021.



**Gambar 3. Perbandingan Realisasi Capaian**

Apabila dibandingkan dengan capaian selama 5 (lima) tahun terakhir, terdapat peningkatan realisasi penerimaan PNBPN di PPS Bungus sejak tahun 2019 sampai tahun 2023. Penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2023 dimana penerimaan tarif PNBPN menggunakan PP 85 Tahun 2021. Adanya perubahan tarif PNBPN sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 dan dengan komitmen dari petugas PNBPN dalam

Apabila dihitung persentase penerimaan PNBPN tahun 2023 mencapai 197,96% jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar Rp. 1.337 Juta. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra (2024), capaian tahun 2023 sebesar 264,67%. Kemudian apabila dibandingkan dengan unit kerja lain, yakni PPS Belawan dengan persentase realisasi sebesar 74,76%, maka penerimaan PPS Bungus jauh lebih tinggi dengan selisih 123,2%.

Apabila dibandingkan dengan capaian selama 5 (lima) tahun terakhir, terdapat peningkatan realisasi penerimaan PNBPN di PPS Bungus sejak tahun 2019 sampai tahun 2023. Penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2023 dimana penerimaan tarif PNBPN menggunakan PP 85 Tahun 2021. Adanya perubahan tarif PNBPN sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 dan dengan komitmen dari petugas PNBPN dalam

## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian Penerimaan PNBPN Non SDA tahun 2023 di PPS Bungus didukung oleh komitmen dari petugas pelayanan jasa dan penagihan atas jasa pelayanan kepada stakeholder. Terlaksananya kegiatan pelayanan cold storage, docking, tambat labuh dan jasa listrik dengan maksimal menjadi penunjang capaian PNBPN tahun 2023 di PPS Bungus.

Upaya pencapaian realisasi PNBPN tahun 2023 di PPS Bungus masih menemukan permasalahan yaitu masih kurangnya pemahaman stakeholder terkait tata cara pembayaran dengan mekanisme non tunai, meskipun telah dilakukan sosialisasi terkait cara menggunakan pembayaran non tunai. Selain itu, masih ditemukan layanan yang belum bisa dimaksimalkan, seperti pelayanan jasa air yang selama ini hanya mengandalkan air bukit di pelabuhan sehingga ketika musim kemarau debit air bukit berkurang, maka pelabuhan akan kesulitan dalam menyediakan air.



## Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan IKU ini adalah Pendampingan dan Supervisi Operasional dalam menunjang pelaksanaan PNBP pasca produksi/sistem kontrak.

## Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penerimaan PNBP di PPS Bungus, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumberdaya pendukung meliputi 2 (dua) hal, yaitu anggaran dan sumber daya manusia.

### Anggaran

Tabel 6. Analisa Efisiensi IKU Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) -RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus	197,96%	27.900.000	27.882.742	55.230.940	27.348.198
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n(AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				<b>98%</b>	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right) = 50\% + \left(\frac{98\%}{20} \times 50\right)$				<b>295%</b>	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Penerimaan PNBP Non SDA sebesar 99,9% dari total anggaran Rp. 27.900.000,- dengan efisiensi sebesar 98% dan nilai efisiensi 295%.

### Sumber Daya Manusia

Pencapaian IKU Penerimaan PNBP Non SDAPPS Bungus, didukung oleh Tim Petugas Pelayanan Publik, yang terdiri dari 11 orang pegawai petugas Pelayanan Jasa PNBP. Terdapat pegawai yang memegang lebih dari satu jenis pelayanan Jasa. Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh adanya aplikasi Sistem Jasa Kepelabuhanan (SIJAKA) yang telah terintegrasi dengan aplikasi teman SPB dan Simponi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran tambat labuh.

## Sasaran Kinerja (SK) 2: Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkat

Sasaran kinerja kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah “Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

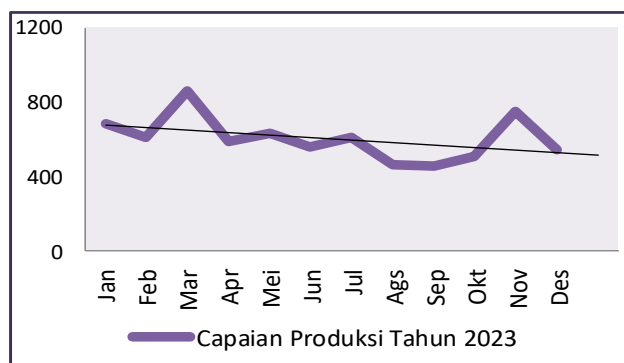
### Indikator Kinerja (IK) 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Volume produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi perikanan tangkap yang didaratkan di PPS Bungus. Pengumpulan data produksi dilakukan oleh petugas Pendataan di Pelabuhan Perikanan. Pendataan dilaksanakan oleh petugas pendataan terhadap produksi ikan yang didaratkan dengan menggunakan form monitoring data produksi harian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi, selanjutnya diolah oleh petugas pengelola data, serta dilaporkan secara berkala, baik harian, bulanan, dan triwulanan sebagai bentuk realisasi produksi perikanan tangkap.

### Target dan Realisasi

Tabel 7. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus Tahun 2023

No	Bulan	Volume Jumlah Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. Juta)
1	Januari	682,78	10.148.894.000
2	Februari	613,47	8.877.339.000
3	Maret	862,43	15.137.284.000
4	April	589,27	8.513.746.000
5	Mei	633,57	9.114.829.000
6	Juni	560,88	8.719.127.000
7	Juli	609,06	11.344.239.000
8	Agustus	467,49	7.806.325.000
9	September	460,01	5.720.916.000
10	Oktober	513,08	7.220.738.000
11	November	752,75	5.088.386.000
12	Desember	542,93	4.837.457.000
<b>Total</b>		<b>7.287,72</b>	<b>102.529.280.000</b>



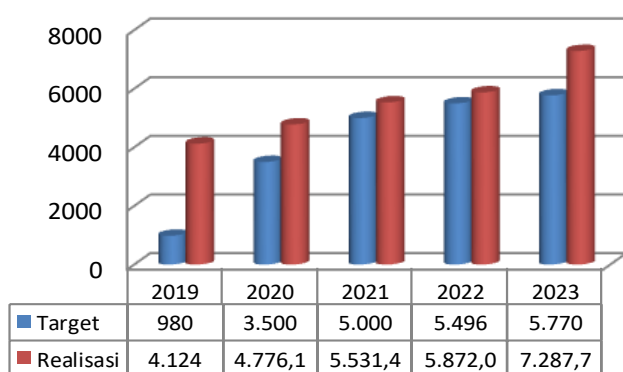
Gambar 4 Capaian Volume Produksi Tahun 2023

Dari gambar 4 dapat terlihat bahwa capaian volume produksi di PPS Bungus pada tahun 2023 cukup beragam, naik dan turun. Capaian volume produksi paling besar adalah pada bulan Maret dengan total capaian 862,43 (ton) atau setara dengan nilai Rp. 15.137.284.000. Capaian volume produksi paling kecil adalah pada bulan September dengan total 460,01

(ton) atau setara dengan nilai Rp. 5.720.916.000. Apabila ditinjau dari sisi capaian nilai produksinya, maka capaian paling rendah adalah pada bulan Desember senilai Rp.4.837.457.000 walaupun total volume produksinya tinggi, namun jenis tangkapan ikan mempengaruhi nilai produksi.

Tabel 8 Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus

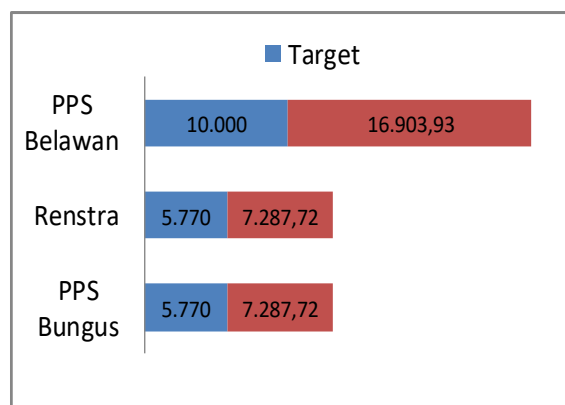
SK 2		Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkat								
IK 2		Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus		
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
4.124	4.776,1	5.531,4	5.872,03	7.287,72	5.770	7287,72	126,3	1.000	2.646,73	



Gambar 5 Capaian PPS Bungus Tahun 2019 – 2023

Jika dibandingkan dengan target akhir (2024) renstra, capaian IK 2 sebesar 126,3%. Jika dibandingkan dengan unit kerja lain (PPS Belawan), jika dibandingkan baik target maupun realisasi PPS Belawan, sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target maupun capaiannya PPS Bungus, jika dihitung berdasarkan persentase, maka realisasi volume produksi di PPS Belawan tahun 2023 adalah sebesar 42,74% lebih besar dibandingkan di PPS Bungus.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2022), dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan realisasi sebesar 19,5% volume produksi di PPS Bungus. Dalam lima tahun terakhir, target volume produksi juga terus meningkat sebesar  $\pm 5\%$  dari target tahun sebelumnya dan capaian volume produksi di PPS Bungus selalu di atas 100% selama 5 (lima) tahun.



Gambar 6 Perbandingan Capaian

### Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan realisasi volume produksi di PPS Bungus didukung adanya sinergi dan kolaborasi antara Kelompok Kerja Kesyahbandaran dan Kelompok Kerja Operasional yang saling bekerja sama, serta upaya aktif petugas pendataan ikan dalam melakukan pemantauan lapangan dan

dermaga secara berkelanjutan dan konsisten. Petugas pendataan juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas bongkar dengan tujuan mencatat hasil dan nilai produksi secara akurat. Dalam upaya pencapaian realisasi volume produksi di PPS Bungus pada tahun 2023 terdapat hambatan yang sifatnya diluar kendali, yakni faktor cuaca. Pada Triwulan IV tahun 2023 hasil tangkapan di PPS Bungus tidak berada dalam nilai optimal disebabkan oleh banyaknya kapal nelayan yang tidak bisa melaut dikarenakan cuaca ekstrem.

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator volume produksi tahun 2023 adalah :

- a) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
- b) Pelaksanaan Pendataan Produksi Perikanan Untuk menunjang PNBP Pasca Produksi

### Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### Anggaran

Tabel 9. Analisa Efisiensi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) -RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus	126,3%	37.378.000	14.949.300	47.209.774	32.260.474
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n(AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				<b>36,8%</b>	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right) = 50\% + \left(\frac{36,8\%}{20} \times 50\right)$				<b>142%</b>	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Penerimaan PNB Non SDA sebesar 89,5% dari total alokasi Rp. 37.378.000,- dengan efisiensi sebesar 36,8% dan nilai efisiensi 142,07%.

#### Sumber Daya Manusia

Pencapaian IKU ini didukung oleh SDM terdiri dari petugas pendataan produksi, pengelola data perikanan, dan verifikator data produksi yang semuanya berada di sub pokja operasional pelabuhan, sehingga memudahkan koordinasi dan sinkronisasi data produksi.



### Sasaran Kinerja (SK) 3: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing

Sasaran kinerja keenam (SK-3) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

#### Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan. Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBPN yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan pengusahaan.

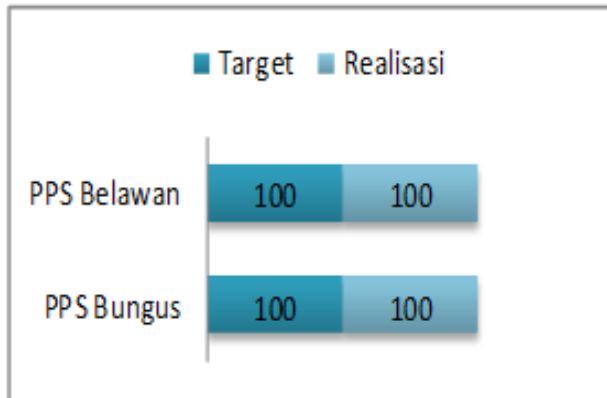
#### Target dan Realisasi

Indikator Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi merupakan perhitungan dari usulan pengusahaan baik baru ataupun perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dibandingkan dengan total jumlah usulan pengusahaan yang masuk di PPS Bungus. Realisasi indikator ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10 Capaian Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 3	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkat								
	IK 3								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	-	100	100	100	100	-	-

Realisasi capaian Indikator persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Bungus mencapai 100% dari target. Tahun 2023 ada sebanyak 28 permohonan pengusahaan baik perpanjangan maupun yang baru di PPS Bungus. Capain 100% diartikan bahwa semua jumlah permohonan (28 permohonan) pengusahaan yang masuk baik baru dan/atau perpanjangan pada tahun 2023 di PPS Bungus telah di proses, dianalisa dan/atau dievaluasi seluruhnya.



Gambar 7. Perbandingan dengan Satker Lain

Indikator persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi merupakan indikator baru pada tahun 2023, sehingga tidak dapat dilihat capaiannya dalam lima tahun terakhir dan tidak juga dapat dibandingkan dengan target dalam renstra.

Apabila dibandingkan dengan unit kerja lainnya, realisasi PPS Bungus sama besar dengan realisasi PPS Belawan. Hal ini diartikan

bahwa permohonan perusahaan di PPS Belawan tahun 2023 telah dianalisa dan/atau dievaluasi seluruhnya.

### Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor yang mendukung tercapainya keberhasilan indikator kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Bungus adalah tingginya ketersediaan peluang investasi di PPS Bungus serta ketersediaan lahan yang dapat memberikan peluang yang signifikan untuk pengolahan dan perusahaan yang lebih lanjut di dalam pelabuhan. Terkait dengan sewa lahan dan bangunan yang masih banyak kosong juga bisa menjadi permasalahan dalam pencapaian indikator ini kedepannya, sehingga untuk meningkatkan anemo stakeholder, maka tim pelayanan usaha giat dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi yang rutin dilaksanakan melalui kegiatan indeks kepuasan konsumen terkait adanya perubahan maupun informasi terbaur baik berupa keluhan maupun saran perbaikan kedepannya.

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi adalah pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan.

## Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### Anggaran

Tabel 11 Analisa Efisiensi Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi	100%	1.655.764.000	1.633.743.578	1.655.764.000	22.020.422
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				1,3%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right) = 50\% + \left(\frac{1,3\%}{20} \times 50\right)$				53,32%	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung kinerja indikator ini mencapai 98,7% dari total alokasi anggaran tahun 2023. Dengan demikian diperoleh hasil analisa efisiensi sebesar 1,3% dengan nilai efisiensi sebesar 53,32%.

### Sumber Daya Manusia

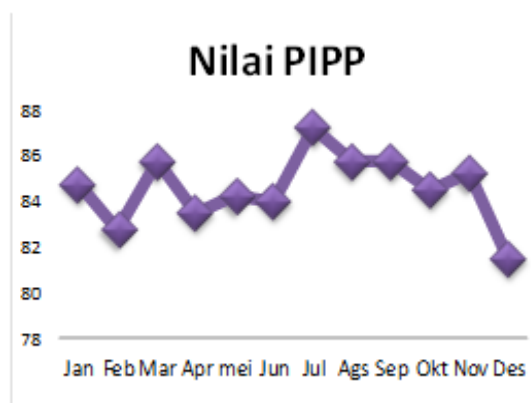
Pencapaian indikator ini didukung dengan komitmen dan sinergi tim pelayanan usaha yang di support 1 (satu) orang ketua tim kerja dengan 3 (tiga) orang pegawai terdiri dari 1 (satu) orang penelaah pengembangan usaha, 1 (satu) orang AP3T, 1 (satu) orang P3T) yang bertanggungjawab terhadap urusan pengusahaan di pelabuhan.

### Indikator Kinerja (IK) 4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan penilaian kegiatan operasional pelabuhan perikanan sesuai keputusan Dirjen No 20/2015 tentang pedoman evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Indikator tingkat operasional di UPT PPS Bungus yang memenuhi standar merupakan persentase jumlah kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan yang tersedia.

## Target dan Realisasi

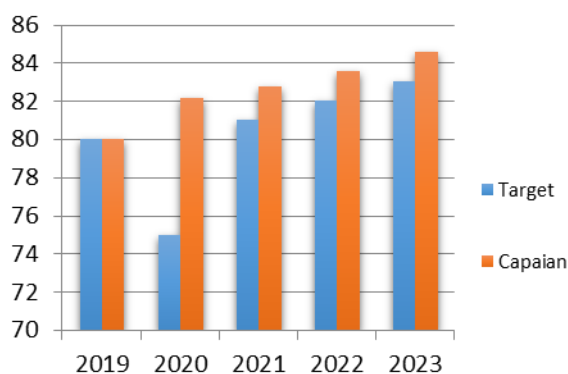
Pada gambar 8 terlihat fluktuasi capaian nilai kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus selama tahun 2023 dengan range nilai 81-87. Nilai tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan realisasi 87,25 dengan kategori sangat baik. Hal ini didukung dengan nilai frekuensi pengiriman data yang optimal. Sementara nilai terendah pada bulan Desember dengan nilai 81,5 dengan kategori baik. Penurunan nilai kinerja pelabuhan pada bulan Desember disebabkan oleh tidak adanya pelayanan SHTI sehingga terjadi penurunan nilai.



Gambar 8. Capaian Tingkat Kinerja PPS Bungus Tahun 2023

Tabel 12. Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

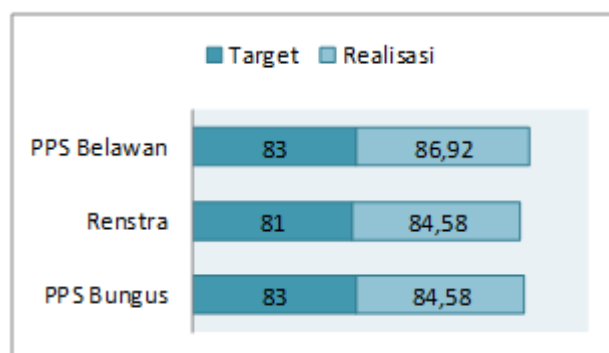
SK 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing									
IK 4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2018 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus		
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
80	82,16	82,75	83,54	84,58	83	84,58	101,9	81	84,58	



Gambar 9. Capaian PPS Bungus tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar 10 dilihat bahwa capaian tingkat kinerja PPS Bungus Tahun 2023 sudah melebihi target akhir (tahun 2024) renstra, yakni mencapai 101,9%. Apabila dibandingkan dengan satker lain, capaian PPS Belawan lebih tinggi dengan selisih 2,82% dibandingkan capaian PPS Bungus.

Capaian IK 4 tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan setiap tahun. Jika dibandingkan dengan persentase capaiannya tahun sebelumnya, maka persentase capaian tahun 2022 sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 101.9%. Terjadi penurunan sebesar 0.3% jika dibandingkan dengan target tahun 2022.



Gambar 10. Perbandingan Capaian



## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan realisasi indikator tingkat kinerja pelabuhan didukung oleh kedisiplinan tim penginput dalam melakukan penginputan data setiap bulannya, serta adanya monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan oleh pimpinan. Hal ini juga didukung dengan pembagian tugas penginputan dan monitoring yang dilakukan oleh setiap petugas dalam setiap tim kerja di OPK, TKPU, dan TU.

Dalam upaya pencapaian realisasi indikator ini masih ditemukan permasalahan berupa kriteria frekuensi pengiriman data di aplikasi PIPP yang masih belum maksimal sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan agar mencapai nilai maksimal. Namun tetap telah dilaksanakan sinergitas dalam penginputan sehingga dapat tetap tercapai meski belum maksimal.

## Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya IKU tingkat operasional pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di Pelabuhan Perikanan dalam hal pengelolaan dan operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).

## Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### Anggaran

Tabel 13. Analisa Efisiensi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	101,9%	37.000.000	33.030.300	37.704.337	4.674.037
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				<b>12,6%</b>	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left( \frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right)$		$= 50\% + \left( \frac{12,6\%}{20} \times 50 \right)$		<b>81,58%</b>	

Pencapaian IK 4 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 37.000.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir 2023 mencapai Rp 33.030.300 atau 89,3% dengan efisiensi 12,6% dan nilai efisiensi 81,58%.

## Sumber Daya Manusia

Pencapaian IKU Tingkat Operasional pelabuhan didukung oleh tim penginput PIPP yang bertugas untuk melakukan input data pada masing-masing Kriteria yang dinilai pada aplikasi PIPP, setiap kriteria pada aplikasi PIPP memiliki penanggungjawab yang bisa berasal dari kelompok kerja yang berbeda, disesuaikan dengan kriteria tersebut.

## Indikator Kinerja (IK) 5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

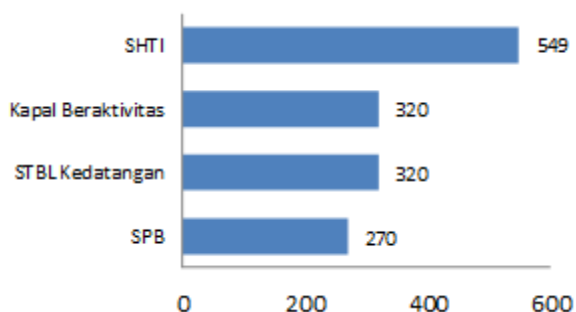
Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan indikator yang menunjukkan :

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (SPB), yaitu jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan;
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan, yaitu jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan;
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan, yaitu jumlah permintaan verifikasi SHTI dibagi dengan jumlah SHTI yang diterbitkan.

## Target dan Realisasi

Tabel 14 Capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 3		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing							
IK 5		Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	-	93,75	80	93,75	117,18	-	-

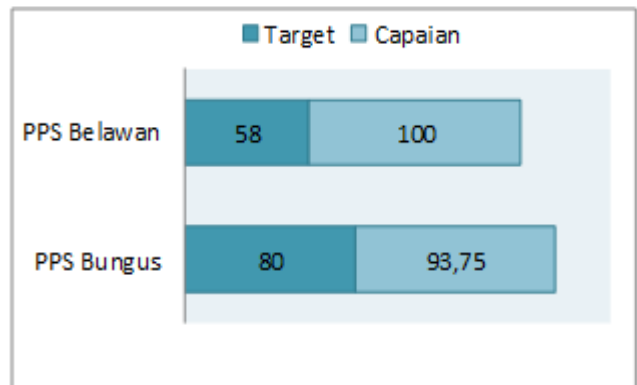


Gambar 11. Pelayanan Kesyahbandaran Tahun 2023

Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi dalam lima tahun dan juga tidak dapat dibandingkan dengan target dalam renstra. Realisasi indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2023 sebesar 93,75%.

Realisasi indikator ini tidak dapat mencapai 100% disebabkan oleh terdapat kapal yang beraktivitas di PPS Bungus yang tidak menerbitkan SPB.

Apabila dibandingkan dengan satker lain (PPS Belawan), capaian PPS Belawan lebih tinggi dengan selisih 55,2% dibanding capaian PPS Bungus untuk Tahun 2023. Tingginya selisih capaian ini disebabkan oleh target PPS Belawan yang jauh lebih kecil dibandingkan target PPS Bungus tahun. Selain dipengaruhi target, tingkat pelayanan kesyahbandaran PPS Belawan bisa mencapai 100% didukung oleh kelengkapan dokumen kapal yang beraktivitas di PPS Belawan, sehingga seluruh kapal yang beraktivitas di PPS Belawan dapat diterbitkan SPB nya.



Gambar 12. Perbandingan dengan Satker Lain

### Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator tingkat pelayanan kesyahbandaran pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di dukung dengan kinerja tim kesyahbandaran dalam menghimbau para pemilik ataupun pengurus kapal perikanan yang akan melakukan docking di kolam pelabuhan untuk mengurus dan melengkapi surat perizinan dengan lengkap. Realisasi ini juga didukung dengan adanya kesadaran pemilik kapal dalam mengajukan permohonan SPB, STBLK kedatangan kapal dan SHTI yang semakin meningkat. Sementara dalam upaya pencapaian realisasi indikator ini, yang menjadi penghambat keberhasilan adalah masih ada kapal-kapal di kolam pelabuhan yang akan Docking namun belum memiliki dokumen yang lengkap.

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tingkat pelayanan kesyahbandaran pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah pelaksanaan tata kelola dan operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

## Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### Anggaran

Tabel 15 Analisa Efisiensi Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	117,18%	299.606.000	296.165.905	351.100.781	54.934.876
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				<b>18,3%</b>	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left( \frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right) = 50\% + \left( \frac{1,3\%}{20} \times 50 \right)$				<b>95,84%</b>	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung kinerja indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mencapai 98,9% dari total alokasi anggaran Rp 299.606.000. Dengan demikian diperoleh hasil analisa efisiensi sebesar 18,3% dengan nilai efisiensi sebesar 95,84%.

### Sumber Daya Manusia

Pencapaian IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung dengan SDM di tim kerja Kesyahbandaran, ada sebanyak 8 (delapan) orang petugas syahbandar di PPS Bungus yang turut melaksanakan pelayanan kesyahbandaran dengan optimal.

### Sasaran Kinerja (SK) 4: Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal

Sasaran kinerja kelima (SS-4) yang akan dicapai adalah “Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

### Indikator Kinerja (IK) 6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi



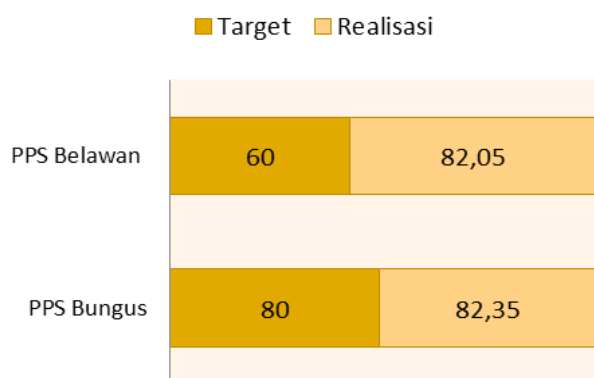
pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Realisasi indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dihitung dengan membandingkan jumlah pengembangan Fasilitas PPS Bungus dengan masterplan/draft perubahan masterplan PPS Bungus.

### Target dan Realisasi

Tabel 16 Capaian Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 4		Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal							
IK 6		Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	-	80	80	82,35	102,94	-	-

Realisasi Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar 102,94% dibandingkan dengan target tahun 2023. Hal ini berdasarkan pada jumlah fasilitas yang sudah dimanfaatkan di PPS Bungus sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah fasilitas sesuai dengan reuiu masterplan PPS Bungus tahun 2022. Beberapa fasilitas yang belum termanfaatkan di PPS Bungus sesuai dengan Masterplan 2022 antara lain pelayanan perbaikan perawatan kapal; *sport and health education*; SPBB Non subsidi, kantor karantina, IPAL, bangunan edukasi bahari.



Gambar 13. Perbandingan dengan Satker Lain

IK 6 merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target dalam rensta. Apabila dibandingkan dengan satker lain (PPS Belawan), persentase realisasi PPS Belawan lebih tinggi selisih 33,81% dibandingkan PPS Bungus. Tingginya selisih realisasi ini disebabkan oleh perbedaan target, dimana target PPS Belawan lebih rendah

dibandingkan dengan PPS Bungus. Sehingga apabila dibandingkan dari segi realisasi saja, maka PPS Bungus lebih tinggi dengan selisih 0,30 lebih tinggi dibanding PPS Belawan.

## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor pendukung keberhasilan realisasi indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh pelaksanaan pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan samudera Bungus yang telah sesuai dengan masterplan yang telah di riviui pada tahun 2022. Faktor yang dapat menjadi penghambat keberhasilan indikator ini adalah masih terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur. Meskipun adanya permasalahan dalam upaya pencapaiannya, PPS Bungus telah berupaya mengoptimalkan kegiatan pengembangan fasilitas dengan kondisi anggaran yang tersedia.

## Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di UPT Pusat untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur.

## Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### Anggaran

Tabel 17. Analisa Efisiensi Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) -RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	102,94%	667.280.000	664.757.246	686.881.350	22.124.104
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n (AARO_i \times CRO_i) - RARO_i}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				3,3%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right) = 50\% + \left(\frac{1,3\%}{20} \times 50\right)$				58,29%	

Pencapaian IK 6 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 667.280.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir 2023 mencapai Rp 664.757.246 atau 99,6% dengan efisiensi 3,3% dan nilai efisiensi 58,29%.

## Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian IK 6, didukung oleh SDM dari tim sarana prasarana sebanyak terdiri dari 2 (dua) orang AP3T, 1 (satu) orang Pengelola penataan sarana prasarana, 1 (satu) orang penelaah pengembangan usaha dan di support oleh ketua tim kerja sarana prasarana PPS Bungus

## Indikator Kinerja (IK) 7 – Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.

Penilaian pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

### Target dan Realisasi

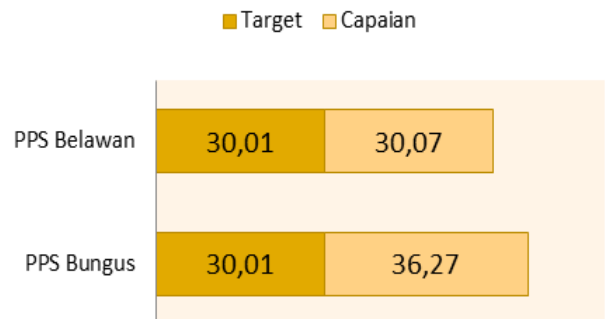
Tabel 18 Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

SK 4		Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal							
IK 7		Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2018 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	-	36,27	30,01	36,27	120,86	-	-

Capaian IK 7 sebesar 36,27 atau 120,86% dari target tahun 2023 dengan kategori “cukup”, hal ini disebabkan belum optimalnya penginputan indikator program mandatory maupun program voluntary pada aplikasi SELARASKAN sehingga nilai yang didapat belum maksimal. Indikator

Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan indikator kinerja baru tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan juga target renstra.

Jika dibandingkan dengan Satker lain (PPS Belawan), persentase capaian PPS Bungus lebih tinggi 20,66%. Hal ini disebabkan pada bulan Oktober (0,6) dan November (6,8), rendahnya penginputan yang dilakukan di PPS Belawan dibandingkan PPS Bungus.



Gambar 14. Perbandingan dengan Satker Lain

### Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Tercapainya keberhasilan capaian IK 7 didukung dengan adanya evaluasi menyeluruh. Semula belum adanya tim kerja untuk mendukung penginputan pada palikasi SELARASKAN menjadi terbentuk tim kerja yang mewakili masing-masing evidence dalam pengisian aplikasi. Masing-masing personal pada tim kerja memenuhi isian untuk program mandatory, program evidence, dan menginput hasil pada aplikasi SELARASKAN, sehingga pada triwulaln IV telah terjadi perbaikan dan nilainya bisa mencapai target.

Kondisi yang menjadi penghambat dalam pencapaian IK 7 adalah nilai yang sangat fluktuatif yang dipengaruhi oleh kriteria dan data dukung dalam aplikasi, sehingga kedepannya perlu disesuaikan dan dievaluasi kembali agar tim yang terbentuk benar-benar tim yang dapat mewakili masing-masing data dukung pada setiap kriteria yang ada.

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian adalah pelaksanaan layanan dukungan Aplikasi SELARASKAN.

## Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### Anggaran

Tabel 19 Analisa Efisiensi Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	120,86%	6.000.000	5.999.905	7.251.583	1.251.678
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				<b>20,9%</b>	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left( \frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right) = 50\% + \left( \frac{20,9\%}{20} \times 50 \right)$				<b>102,15%</b>	

Upaya pencapaian IK 7 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000 dan sampai akhir tahun 2023 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.999.905 atau 100% dengan efisiensi 20,9% dan nilai efisiensi 102,15%.

### Sumber Daya Manusia

Pencapaian IK 7 didukung oleh SDM dari tim kerja sarana prasarana pelabuhan.

### Sasaran Kinerja (SK) 5: Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran kinerja kelima (SK-5) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

#### Indikator Kinerja (IK) 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan, perikanan. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan surat kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan.



Indikator kinerja Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan merupakan jumlah dokumen kapal perikanan oleh PPS Bungus dengan formula perhitungan yaitu nilai posisi akhir jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan.

## Target dan Realisasi

Tabel 20 Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

SK 5		Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 8		Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan							
Realisasi Tahun 2018 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	376	372	50	372	744	-	-

Capaian IK 8 tahun 2023 sebanyak 372 sertifikat kelaikan atau 744% dari target tahun 2023. PPS Bungus melayani penerbitan SKKP untuk wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, Pulau Ba'i, Penerbitan SKKP dilaksanakan melalui mekanisme Reguler maupun SE (Surat Edaran). Indikator kinerja "Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan" merupakan indikator kinerja baru tahun 2023. Pada tahun sebelumnya, terdapat indikator dengan nama IK berbeda tetapi kegiatan dan formula penghitungannya sama, sehingga masih dapat dilakukan perbandingan. Jika dibandingkan, capaian tahun 2022 lebih besar selisih 330,28% dibanding capaian 2023.

Jika dibandingkan dengan satker lain (PPS Belawan), capaian PPS Belawan tahun 2023 lebih besar selisih 604% dibanding capaian PPS Bungus, dengan total capaian 674 Kapal dari target 50.

## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor pendukung tercapainya keberhasilan IK 8 antara lain 1) tingginya antusiasme pemilik kapal perikanan dalam melaporkan pengajuan pemeriksaan kaaol perikanan, sehingga realisasi untuk indikator ini tercapai dengan baik; 2) adanya dukungan anggaran yang cukup besar terkait pelaksanaan penerbitan SKKP sehingga pelaksanaan pengecekan dan pemeriksaan kapal perikanan dapat optimal.

Pada Triwulan IV ditemukan permasalahan pada aplikasi yakni, alat tangkap bagan berperahu teri yang sudah keluar sesuai dengan Permen 36 Tahun 2023 namun ternyata spesifikasi alat tangkap tersebut belum muncul di aplikasi sicefi. Hal yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan

tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Direktorat KAPI agar dapat mencari solusi terkait masalah alat tangkap bagan berperahu teri yang belum muncul pada aplikasi sicefi.

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, yaitu adanya pelaksanaan implementasi kebijakan bidang kapal perikanan. Implementasi tersebut berupa pemeriksaan kelaikan, pengukuran, pengujian, dan inspeksi kapal perikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal perikanan yang akan diterbitkan dokumennya memenuhi standar keamanan dan kelayakan yang ditetapkan.

### Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### Anggaran

Tabel 21 Analisa Efisiensi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	744%	350.000.000	345.600.448	2.604.000.000	2.258.399.552
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				<b>645,3%</b>	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right) = 50\% + \left(\frac{645,3\%}{20} \times 50\right)$				<b>1.663,14%</b>	

Pencapaian IK 8 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 350.000.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir 2023 mencapai Rp 345.600.448 atau 98,7% dengan efisiensi 645,3% dan nilai efisiensi 1.663,14%.

#### Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IKU ini, ditetapkan petugas Kelaikan Kapal sebanyak 9 (sembilan) orang pegawai yang telah menerima Diklat petugas kelaikan kapal Perikanan. Sembilan petugas tersebut berasal dari jabatan dan tupoksi yang berbeda-beda sehingga adanya rangkap tugas.

## **Sasaran Kinerja (SK) 6: Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus**

Sasaran Kinerja keenam (SK-6) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

### **Indikator Kinerja (IK) 9 – Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut yaitu melalui pengendalian usaha subsektor penangkapan ikan dan usaha subsektor pengangkutan ikan, khususnya tata kelola Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan Kapal Perikanan agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi sumber daya ikan. Kapal Perikanan sebagai sarana produksi memiliki dua elemen, yakni elemen fisik dan elemen personel. Untuk elemen fisik, Kapal Perikanan harus memenuhi aspek laik laut, laik tangkap, dan laik simpan. Pemenuhan aspek kelaikan elemen fisik kapal perikanan dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan kegiatan operasional Kapal Perikanan. Sementara untuk elemen personel, kapal perikanan harus memenuhi aspek kelaikan pengawakan kapal perikanan, baik dari segi kesejahteraan, kompetensi, disiplin, maupun penempatan/susunan jabatan awak kapal perikanan di Kapal Perikanan. Hal ini dimaksud untuk menjamin dan memastikan keselamatan pelayanan, perlindungan kerja bagi Awak kapal Perikanan, serta keberhasilan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

Kegiatan pemenuhan kompetensi kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan bagi awak kapal perikanan, selain dilaksanakan melalui diklat, dapat juga dilaksanakan melalui bimbingan teknis dengan dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan Pasal 146 sampai dengan pasal 149. Pada tahun 2023 pelaksanaan IK Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan

sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Metode penghitungan IK 9 dengan membandingkan jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-Pkl/PKL dan sudah tersertifikasi dibagi jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL/PKL.

## Target dan Realisasi

Tabel 22 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

SK 6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan								
Realisasi Tahun 2018 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	-	30,36	30	30,36	101,2	-	-

Capaian IK 9 yakni 30,36 atau 101,2% dari target Tahun 2023. Pada tahun 2023, PPS Bungus telah menerbitkan 224 (dua ratus dua puluh empat) PKL bagi awak Kapal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 68 awak kapal yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) nahkoda, 34 (tiga puluh empat) KKM sudah tersertifikasi. Indikator kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/ Awak Kapal Perikanan merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra. Namun apabila dibandingkan dengan satker lain (PPS Belawan), capaian PPS Bungus lebih kecil selisih 15,13%, dimana capaian PPS Belawan sebesar 34,9%. Selisih ini disebabkan oleh jumlah nalyan yang sudah PKL dan Tersertifikasi di PPS Belawan lebih besar.

## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor yang mendukung capaian IK 9 antara 1) adanya kesadaran para awak kapal perikanan dan pemilik kapal perikanan dalam meningkatkan kompetensi, perlindungan (asuransi jiwa) dan melaksanakan PKL yang sudah meningkat; 2) terus melaksanakan sosialisasi dan pendekatan secara langsung kepada awak kapal perikanan dan pemilik kapal perikanan agar selalu meningkatkan kompetensi awak kapal, perlindungan (asuransi jiwa) untuk awak kapal dan melaksanakan PKL.

Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian IK 9 adalah belum semua awak kapal perikanan memiliki sertifikat kompetensi seperti *Basic Safety Training (BST)*, *BST-F*, Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN), SKN Teknik, ANKAPIN dan ATKAPIN. Untuk meminimalisir kendala tersebut

maka direkomendasikan upaya berupa pelaksanaan pelatihan kompetensi bagi awak kapal perikanan seperti pada contoh dimaksud.

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan adalah Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan.

### Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### Anggaran

Tabel 23 Analisa Efisiensi Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	101,2%	13.000.000	11.903.000	13.156.000	1.253.000
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n(AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				9,6%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right) = 50\% + \left(\frac{9,6\%}{20} \times 50\right)$				74,1%	

Pencapaian IK 9 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.000.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir 2023 mencapai Rp 11.903.000 atau 91,6% dengan efisiensi 9,6% dan nilai efisiensi 74,1%.

#### Sumber Daya Manusia

Upaya pencapaian IKU ini dilaksanakan oleh 12 (dua belas) tim kerja kesyahbandaran pelabuhan yang terdiri dari 1 (satu) orang P3T Muda, 3 (tiga) pengelola syahbandar, 1 (satu) analis kesyahbandaran, (empat) analis kesyahbandaran, 2 (dua) orang P3T Pertama, dan 1 (satu) orang AP3T.



## Sasaran Kinerja (SK) 7: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kinerja ketujuh (SK-7) yang akan dicapai adalah “Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan pelabuhan perikanan samudera bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

### Indikator Kinerja (IK) 10 – Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK  $\geq 45,10$ . IKU Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPS Bungus.

#### Target dan Realisasi

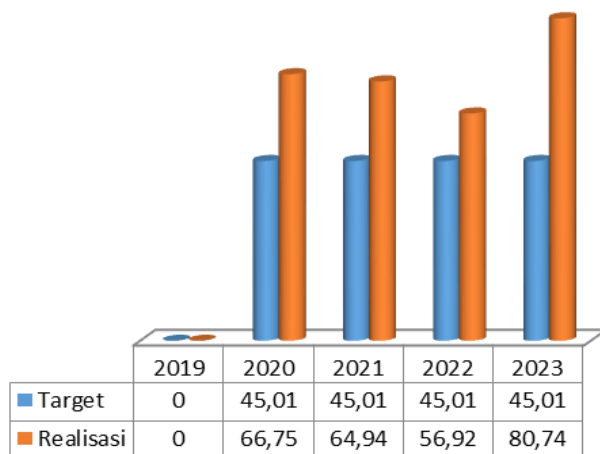
Tabel 24 Capaian Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPS Bungus

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 10		Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan							
Realisasi Tahun 2018 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	66,75	64,94	56,92	80,74	45,01	80,74	179,02	85	80,74

<b>A. PENGUNGKIT</b>		<b>60,00</b>	<b>44,90</b>	
<b>I. PEMENUHAN</b>		<b>30,00</b>	<b>21,68</b>	<b>72,27%</b>
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	1,69	42,22%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3,50	1,77	50,43%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	5,00	3,98	79,50%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	5,00	100,00%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	5,64	75,16%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	3,61	72,28%
<b>II. REFORM</b>		<b>30,00</b>	<b>23,22</b>	<b>77,39%</b>
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	3,00	75,00%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3,50	0,50	14,29%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	5,00	5,00	100,00%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	4,51	90,10%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	6,88	91,67%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	3,34	66,75%
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>		<b>44,90</b>	<b>74,83%</b>	
<b>B. HASIL</b>		<b>40,00</b>	<b>35,84</b>	
<b>I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL</b>		<b>22,50</b>	<b>19,21</b>	<b>85,39%</b>
	a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50	16,71	95,50%
	b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	2,50	50,00%
<b>II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA</b>		<b>17,50</b>	<b>16,63</b>	<b>95,00%</b>
	a Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50	16,63	95,00%
<b>TOTAL HASIL</b>		<b>35,84</b>	<b>89,59%</b>	
<b>NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI</b>		<b>80,74</b>		

Gambar 15. Hasil Penilaian LKE WBK PPS Bungus

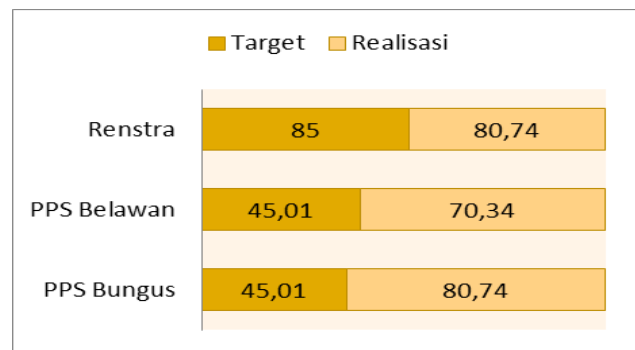
Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPS Bungus tahun 2023 adalah sebesar 80,74 atau 179,02% dari target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini diperoleh dari hasil asistensi bersama dengan tim Ortala DJPT. Penilaian berdasarkan LKE yang terdiri dari komponen Pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%) dengan rincian seperti pada gambar 15.



**Gambar 16. Capaian PPS Bungus Tahun 2019-2023**

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), capaian tahun 2023 sudah mencapai 94,98%. Jika dibandingkan dengan Satker lain (PPS Belawan), capaian PPS Bungus lebih tinggi 23,11% dimana capaian dari PPS Belawan sebesar 70,34 atau 156,28% dari target yang telah ditetapkan.

Indikator Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan merupakan IK yang muncul sejak tahun 2020. Sejak 2020, PPS Bungus masih dalam pembangunan menuju WBK, sehingga target tahunan tetap, yakni 45,01 sampai tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, pada tahun 2023 terdapat peningkatan nilai sebesar 52,92% sementara apabila dibandingkan dengan tahun 2022, peningkatannya sebesar 35,1%.



**Gambar 17. Perbandingan Capaian**

### Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dari kegiatan ini didukung dengan, 1) terlaksananya asistensi WBK yang dilakukan bersama dengan tim ortala DJPT, sehingga diperoleh hasil penilaian mandiri bersama tim asistensi; 2) adanya sinergitas antara seluruh bagian dalam upaya pelaksanaan kegiatan dan pelengkapan seluruh dokumen sesuai ketentuan; 3) adanya tim yang bekerja dengan efektif dan sesuai SOP yang telah ditetapkan, sehingga sebagian besar rekomendasi yang diberikan oleh tim asistensi dari Ortala DJPT dapat terselesaikan dengan baik.

Faktor yang menyebabkan kegagalan/kendala dalam pencapaian IK 10 adalah masih belum adanya inovasi yang dapat diterapkan di PPS Bungus. Sehingga untuk meminimalisir kendala tersebut, direkomendasikan upaya menciptakan inovasi baik base on aplikasi maupun non aplikasi untuk tahun 2024 di PPS Bungus.

## Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah adanya kegiatan persiapan penetapan zona integritas menuju WBK serta pelaksanaan evaluasi dan penetapan organisasi di Lingkungan KKP. Kegiatan persiapan penetapan zona integritas dilaksanakan dalam pada kegiatan pemenuhan dokumen WBK, penguatan komitmen bersama pembangunan zona integritas PPS Bungus. Serta adanya pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Zona Integritas.

## Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### Anggaran

Tabel 25 Analisa Efisiensi Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan	179,02%	209.468.000	184.439.675	374.998.810	190.559.135
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n(AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				<b>91%</b>	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right) = 50\% + \left(\frac{91\%}{20} \times 50\right)$				<b>277,43%</b>	

Pencapaian IK 10 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 209.468.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir 2023 mencapai Rp 184.439.675 atau 91% dengan efisiensi 91% dan nilai efisiensi 277,43%.

### Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 10, Kepala Pelabuhan membentuk tim pendukung yang terdiri dari 35 Pegawai PPS Bungus, baik PNS maupun Pramubakti. Penggunaan SDM ini sudah cukup efisien karena semua pegawai yang melaksanakan tugas pemenuhan dokumen WBK melakukan rangkap pekerjaan diluar tupoksi masing-masing.

## Indikator Kinerja (IK) 11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada audit, reuiu, dan evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV 2022 s.d. triwulan IV tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Formula penghitungan yaitu persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diberikan.

### Target dan Realisasi

Tabel 26 Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” Tahun 2023

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2018 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	-	92	75	92	122,67	-	-

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2023 yaitu 92% atau 122,67% dari target yang ditetapkan. Jumlah rekomendasi PPS Bungus Tahun 2023 sebanyak 66 (enam puluh enam) rekomendasi dengan rincian, 61 rekom tuntas, 4 rekom masih proses, dan 1 rekom pending. Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan IK baru pada tahun 2023 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu dan target renstra. Jika dibandingkan dengan satker lain (PPS Belawan), capaian PPS Bungus lebih kecil dengan selisih 9,33%. Hal ini disebabkan karena masih terdapat 5 rekomendasi yang belum tuntas ditindaklanjuti sampai triwulan IV tahun 2023.

### Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor penyebab keberhasilan IK 11 adalah dengan 1) membentuk tim kerja guna dapat melakukan BAP terhadap stakeholder yang belum melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan; 2) membentuk tim inventarisasi BMN guna melakukan inventarisasi dan mengetahui BMN yang sudah dilakukan sensus dan belum; dan 3) tim yang bekerja dengan efektif dan sesuai

SOP yang telah ditetapkan sehingga sebagian besar rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dapat terselesaikan dengan baik.

Kegagalan/kendala yang menghambat pencapaian IK 11 adalah masih terdapat beberapa hasil rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP yang masih berstatus Pending dan Proses, maka akan diupayakan rekomendasi untuk melakukan percepatan dalam penyelesaian hasil rekomendasi tersebut.

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian ini adalah dengan pembentukan tim-tim bersinergi dan adanya pemenuhan dokumen tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan adalah kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini.

### Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### Anggaran

Tabel 27 Analisa Efisiensi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	122,67	0	0	0	0
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				-	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right) = 50\% + \left(\frac{-}{20} \times 50\right)$				-	

Dalam upaya pencapaian IK 11 tidak ada alokasi anggaran secara khusus untuk mendukung kegiatan ini, sehingga tidak dapat dihitung efisiensi dan nilai efisiensinya.

#### Sumber Daya Manusia

Dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Itjen KKP, Kasubag umum didukung SDM dari bagian keuangan, BMN dan tim dari Tata Kelola Sarana Prasarana yang bersinergi menindaklanjuti dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.



## Indikator Kinerja (IK) 12 – Nilai Rekonsiliasi Kinerja PPS Bungus

Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan turunan dari Indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan merupakan penilaian Kementerian PAN & RB atas akuntabilitas kinerja KKP. Rekonsiliasi kinerja adalah proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pengelola kinerja, menjadi sasaran bersama untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja, serta sebagai sarana pendampingan untuk mengawal SAKIP yang lebih baik. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sarana/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Terdapat 4 (empat) aspek penilaian rekonsiliasi kinerja, yakni aspek kepatuhan (bobot 25%), aspek kesesuaian (bobot 25%), aspek ketercapaian (bobot 30%), dan aspek ketepatan (bobot 20%). Nilai rekonsiliasi kinerja PPS Bungus diukur dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di PPS bungus yang di hitung menggunakan kertas kerja rekonsiliasi yang sesuai ketentuan.

### Target dan Realisasi

Tabel 28 Capaian Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7 Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
IK 12 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2018 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	-	95,34	93	95,34	102,52	-	-

Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar 95,34 atau 102,52% dari target tahun 2023. Nilai capaian tersebut diperoleh dari pengisian lembar kerja rekonsiliasi tahun 2023 pada kegiatan rekonsiliasi kinerja yang dilaksanakan bersama Es.I DJPT. Adapun rincian aspek penilaian yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 29.

Tabel 29. Aspek Penilaian Lembar Kerja Rekonsiliasi

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	Kepatuhan	Kesesuaian	Ketercapaian	Ketepatan
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per Aspek	100	100	113,37	85
Skor dikali Bobot	25	25	28,34	17
<b>Total Skor</b>	<b>95,34</b>			

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dan target akhir Renstra. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPS Belawan), capaian PPS Bungus lebih rendah 1,73% dibanding dengan capaian PPS Belawan sebesar 96,95 atau 104,25%. Hal ini didukung dengan nilai aspek kepatuhan PPS Belawan yang jauh lebih tinggi 3 skor dibanding PPS Bungus.

### Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor keberhasilan IK Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah 1) adanya sinergi antara tim pengelola AKIP dalam melakukan pelaporan kinerja dan pemantauan kinerja, sehingga tercapai aspek kepatuhan pelaporan, kesesuaian aspek antara data dan informasi yang dilaporkan, serta tercapainya target yang telah ditetapkan; 2) Adanya kegiatan perencanaan, pelaksanaan kinerja; dan 3) pelaporan AKIP yang dilaksanakan oleh tim pengelola kinerja secara bersinergi dengan tim teknis pelabuhan.

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IK 12 adalah Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

### Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### Anggaran

Tabel 30 Analisa Efisiensi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	102,52%	83.109.000	82.522.996	85.200.130	2.677.134
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				3,2%-	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left( \frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right) = 50\% + \left( \frac{-3,2}{20} \times 50 \right)$				58,05%	

Pencapaian IK 12 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 83.109.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir tahun 2023 mencapai Rp 82.522.996 atau 99,3% dengan efisiensi 3,2% dan nilai efisiensi 58,05%.

## Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini tergabung dalam Tim Pengelola Kinerja PPS Bungus yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dari tim kerja. Selain tim pengelola kinerja pelabuhan, SDM yang turut berperan adalah pegawai yang tergabung dalam tim PM SAKIP Pelabuhan yang terdiri dari 6 (enam) orang. SDM yang tergabung dalam tim ini merupakan pegawai yang diberikan tugas tambahan, karena memang tidak sesuai dengan tupoksinya.

## Indikator Kinerja (IK) 13 – Indeks Profesionalitas ASN di PPS Samudera Bungus

IKU ini adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas diukur menggunakan standar profesionalitas ASN yang terdiri dari empat dimensi, yaitu:

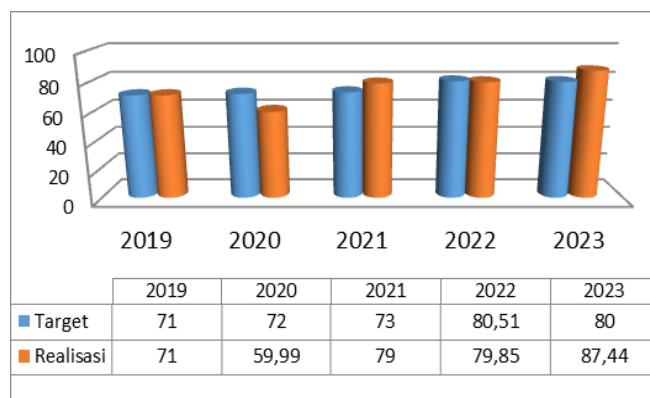
- 1) **Kualifikasi**, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
- 2) **Kompetensi**, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis);
- 3) **Kinerja**, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
- 4) **Disiplin**, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

## Target dan Realisasi

Tabel 31 Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 13		Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2018 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
71	59,99	80,51	79,85	87,44	80	87,44	109,3	72	87,44

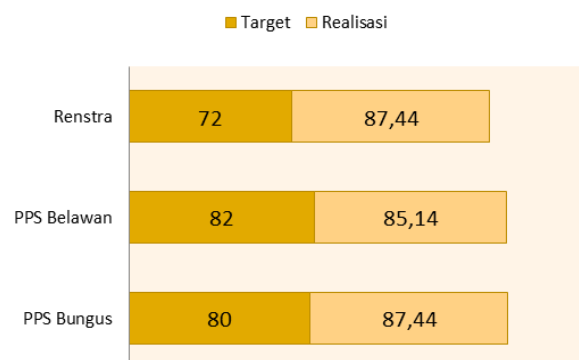
Capaian Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar 87,44 atau 109,3% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini tercapai disebabkan oleh adanya perubahan komposisi penghitungan nilai IP ASN pegawai dari biro SDMAO KKP, sehingga ada peningkatan nilai maksimal bagi pegawai-pegawai dengan pendidikan SMA, SMP, dan SD. Perubahan tersebut turut menaikkan nilai IP ASN PPS Bungus secara keseluruhan karena



Gambar 19. Capaian PPS Bungus Tahun 2019 - 2023

meningkat 1,08% jika dibanding dengan capaian tahun 2021. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan targetakhir renstra (2024) capaian 2023 sudah mencapai 121,44%. Jika dibandingkan dengan satker lain (PPS Belawan), capaian PPS Bungus lebih tinggi dengan selisih 5,47% dimana capaian PPS Belawan adalah 85,14 atau 103,83% dari target tahun 2023.

Pada gambar 21 terlihat bahwa capaian dan target IP ASN PPS Bungus dalam 5 (lima) tahun terakhir cukup beragam, pada tahun 2020 dan 2022 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian tahun 2023 meningkat sebesar 10,12% dan



Gambar 18. Perbandingan Capaian

## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Beberapa usaha yang telah dilakukan untuk mencapai IK 13 adalah dengan 1) memberikan kesempatan ASN untuk menempatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Webinar/Seminar

/Workshop /Magang/Sejenis; 2) memberikan himbauan dari bagian kepegawaian terkait pengembangan kompetensi pegawai, khususnya himbauan bagi pegawai yang belum mencapai 20 JP; 3) partisipasi aktif dari seluruh pegawai untuk mengikuti diklat/seminar/pelatihan guna meningkatkan kompetensi pegawai. Sementara itu, faktor yang dapat menghambat tercapainya indikator ini adalah kurangnya antusiasme pegawai dalam mengikuti pelatihan secara daring, sehingga beberapa pegawai masih belum mencapai kumulatif 20JP. Dalam upaya mendorong antusiasme pegawai, maka dilakukan pembinaan dan himbauan melalui apel pagi kepada pegawai, agar mengikuti pelatihan yang tersedia tidak hanya offline tetapi terutama daring, khususnya yang tersedia di e-learning KKP.

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IK 13 adalah perencanaan, pengembangan dan pembinaan Disiplin Pegawai. Selain itu kegiatan monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui seminar, diklat, maupun bimbingan teknis baik secara online maupun offline. Kegiatan unit kerja yang menunjang adalah adanya sosialisasi pada semester I tahun 2023 terkait kinerja dan kode etik pegawai, serta peningkatan etos kerja di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

### Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### Anggaran

Tabel 32 Analisa Efisiensi Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	109,3%	52.000.000	48.119.943	56.836.000	8.716.057
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				16,8%-	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right) = 50\% + \left(\frac{-3,2}{20} \times 50\right)$				91,90%	

Pencapaian IK 12 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.000.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir tahun 2023 mencapai Rp 48.119.943 atau 92,5% dengan efisiensi 16,8% dan nilai efisiensi 91,90%.



## Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja IP ASN, PPS Bungus didukung oleh seluruh pegawai yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang PNS, yang mana setiap pegawai dihimbau untuk dapat mengikuti berbagai macam pelatihan sesuai dengan jenis jabatannya sehingga dapat menunjang nilai IP ASN dari dimensi diklat 20 JP.

## Indikator Kinerja (IK) 14 – Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

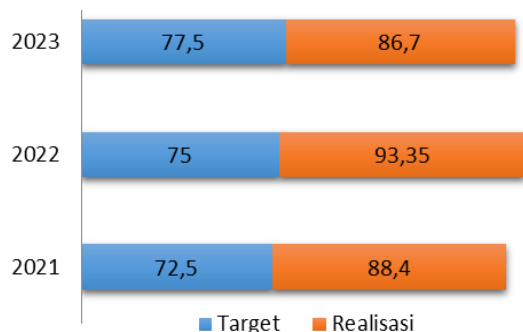
Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

## Target dan Realisasi

Tabel 33 Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 14		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2018 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	88,4	93,35	86,70	77,5	86,70	111,87	72,5	86,70



**Gambar 20.**  
Capaian PPS Bungus Tahun 2019-2023

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2023 sebesar 86,70 atau 111,87% dari target yang telah ditentukan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12,6% dan mengalami penurunan juga dibanding capaian tahun 2021. Hal

ini disebabkan karena pada tahun 2023 tidak terdapat tender sehingga tidak tersedia paket pengadaan dalam aplikasi SIRUP yang mengakibatkan indikator ini mendapat nilai 0 dan mempengaruhi nilai keseluruhan.

Jika di bandingkan dengan target akhir (2024) renstra, capaian PPS Bungus sudah mencapai 119,58%. Jika dibandingkan dengan satker lain (PPS Belawan), capaian PPS Bungus lebih kecil 6,5% dimana capaian PPS Belawan sebesar 91,74 atau 118,37%.

### Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian IK 14 didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa (PBJ) yang dilaksanakan sesuai ketentuan. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dengan turut serta melengkapi dokumen pengadaan yang sesuai.

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian adalah dengan adanya honorium pejabat pengadaan barang/Jasa guna pelaksanaan kegiatan (PBJ) yang dilakukan oleh pejabat pengadaan.

### Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### Anggaran

Tabel 34 Analisa Efisiensi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) -RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	111,87%	8.160.000	8.160.000	9.128.671	968.671
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n(AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				<b>11,9%</b>	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right) = 50\% + \left(\frac{-3,2}{20} \times 50\right)$				<b>79,68%</b>	

Pencapaian IK 14 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.160.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir tahun 2023 mencapai Rp 8.160.000 atau 100% dengan efisiensi 11,9% dan nilai efisiensi 79,68%.

## Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh lima orang tim pengadaan, yang terdiri dari satu pejabat pengadaan dan empat orang panitia pengadaan yang mendapatkan penugasan tambahan dari atasan, karena bukan berasal dari jabatan pengelola PBJ.

## Indikator Kinerja (IK) 15 – Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

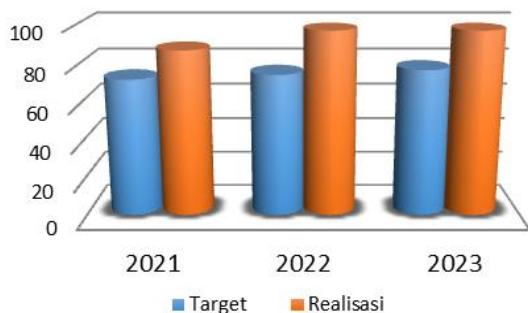
Merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2019-2022 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

## Target dan Realisasi

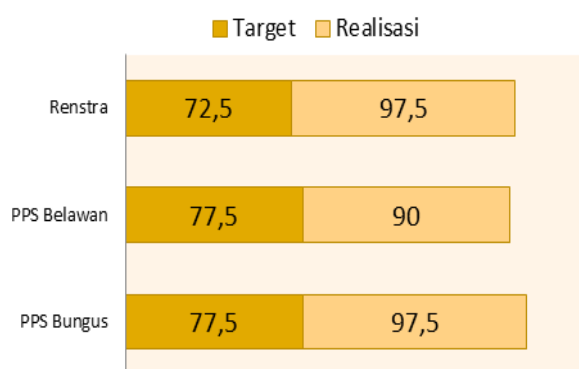
Tabel 35 Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 15		Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2018 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	87,5	97,5	97,5	77,5	97,5	125,81	72,5	97,5



Gambar 21.  
Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2023

Capaian IK 15 tahun 2023 sebesar 97,5% atau 125,81% dibanding target tahunan. Capaian 2023 menurun 4,91% dibanding persentase capaian 2022, namun mengalami peningkatan 5,12% jika dibanding persentase capaian tahun 2021. Capaian 2023 disebabkan oleh terpenuhinya kelengkapan dokumen



Gambar 22. Perbandingan Capaian

BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Jika dibandingkan dengan target akhir (2024) Renstra, capaian tahun 2023 mencapai 132,48%. Jika dibandingkan dengan satker lain (PPS Belawan), capaian PPS Bungus lebih besar 9,68% dimana capaian PPS Belawan adalah 90% atau 116,13% jika dibandingkan dengan target tahun 2023.

### Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian IK 15 didukung oleh pembentukan tim pengelola BMN di PPS Bungus dan melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan. Tim petugas pengelola BMN telah memaksimalkan pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN tahun 2023. Belanja Modal yang dilakukan pada triwulan IV tahun 2023 sudah dilengkapi dengan Berita Acara Serat Terima (BAST).

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IK 15 yaitu: pelaporan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan honorium pengurus/penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang.

### Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### Anggaran

Tabel 36 Analisa Efisiensi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	125,81%	99.131.000	98.941.884	124.713.194	25.771.310
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n(AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				26%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right) = 50\% + \left(\frac{26}{20} \times 50\right)$				114,99%	

Pencapaian IK 15 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 99.131.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir tahun 2023 mencapai Rp 98.941.884 atau 99,89% dengan efisiensi 26% dan nilai efisiensi 114,99%.

### Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini ada sebanyak 3 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang PNS dengan jabatan pengelola BMN dan 2 (dua) orang PPPK dengan jabatan Pranata Komputer, dimana mereka ditugaskan di bagian pengelolaan Barang Milik Negara.

### Indikator Kinerja (IK) 16 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

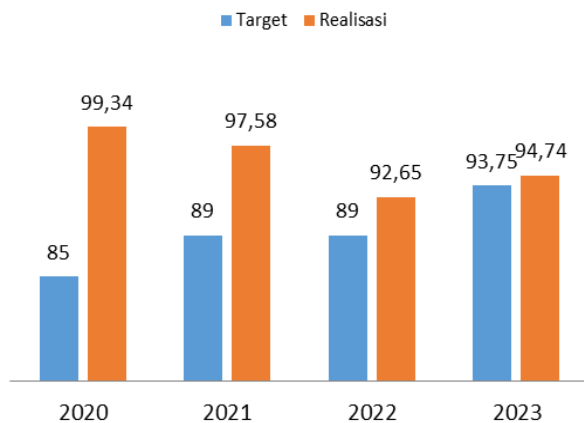
Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKAKL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator kinerja Nilai IKPA merupakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang diperoleh dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara / Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

### Target dan Realisasi

Tabel 37 Capaian Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 16		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2018 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	99,34	97,58	92,65	94,74	82	94,74	101,06	89	94,74



**Gambar 23. Capaian PPS Bungus Tahun 2020-2023**

Capaian IK Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2023 sebesar 94,74 atau sebesar 101,06%. Realisasi capaian PPS Bungus mengalami tren turun sejak tahun 2020 – 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, persentase capaian tahun 2023 menurun 3,05% dan turun sebesar 8,58% jika dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2021. Hal ini disebabkan karena target IK Nilai IKPA

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus juga mengalami tren naik.

Jika dibandingkan dengan target akhir (2024) Renstra, capaian PPS Bungus tahun 2023 telah mencapai 106,45%. Apabila dibandingkan dengan satker lain (PPS Belawan), capaian PPS Bungus lebih tinggi sebesar 2,46% dimana capaian PPS Belawan adalah 92,43 atau 98,59%, hal ini disebabkan oleh penyerapan anggaran dan deviasi Halaman III DIPA PPS Bungus lebih tinggi dibandingkan dengan PPS Belawan.



**Gambar 24. Perbandingan Capaian**

### Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan anggaran PPS Bungus Tahun 2023 adalah dengan menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu; ketepatan waktu revolving UP; ketepatan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari return SP2D, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai.

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IK 16 adalah pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Beberapa usaha yang dilakukan pada semester I yaitu melakukan revisi halaman III DIPA, penyampaian data kontrak ke KPPN tepat waktu; ketepatan waktu revolving UP; ketepatan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran dan



Penerimaan, meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari return SP2D, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai, serta melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran.

## Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### Anggaran

Tabel 38 Analisa Efisiensi Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	101,06%	166.631.000	163.225.559	168.390.623	5.165.064
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				3,1%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right) = 50\% + \left(\frac{3,1}{20} \times 50\right)$				57,75%	

Pencapaian IK 16 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 166.631.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir tahun 2023 mencapai Rp 163.225.559 atau 98% dengan efisiensi 3,1% dan nilai efisiensi 57,75%.

### Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, didukung 6 (enam) orang pegawai yang terdiri dari 2 (dua) orang pengelola keuangan, 1 (satu) orang analis keuangan, 1 (satu) orang Pranata Keuangan APBN Terampil, 1 (satu) orang Analis Pengelola Keuangan APBN Muda, dan 1 (satu) orang Analis Pengelola Keuangan APBN Madya.

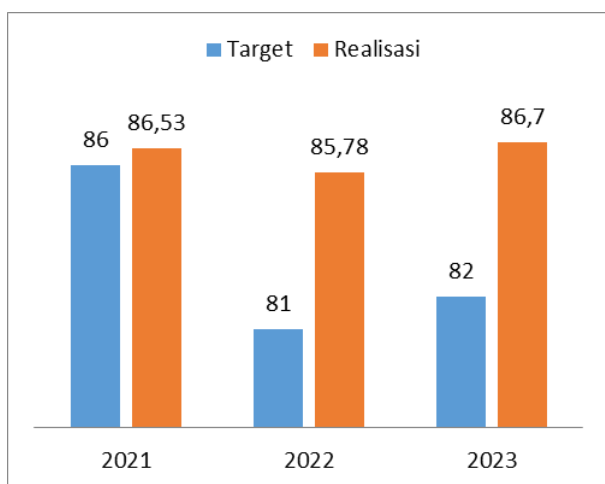
### Indikator Kinerja (IK) 17 – Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Kinerja anggaran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA.

## Target dan Realisasi

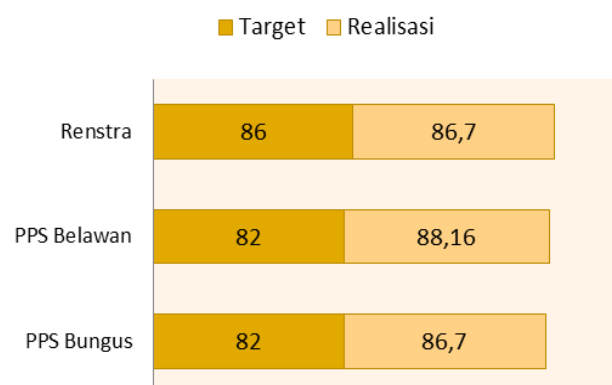
Tabel 39 Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 17		Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2018 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	86,53	85,78	86,70	82	88,36	107,76	86	88,36



Gambar 25. Capaian PPS Bungus Tahun 2021 - 2023

cukup signifikan, hal ini disebabkan pada tahun 2021, upaya pencapaian realisasi dengan target 86 sangat sulit, sehingga dilakukan penyesuaian target pada tahun 2022 dan 2023.



Gambar 26. Perbandingan Capaian

Capaian PPS Bungus pada tahun 2023 sebesar 88,36 atau 107,76% jika dibanding target yang telah ditentukan. Jika dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2022, capaian 2023 mengalami penurunan sebesar 0,17% dan mengalami kenaikan 5,12% jika dibanding dengan capaian tahun 2021. Target IK Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan pada tahun 2021, upaya pencapaian realisasi dengan target 86 sangat sulit, sehingga dilakukan penyesuaian target pada tahun 2022 dan 2023.

Jika dibandingkan dengan target akhir (2024) Renstra, capaian tahun 2023 telah mencapai 100,81%. Jika dibandingkan dengan satker lain (PPS Belawan), capaian PPS Bungus lebih kecil 1,78% dimana capaian PPS Belawan sebesar 88,16 atau 107,51% dari target yang telah ditentukan.

## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Adanya sinergitas tim pengelola anggaran dan petugas pelaporan online menjadi faktor yang mendukung keberhasilan indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Kegiatan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI dilakukan secara rutin setiap awal bulan. Kegiatan sinkronisasi data capaian output juga dilaksanakan antara keuangan dan tim teknis.

## Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IK adalah pelaksanaan pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

## Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### Anggaran

Tabel 40 Analisa Efisiensi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	107,76%	91.931.000	91.741.884	99.061.258	7.319.374
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				<b>8%</b>	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right) = 50\% + \left( \frac{8}{20} \times 50 \right)$				<b>69,9%</b>	

Pencapaian IK 17 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 91.931.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir tahun 2023 mencapai Rp 91.741.884 atau 99,8% dengan efisiensi 8% dan nilai efisiensi 69,9%.

### Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja nilai kinerja anggaran PPS Bungus, didukung oleh 2 (dua) orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang APK APBN Muda yang melakukan inputing realisasi capaian output di Aplikasi SAKTI, dan 1 (satu) orang analis kepegawaian yang mendapatkan penugasan sebagai operator SMART DJA.

## Indikator Kinerja (IK) 18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

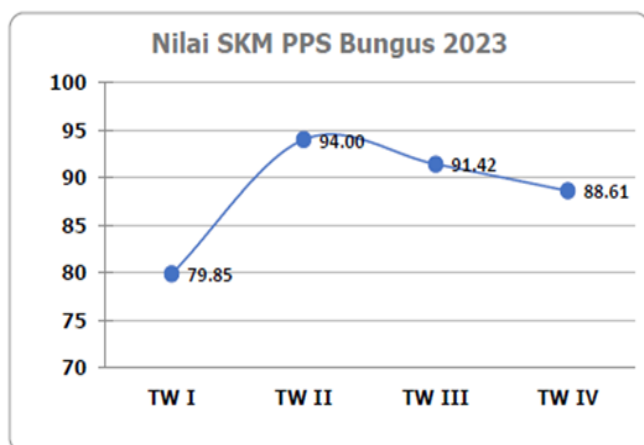
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian,

U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/ Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/ Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

## Target dan Realisasi

Tabel 41 Capaian Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 17		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera							
Realisasi Tahun 2018 - 2023					Target dan Realisasi 2023			Renstra PPS Bungus	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	-	88,61	88,21	88,61	100,45	-	-



Gambar 27. Capaian Nilai SKM PPS Bungus Tahun 2023

Capaian IK Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera sebesar 88,61 atau 100,45% dari target yang telah ditentukan. Pada gambar 29, dapat dilihat tren nilai SKM dalam empat triwulan (Tahun 2023). IK 17 merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra. Jika dibandingkan dengan sakter lain (PPS

Belawan), capaian PPS Bungus lebih besar 4,51% dimana capaian PPS Belawan sebesar 88,21 atau 95,94% dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.

## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera antara lain melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pengguna jasa yang mengisi survey. Dalam pelaksanaan survey, belum terbentuk tim kerja khusus yang terkait pelaksanaan SKM di PPS Bungus, sehingga di usulkan untuk membentuk tim kerja pelaksana SKM di PPS Bungus pada tahun 2024.

## Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan adalah kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan dan KPI.

## Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### Anggaran

Tabel 42 Analisa Efisiensi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera	100,45%	15.570.000	13.840.000	15.640.604	1.800.604
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\% = \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				<b>11,6%</b>	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right) = 50\% + \left(\frac{8}{20} \times 50\right)$				<b>78,91%</b>	

Pencapaian IK 18 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.570.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir tahun 2023 mencapai Rp 13.840.000 atau 89,8% dengan efisiensi 11,6% dan nilai efisiensi 78,91%.

### Sumber Daya Manusia

Pencapaian IK Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera didukung oleh tim kerja dukungan manajerial, tim kerja operasional pelayanan usaha, tim kerja kesyahbandara, dan tim kerja pelayanan usaha, dan tim kerja sarana prasarana karena masing-masing tim kerja tersebut yang memberikan pelayanan kepada stakeholder dan pengguna jasa.

# Akuntabilitas Keuangan

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 16.305.580.000,- sesuai dengan DIPA PPS Bungus Tangkap TA. 2022 Nomor: SP DIPA-032.03.2.531488/2023 tanggal 30 November 2022, alokasi anggaran tersebut untuk 5 (lima) kegiatan yakni :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan perizinan dan Kenelayanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan.

Realisasi anggaran sampai Triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar Rp. 16.193.492.155,- atau sebesar 99,31 persen dari pagu sebesar Rp. 16.305.580.000,-.

Tabel 43. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2023

	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2023 (Rp.)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>		<b>3.696.266.000,-</b>	<b>3.662.695.777,-</b>	<b>99,09%</b>
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	376.400.000,-	370.879.698,-	98,53%
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3.161.616.000,-	3.134.987.546,-	99,16%
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000,-	4.000.000,-	100%
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	154.250.000,-	152.828.533,-	99,08%
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>12.609.314.000,-</b>		
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.609.314.000,-	12.530.796.378,-	99,38%





# **BAB IV**

## **STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN**

# Organisasi dan Tata Kerja PPS Bungus

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, pemantauan, kesyahbandaran, dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pengusahaan sebagai berikut:

<b>Fungsi Pemerintahan</b>	<b>Fungsi Pengusahaan</b>
1. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;	1. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
2. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;	2. Pelayanan bongkar muat ikan;
3. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;	3. Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
4. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;	4. Pemasaran dan distribusi ikan;
5. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;	5. Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
6. Pelaksanaan kesyahbandaran;	6. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
7. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;	7. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
8. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawaskapal perikanan;	8. Wisata bahari; dan/atau
9. Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;	9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pemantauan wilayah pesisir;	
11. Pengendalian lingkungan;	
12. Kepabeanan; dan/atau	
13. Keimigrasian.	

## Landasan Hukum

Perundang-undangan dan Peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 2) Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/Kepmen-Kp/2014 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006, tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
- 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
- 5) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.

## Struktur Organisasi



Gambar 28. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut :

### Subbagian Umum

Melakukan urusan hubungan masyarakat,

organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

## Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan kelompok kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Tugas kelompok kerja tersebut adalah mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut diatas PPS Bungus dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasikan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## Komposisi Pegawai

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berupaya mengoptimalkan dan memberdayakan sumberdaya yang ada baik sarana, prasarana maupun sumberdaya manusia yang ada. Pada tahun 2023 jumlah personil yang mendukung pelaksanaan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tercatat sebanyak 73 orang, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 50 orang (68,49%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2 orang (2,74%) kemudian tenaga kontrak sebanyak 17 orang (23,29%), kemudian Tenaga Pendataan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus ada sebanyak 4 orang (5,48%). Dari sisi tingkat pendidikan PNS dan tenaga kontrak yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 44. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Tahun 2023

JENIS KELAMIN	GOLONGAN						Jumlah	PENDIDIKAN						Jumlah
	I	II	III	IV	PPPK	TKK		S2	S1	D4	D3	SLTA	SMP	
Laki-Laki	0	5	20	4	14	9	50	3	12	10	5	20	-	52
Perempuan	0	2	10	3	3	2	20	3	12	-	1	4	-	20
Jumlah	0	7	30	7	17	11	70	6	24	10	6	24	-	72

Tabel 45. Komposisi PNS, TKK dan Outsourcing Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus		Jumlah
PNS	Laki-Laki	29
	Perempuan	15
	Jumlah	44
PPPK	Laki-Laki	14
	Perempuan	3
	Jumlah	17
TKK	Laki-Laki	7
	Perempuan	2
	Jumlah	9
Outsourcing	Laki-Laki	23
	Perempuan	3
	Jumlah	26

Pembinaan pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus difokuskan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan melalui berbagai latihan dan kursus. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan para pegawai dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi pegawai serta membentuk kader yang tangguh dalam melaksanakan tugasnya. Selain dari itu, program pembinaan juga memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan karier

mereka melalui berbagai peluang, seperti mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil. Selain dari aspek peningkatan kemampuan, pembinaan pegawai juga mencakup upaya dalam mewujudkan kesejahteraan pegawai, seperti penyediaan rumah dinas bagi yang belum memiliki tempat tinggal, kewajiban bagi pegawai dan keluarganya untuk mengikuti asuransi kesehatan, dan dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan melalui pendidikan lebih lanjut serta berbagai diklat dan kursus. Dengan demikian, program pembinaan pegawai ini dirancang secara komprehensif untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan pegawai Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Kepala Pelabuhan, baik itu dalam kegiatan seperti apel pagi, forum briefing, rapat pertemuan, maupun tanya jawab setelah apel dan senam kesegaran jasmani, memiliki tujuan-tujuan yang penting. Pertama, pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan kemampuan para staf/pelaksana tugas di berbagai tingkatan fungsional, baik itu fungsional umum, fungsional tertentu, maupun tingkat struktural (Eselon II dan IV). Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Selanjutnya, pembinaan tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman akan pentingnya tugas yang dilaksanakan dengan penuh dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab. Dengan memperkuat pemahaman ini, diharapkan setiap pegawai akan lebih termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi yang maksimal. Selain itu, pembinaan juga menjadi wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Melalui evaluasi yang rutin, manajemen

dapat mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan serta mengarahkan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Selain itu, koordinasi tugas-tugas yang dilakukan melalui pembinaan ini juga memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi berjalan secara sinergis menuju pencapaian tujuan bersama. Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Kepala Pelabuhan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan kinerja seluruh tim, serta memastikan keselarasan dalam pencapaian tujuan organisasi.

### **Pendidikan dan Diklat Pegawai**

Berdasarkan UU ASN No 5 tahun 2014 bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Pelatihan dan Diklat Pegawai merupakan bentuk pengembangan kompetensi yang bertujuan memenuhi tuntutan kinerja individu dan organisasi. Pelatihan didefinisikan sebagai pendekatan sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (*attitude*) dalam rangka meningkatkan efektivitas individu, tim dan organisasi.

Pelatihan atau Diklat pegawai dilakukan agar para pegawai memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan diaplikasikan untuk berkarya secara profesional. Pelatihan-pelatihan yang tepat akan membantu pegawai mengambil keputusan yang baik dan benar dalam ruang lingkup kerjanya. Guna mengatasi keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah mengambil beberapa kebijakan diantaranya adalah memberikan kesempatan kepada staf untuk melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi dan mengikut sertakan beberapa staf dalam berbagai pelatihan sesuai dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan daftar diklat yang dibutuhkan oleh pegawai.

### **Mutasi Pegawai Dan Pensiun**

Mutasi Pegawai adalah salah satu media pengembangan pegawai, dimana mutasi merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain. Baik itu pemindahan yang sifatnya setarap dengan jabatan sebelumnya, naik kejabatan yang lebih tinggi, maupun turun ke jabatan yang lebih rendah. Pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) orang pegawai mutasi, 1 (satu) orang pegawai dimutasi ke unit kerja lain dalam satu instansi, 3 (tiga) orang pegawai yang dimutasi karna pindah jabatan adalah Mol Isral Mahadia dari jabatan lama Pengelola Data menjadi Penelaah Pengembangan Usaha, Jamaludin dari jabatan lama Pengelola Barang Milik Negara dimutasi menjadi Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana, dan Bakri Y dari jari jabatan lama Pengelola Barang Milik Negara dimutasi menjadi Pengelola Kesyahbandaran.



## Hubungan Kelembagaan

Hubungan kelembagaan dengan instansi terkait dalam mendukung kegiatan Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat perikanan (nelayan dan pengusaha bidang perikanan) dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Kelembagaan/intansi terkait yang ada di lingkungan kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai berikut :

1. Polisi Air ( Polda Sumbar);
2. Pengawas Perikanan (PSDKP);
3. Navigasi (Kementerian Perhubungan);
4. BBLPMHP (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sumbar);
5. Koperasi Unit Desa Mina Padang;
6. Loka Penelitian Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LPSDKP);
7. Pos Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Bungus;
8. KPLP;
9. KAMLA (TNI AL);
10. Kesehatan Pelabuhan (Kementerian Kesehatan RI);
11. SPSI;
12. Karantina Pos Bungus (BKPIM Padang- KKP).



# BAB V

## KERAGAAN PELABUHAN

# Pelaksanaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) dan Kehumasan

Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) merupakan sistem informasi yang berfungsi untuk mendukung pengembangan pelabuhan perikanan dalam menciptakan kawasan andalan yang strategis, produktif dan cepat tumbuh sebagai sentra produksi dan sentra industri bagi pengembangan ekonomi terpadu. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) menginformasikan dinamika kegiatan pelabuhan perikanan seluruh Indonesia kepada stakeholder perikanan dan kelautan melalui media internet yang dapat dilihat melalui situs <http://integrasi.djpt.kkp.go.id/PIPP> dengan dukungan data dari masing-masing pelabuhan perikanan yang dikirim secara berkala. Informasi yang dikelola oleh Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) terdiri atas :

1. Informasi untuk kinerja operasional
2. Informasi untuk kebutuhan evaluasi dan perencanaan
3. Informasi untuk kebutuhan investasi

Kegiatan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dilaksanakan dalam jenis kegiatan seperti :

1. Entry data harian, bulanan
2. Pengiriman secara rutin Laporan Monitoring Operasional Pelabuhan;
3. Entry foto sarana dan prasarana Pelabuhan;
4. Entry kelembagaan;
5. Dan lainnya.

Informasi mengenai Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat diakses melalui website e-mail address [pps\\_bungus@yahoo.com](mailto:pps_bungus@yahoo.com) dan [bungus.pps@gmail.com](mailto:bungus.pps@gmail.com). Untuk kegiatan kehumasan dapat diakses melalui <http://humasppsbungus.blogspot.com/> BLOG, [@ppsbungus](#) Twitter, [@ppsbungus\\_Instagram](#) dan melalui [ppsbungus facebook](#).

Cakupan data yang dikelola merupakan data yang secara operasional menjadi tugas dan tanggung jawab UPT pelabuhan perikanan yaitu :

1. Aktifitas kapal di pelabuhan perikanan;
2. Produksi dan distribusi ikan di pelabuhan perikanan;
3. Penyaluran perbekalan di pelabuhan perikanan;
4. Industri di pelabuhan perikanan;
5. Pendapatan pelabuhan perikanan;

6. Prasarana pelabuhan perikanan;
7. Kelembagaan dan tenaga kerja di pelabuhan perikanan;
8. Data umum dan lingkungan fisik di pelabuhan perikanan.

### **Pelayanan Jasa Pelabuhan Perikanan**

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perikanan telah diterapkan penggunaan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2021. Untuk Pelayanan Jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terdapat 2 Jenis Pelayanan sebagai Berikut :

1. Kegiatan pelayan jasa berkaitan dengan PNBP yang dilaksanakan di PPS Bungus adalah sebagai berikut :
 

1) Jasa Bengkel	9) Jasa Penggunaan Kendaraan Berpedingin
2) Jasa Docking Kapal	10) Jasa Penggunaan Dump Truck
3) Jasa Forklift	11) Sewa Tangki BBM
4) Jasa Kebersihan	12) Jasa Peralatan
5) Jasa Listrik	13) Jasa Instalasi Air Bersih
6) Jasa Tambat Kapal	14) Sewa mess
7) Pas Masuk Bulanan/ Berlangganan	15) Sewa Lahan/tanah
8) Pas Masuk harian	16) Sewa Bangunan
	17) Penjualan Air
2. Pelayanan kepada masyarakat perikanan yang tidak berkaitan dengan PNBP (tanpa dipungut biaya) adalah sebagai berikut:
  - 1) Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
  - 2) Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK).
  - 3) Laporan Keberangkatan Kapal (STBLKK).
  - 4) Logbook Perikanan.
  - 5) Inspeksi Pembongkaran Ikan.
  - 6) Penerbitan SHTI-LALembar Awal).

### **Kegiatan Edukasi di PPS Bungus**

Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dengan tugas langsung di Lembaga BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan setempat. Praktek Kerja

Lapangan (PKL) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus. Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan wujud relevansi antara teori yang didapat selama di perkuliahan dengan praktek yang ditemui baik dalam dunia usaha swasta maupun pemerintah. Praktek Kerja memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu penerapan disiplin dan pengembangan karier. Ketika di lapangan melaksanakan praktek kerja, mahasiswa dapat menilai tentang pengembangan dari ilmu yang mereka miliki.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai instansi pemerintah juga menerima dan melayani mahasiswa perguruan tinggi, SMA, SMK dan Lembaga Pendidikan lainnya yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan dan penelitian lainnya. Perguruan tinggi yang telah melaksanakan praktek kerja lapangan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus antara lain sebagai berikut :

1. Universitas Riau (UNRI) Riau;
2. Universitas Jambi (UNJA) Jambi;
3. Universitas Andalas (UNAND) Padang;
4. Universitas Bung Hatta Padang;
5. Universitas Diponegoro;
6. Universitas Sumatera Utara (USU)
7. Universitas Nahdlatul Ulama (UNU);
8. Universitas Muaro Bungo;
9. Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor;
10. Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta;
11. Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan (STPK) Matauli Sibolga;
12. Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman;
13. Politeknik KP Karawang Kampus Aceh;
14. SMK Maritim Nusantara Padang Pariaman;
15. SMK Negeri 3 Pariaman;
16. SMK Nusatama Padang.
17. SMK Negeri 10 Padang
18. SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Timur
19. SMK Negeri 4 Kota Bengkulu

### **Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara adalah suatu bentuk surat keputusan dari pengelola barang atau pun pengguna barang maupun kuasa Pengguna barang sesuai penentuan pendelegasian sebagian kewenangan untuk menetapkan kewenangan penggunaan BMN yang berada dan menjadi tanggung jawab satuan kerja di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Sehingga BMN yang diperoleh atas beban APBN maupun perolehan lainnya yang syah dapat digunakan secara Optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga.

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sudah ditetapkan sesuai surat Nomor : 3453/PPSB/PL.820/X/2018 Tanggal 24 Oktober 2018.

### **Kegiatan Administrasi Persuratan , Kearsipan dan Kehumasan**

Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan instansi pemerintahan. Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi secara umum, ruang lingkup administrasi umum antara lain meliputi tata naskah dinas dan kearsipan. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi meliputi antara lain pengaturan tentang jenis naskah dinas, pengamanan dan penyampaian, pencantuman alamat, pemberian nomor tanggal dan kode, kewenangan penandatanganan, cap jabatan dan cap dinas, kelengkapan naskah dinas.

Sedangkan tata kelola kearsipan mencakup penciptaan, penggunaan, perawatan, dan penyusunan. Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan instansi pemerintahan. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Inpres Pengelolaan Komunikasi Publik tersebut ditujukan kepada sejumlah pihak. Inpres ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, menginstruksikan kepada seluruh pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik. Keberadaan unit kehumasan di sebuah lembaga atau instansi pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk masyarakat dalam maupun kepada masyarakat luar umumnya.

Secara garis besar, Humas instansi pemerintah memiliki peran ganda. Fungsi keluar adalah berupaya memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan kebijaksanaan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat sebagai khalayak. Fungsi ke dalam adalah pihak humas wajib menyerap aspirasi atau keinginan publik/ masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan bagi instansinya demi tercapainya tujuan bersama.



Bagian Humas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dibentuk dengan tujuan :

1. Mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan pemerintah khususnya bidang Kelautan dan Perikanan.
2. Memberikan Informasi tentang kebijakan, rencana rencana serta hasil kerja kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
3. Mensosialisasikan kebijakan Pemerintah (konfrensi pers, press release, pameran , pertemuan dengan Masyarakat.

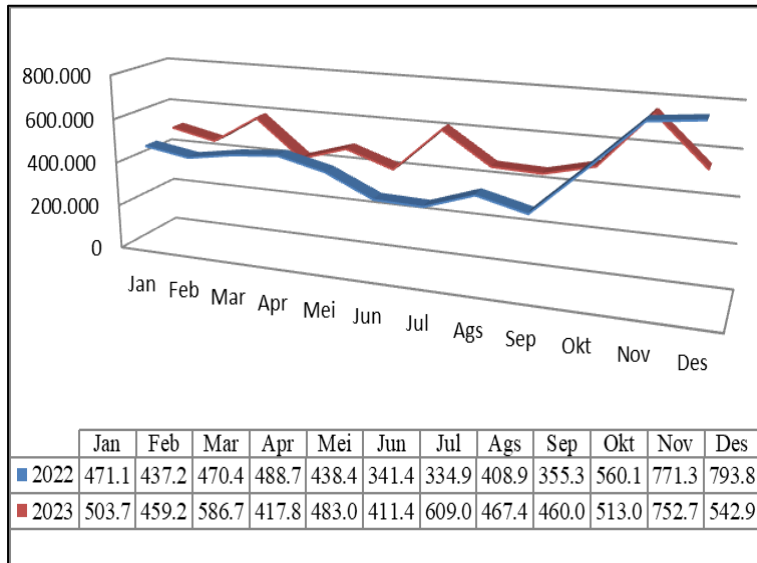
### **Kegiatan Pelayanan Publik Masyarakat Perikanan**

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya, serta menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurang transparan, kurang informatif, kurang konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (*stakeholder*) perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakanlah “SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT”.

Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Dari seluruh data yang dihimpun dari 70 responden, didapatkan Nilai Interval (NI) Per Unsur untuk PPS Bungus Semester II adalah 3.54 dengan IKM = 88.61 dengan mutu pelayanan A (sangat baik). Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

## Produksi Ikan



Gambar 29. Nilai Produksi Ikan di PPS Bungus Tahun 2022 dan 2023

Produksi ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berasal dari hasil tangkapan kapal perikanan yang didaratkan di pelabuhan, berupa kapal nelayan lokal kapal *Purse Seine*, *Hand Line* serta kapal Kapal pengumpul dan pengangkut. Volume produksi ikan tahun 2023 sebanyak 5.531,41 Ton dengan nilai sebesar Rp. 105.207.889.500,-. Sedangkan volume produksi ikan tahun 2022 sebanyak 5.872,014 Ton

dengan nilai sebesar Rp. 107.539.153.500,-. Apabila dibandingkan jumlah produksi antara tahun 2021 dengan tahun 2022, terjadi peningkatan volume produksi ikan yang didaratkan sebesar 340.604 Ton atau meningkat 6,15%. Kemudian nilai Produksi ikan yang didaratkan juga mengalami peningkatan sebesar sebesar 2,22%.

Perkembangan volume produksi dan nilai produksi ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 1. Perbandingan Volume dan Nilai Produksi Ikan

No	Bulan	Volume (Kg)		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2022	2023	2022	2023
1.	Januari	471.108	503.777	8.415.463.500	5.444.265.000
2.	Februari	437.266	459.241	8.284.942.000	5.032.389.000
3.	Maret	470.435	586.710	10.062.184.000	7.467.031.000
4.	April	488.720	417.894	9.198.063.000	4.836.106.000
5.	Mei	438.479	483.026	6.145.085.000	5.668.063.000
6.	Juni	341.430	411.446	5.918.337.000	4.695.322.000
7.	Juli	334.983	609.061	5.645.608.000	11.344.239.000
8.	Agustus	408.908	467.493	8.393.791.000	7.806.325.000
9.	September	355.355	460.012	10.561.459.000	5.720.916.000
10.	Oktober	560.143	513.083	12.744.628.000	7.220.738.000
11.	November	771.352	752.752	11.148.003.000	5.088.386.000
12.	Desember	793.835	542.928	11.021.590.000	4.837.457.000
<b>J U M L A H</b>		<b>5.872.014</b>	<b>6.207.423</b>	<b>107.539.153.500</b>	<b>75.161.237.000</b>

Jenis ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah sebagai berikut :

1. Alu-alu/ Barakuda	10. Layang Deles	19. Tembang
2. Bawal	11. layur	20. Tenggiri Batang
3. Cakalang	12. Lemuru	21. Tenggiri Papan
4. Cumi	13. Madidihang	22. Teri
5. Japuh	14. Peperek	23. Tetengkek
6. Kakap	15. Selar Bentong	24. Tongkol Abu-abu
7. Kembung Lelaki	16. Selar Hijau	25. Tongkol Pisang Balaki
8. Kembung Perempuan	17. Selar Kuning	26. Tuna Mata Besar
9. Kuwe	18. Semar	

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dan konsistensi untuk mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan tuna melalui pengembangan manajemen perikanan tuna nasional. Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2015. Rencana pengelolaan tuna nasional ini telah ditetapkan untuk menerapkan aturan dan standar yang diadopsi oleh Organisasi Manajemen Perikanan Daerah (RFMOs). dimana Indonesia sekarang berpartisipasi dalam The Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). The Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC). The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) dan Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC).

Rencana pengelolaan tuna nasional ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat perikanan. Selain itu juga mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional. pasokan protein ikan secara berkelanjutan dan peningkatan pendapatan nelayan serta penyediaan kesempatan kerja di atas kapal perikanan dan unit pengolahan ikan termasuk industri pendukung.

Produksi perikanan tangkap dari perairan laut yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus secara garis besar terdiri dari kelompok ikan pelagis. kelompok ikan demersal. dan kelompok non-ikan (Crustacea dan mollusca). Produksi ikan ekonomis penting pada kelompok ikan pelagis didominasi oleh 5 jenis ikan. yakni: tongkol krai. cakalang. albakora. madidihang dan tuna mata besar.

Ikan madidihang/yellowfin tuna dan Tuna Mata Besar (BET) merupakan salah satu ikan ekonomis penting yang bernilai tinggi dari famili skombride. Namun pada tahun 2023 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tidak ada kegiatan ekspor ikan.

Produksi ikan yang di daratkan di PPS Bungus didominasi oleh jenis ikan Tuna. Cakalang dan Tongkol serta beberapa jenis ikan karang lainnya. Kegiatan pembongkaran ikan lokal tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

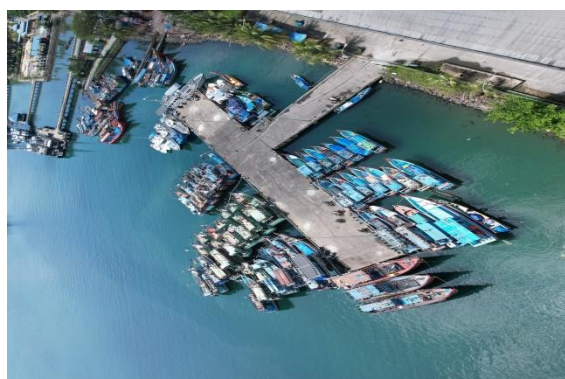
Table 2. Volume dan Nilai Produksi Lokal (Segar) Madidihang, Tuna Mata Besar, Cakalang, Tongkol di PPS Bungus Tahun 2023

NO.	BULAN	Volume (Kg) dan Nilai (Rp)					
		Madidihang dan Mata Besar		Cakalang		Tongkol	
		Volume (Kg)	Nilai (Rp.)	Volume (Kg)	Nilai (Rp.)	Volume (Kg)	Nilai (Rp.)
1.	Januari	62.471	2.792.467.000	36.294	687.673.000	80.242	1.224.489.000
2.	Februari	43.384	1.965.564.000	32.150	634.725.000	78.690	1.244.661.000
3.	Maret	111.202	4.996.262.000	44.692	848.450.000	119.829	1.825.541.000
4.	April	42.567	1.726.505.000	44.063	800.095.000	84.750	1.151.040.000
5.	Mei	36.120	1.696.792.000	25.063	509.884.000	89.364	1.240.090.000
6.	Juni	51.987	2.443.243.000	24.487	514.162.000	72.961	1.066.400.000
7.	Juli	122.004	5.664.019.000	15.409	392.668.000	58.139	929.258.000
8.	Agustus	73.906	3.215.763.000	10.630	292.960.000	42.366	666.164.000
9.	September	23.533	986.080.000	5.558	133.944.000	32.937	477.225.000
10.	Oktober	7.557	213.165.000	30.600	555.100.000	91.787	1.427.688.000
11.	November	3.697	113.865.000	11.850	228.750.000	60.935	897.274.000
12.	Desember	881	41.969.000	6.800	154.800.000	97.605	1.237.730.000
<b>J U M L A H</b>		<b>579.309</b>	<b>25.855.694.000</b>	<b>287.596</b>	<b>5.753.211.000</b>	<b>909.605</b>	<b>13.387.560.000</b>

Tabel 69 Volume dan Nilai Produksi Lokal (Segar) jenis lainnya (Ikan Karang, Lobster, Ikan Pelagis Kecil) Di PPS Bungus Tahun 2022 dan 2023

No	Bulan	Volume (Kg)		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2022	2023	2022	2023
1.	Januari	244.184	503.777	3.409.154.000	5.444.265.000
2.	Februari	289.373	459.241	4.391.835.000	5.032.389.000
3.	Maret	252.784	586.710	3.750.502.000	7.467.031.000
4.	April	303.658	417.894	3.946.737.000	4.836.106.000
5.	Mei	300.633	483.026	3.130.940.000	5.668.063.000
6.	Juni	224.885	411.446	2.755.037.000	4.695.322.000
7.	Juli	208.665	609.061	2.571.878.000	11.344.239.000
8.	Agustus	199.762	467.493	973.687.200	7.806.325.000
9.	September	153.857	460.012	3.561.193.000	5.720.916.000
10.	Oktober	341.825	513.083	6.174.412.000	7.220.738.000
11.	November	549.520	752.752	3.216.423.000	5.088.386.000
12.	Desember	618.551	542.928	6.696.794.000	4.837.457.000
<b>J U M L A H</b>		<b>3.687.697</b>	<b>6.207.423</b>	<b>44.578.592.200</b>	<b>75.161.237.000</b>

### Kunjungan Kapal

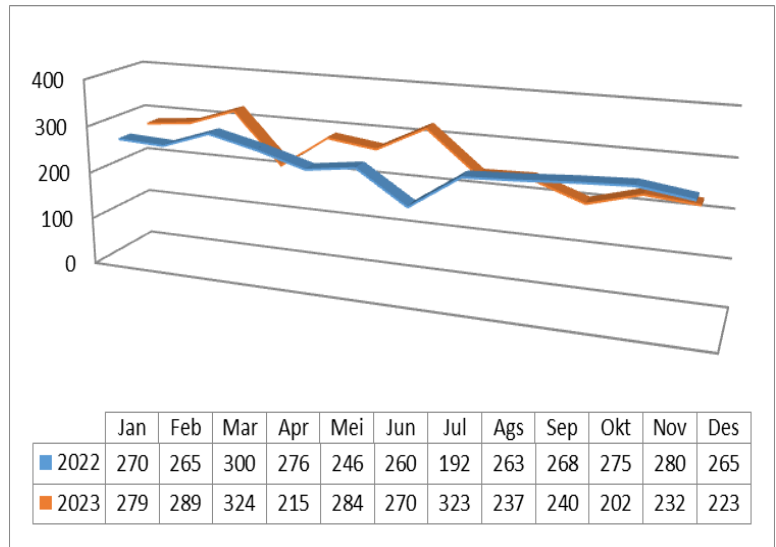


Gambar 30. Kunjungan Kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Pada Tahun 2022 jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebanyak 3.160 Kali. Sedangkan Tahun 2023 sebanyak 3.118 kali yang berarti terjadi sedikit penurunan kunjungan kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebanyak 42 kunjungan atau sekitar 1.33% jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 46. Jumlah Kunjungan Kapal di PPS Bungus Tahun 2021 dan 2022

No	Bulan	Kedatangan Kapal	
		Tahun	
		2021	2022
1.	Januari	270	279
2.	Februari	265	289
3.	Maret	300	324
4.	April	276	215
5.	Mei	246	284
6.	Juni	260	270
7.	Juli	192	323
8.	Agustus	263	237
9.	September	268	240
10.	Oktober	275	202
11.	November	280	232
12.	Desember	265	223
<b>J U M L A H</b>		<b>3.160</b>	<b>3.118</b>



Gambar 31. Grafik Kunjungan Kapal di PPS Bungus Tahun 2022 dan 2023

## Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Log Book, STBLKK (Keberangkatan dan Kedatangan) dan (SHTI)

### Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Kapal Perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. dengan memiliki dokumen Surat Persetujuan Berlayar tersebut kegiatan penangkapan, pengangkutan dan aktivitas lain dari kapal perikanan dapat berjalan secara aman dan nyaman. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kapal perikanan dilaksanakan oleh Syahbandar Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 3 tahun 2013 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

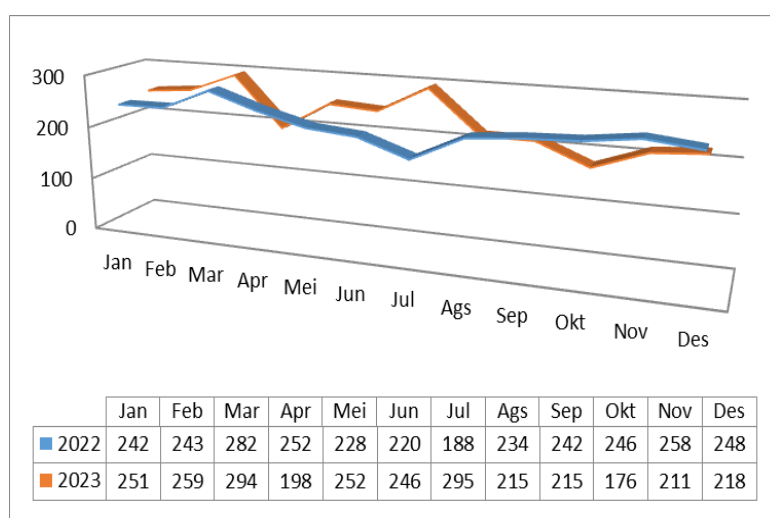
Pemahaman dari persyaratan Keselamatan dan Keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim. Selama tahun 2021 telah diterbitkan sebanyak 3.576 dan untuk 2022 sebanyak 2.883 lembar, terjadi penurunan sebanyak 693 lembar SPB. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan nelayan dalam berlayar dan menangkap ikan masih perlu untuk ditingkatkan.

Berikut adalah prosedur yang berlaku dalam pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB):

1. Nahkoda/Pemilik Kapal/Pengurus kapal mengajukan permohonan dan mengisi lembar permohonan penerbitan SPB;
2. Pemohon terlebih dahulu menyelesaikan administrasi kepelabuhanan (Tambat Labuh. Kebersihan Kolam. Air dll);
3. Pihak PSDKP melakukan pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen kapal. seperti SKK/ANKAPIN. Sertifikat kelaikan. pas besar. SIPI. SIUP. dan surat keaktifan VMS untuk kapal perikanan > 30 GT;
4. Petugas Kesyahbandaran Pelabuhan mendata kelengkapan alat tangkap. daftar nahkoda dan ABK. serta kelengkapan alat keselamatan di kapal;
5. Pihak Kesehatan Pelabuhan melakukan pengecekan terhadap sanitasi kapal dan kesehatan nahkoda. serta menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan;
6. Jika persyaratan lengkap maka petugas kesyahbandaran di lokasi tambat/labuh kapal memeriksa aspek nautis dan teknis yang berkaitan dengan fisik kapal. alat navigasi. mesin kapal. alat tangkap beserta alat bantu dan alat keselamatan kapal;
7. Syahbandar di Pelabuhan perikanan meneliti dan memvalidasi serta menandatangani SPB;
8. SPB asli diserahkan kepada pemohon dan salinan SPB disimpan sebagai arsip; dan
9. Pemohon menerima dokumen kapal yang sudah dilengkapi dengan SPB dan daftar ABK untuk segera berlayar dalam kurun waktu 1 x 24 jam. Bila kapal tidak berlayar pada kurun waktu tersebut maka SPB dinyatakan tidak berlaku.

Tabel 47. Jumlah penerbitan SPB Tahun 2022 dan 2023

No	Bulan	SPB Tahun	
		2022	2023
1.	Januari	242	251
2.	Februari	243	259
3.	Maret	282	294
4.	April	252	198
5.	Mei	228	252
6.	Juni	220	246
7.	Juli	188	295
8.	Agustus	234	215
9.	September	242	215
10.	Oktober	246	176
11.	November	258	211
12.	Desember	248	218
<b>J U M L A H</b>		<b>2883</b>	<b>2830</b>



Gambar 32. Grafik Penerbitan SPB di PPS Bungus Tahun 2022 dan Tahun 2023



## Log Book Penangkapan Ikan

Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (LBP) adalah laporan harian tertulis nahkoda atau nelayan mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan. Penerapan Log Book Perikanan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 33/PERMEN-KP/2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan. Adapun Tujuan dari Pelaporan dari Log Book adalah :

1. Sebagai Landing Declaration dari Nahkoda. atau surat pernyataan mengenai ikan yang dibawa ke Pelabuhan Perikanan
2. Sebagai pendukung pendataan statistik perikanan (Wilayah penangkapan ikan. jenis ikan. volume ikan hasil tangkapan)
3. Mencatat data izin penangkapan (alat tangkap). Data registrasi Kapal (LxBxD; Power) pelabuhan pangkalan kapal bersangkutan
4. Sebagai pendukung untuk Bahan Evaluasi dan analisa pengelolaan SDI (Fishing Capacity. Efficiency fishing. musim penangkapan kaitannya dengan open and close session dan konservasi).

### **Rekomendasi strategi penerapan e-log book adalah sebagai berikut:**

1. penerapan penggunaan e-log book dilakukan di pelabuhan perikanan dengan tingkat kepatuhan pelaksanaannya yang tinggi dan di kapal-kapal penangkap ikan yang sudah menggunakan transmitter VMS;
2. sosialisasi dan pelatihan penggunaan e-log book pada nelayan secara intensif;
3. pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pelaksanaan e-log book
4. mengembangkan kerja sama dengan pihak ketiga seperti perusahaan di bidang teknologi komunikasi.

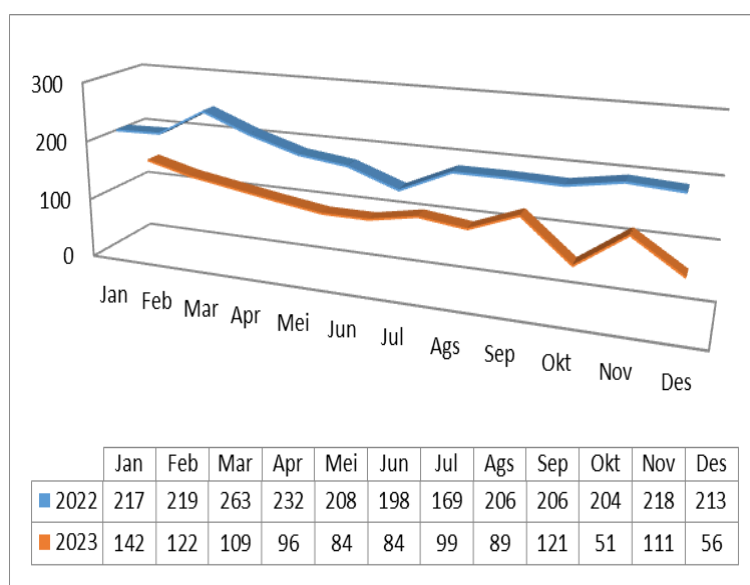
Penerapan pelaporan *Log Book* di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2022 sebanyak 2.553 dan pada tahun 2023 sebanyak 1.164, dimana pada tahun 2023 terdapat penurunan sebesar 54.41%. Mekanisme dalam pelayanan log book penangkapan ikan adalah sebagai berikut:

1. Nahkoda mengisi log book sesuai dengan keadaan sebenarnya;
2. Nahkoda menyampaikan log book yang telah diisi kepada teknisi kelaikan kapal perikanan sebelum melakukan pembongkaran hasil tangkapan;

3. Teknisi kelaikan kapal perikanan memeriksa dan menyampaikan log book kepada Kepala Syahbandar;
4. Jika data sesuai maka Kepala Syahbandar akan menandatangani. jika tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada nahkoda; dan
5. Log book yang telah sesuai akan di input ke aplikasi LBPI secara online.

Tabel 48. Jumlah Pelaporan Logbook di PPS Bungus Tahun 2022 dan 2023

No	Bulan	Log Book ( LBP) Tahun	
		2022	2023
1.	Januari	217	142
2.	Februari	219	122
3.	Maret	263	109
4.	April	232	96
5.	Mei	208	84
6.	Juni	198	84
7.	Juli	169	99
8.	Agustus	206	89
9.	September	206	121
10.	Oktober	204	51
11.	November	218	111
12.	Desember	213	56
<b>J U M L A H</b>		<b>2.553</b>	<b>1.164</b>



Gambar 33. Grafik Pelaporan Log Book Perikanan di PPS Bungus Tahun 2022 dan Tahun 2023

### STBLKK (Keberangkatan dan Kedatangan)

Setiap kapal perikanan yang masuk ke pelabuhan perikanan, baik untuk bongkar muatan, melakukan perbaikan atau docking, maupun mengisi perbekalan, wajib melaporkan kedatangannya. Dokumen Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) merupakan dokumen awal yang digunakan agar pengguna dapat memanfaatkan jasa dan pelayanan pelabuhan lainnya. Pada tahun 2022, pihak kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah menerbitkan 3.160 dokumen STBLKK (kedatangan). Pada tahun 2023, jumlah ini menurun menjadi 3.118 dokumen, menunjukkan penurunan sebesar 1,33%. Sementara itu, untuk dokumen STBLKK (keberangkatan), sebanyak 2.883 dokumen diterbitkan pada tahun 2022, dan pada tahun 2023, jumlah tersebut menurun menjadi 2.830 dokumen, mengalami penurunan sebesar 1,84% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Table 3. Jumlah penerbitan STBLKK Kedatangan kapal Tahun 2022 dan 2023

No	Bulan	STBLKK (Kedatangan)		STBLKK (Keberangkatan)	
		2022	2023	2022	2023
1	Januari	270	279	242	251
2	Februari	265	289	243	259
3	Maret	300	324	282	294
4	April	276	215	252	198
5	Mei	246	284	228	252
6	Juni	260	270	220	246
7	Juli	192	323	188	295
8	Agustus	263	237	234	215
9	September	268	240	242	215
10	Oktober	275	202	246	176
11	November	280	232	258	211
12	Desember	265	223	248	218
<b>Jumlah</b>		<b>3.160</b>	<b>3118</b>	<b>2.883</b>	<b>2830</b>

Pelayanan STBL Kedatangan membutuhkan waktu sekitar 33 menit dari pemeriksaan berkas hingga penerbitan surat. Mekanisme dalam pelayanan penerbitan STBLKK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah sebagai berikut:

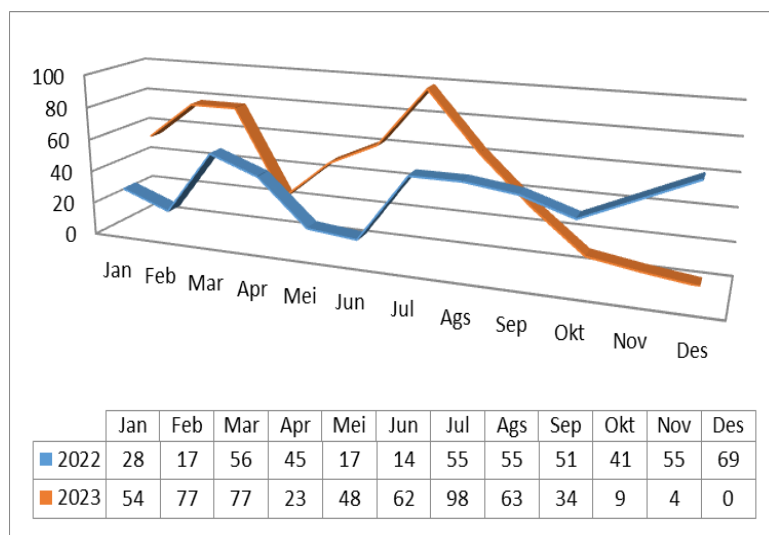
1. Nahkoda/Pemilik Kapal/Pengurus Kapal melaporkan kedatangan kapal dan menyerahkan dokumen kapal kepada petugas syahbandar;
2. Bagian Tambat Labuh mencatat waktu kedatangan;
3. Bagian PSDKP mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK);
4. Setelah HPK selesai dan persyaratan lengkap. pihak Kesyahbandaran mencatat STBLKK secara online maupun manual;
5. Syahbandar menandatangani form STBLKK;
6. STBLKK diterbitkan dan diarsipkan jika dokumen-dokumen kapal memiliki masa berlaku dalam jangka waktu lama. Jika masa berlaku dokumen akan segera berakhir maka dikembalikan kepada pengurus untuk diperpanjang; dan
7. Nahkoda/Pemilik Kapal/Pengurus Kapal menerima STBLKK

### **SHTI (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan)**

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh semua kapal yang berguna untuk menyatakan bahwa ikan hasil tangkapan diperoleh secara legal. SHTI diterbitkan oleh pelabuhan perikanan di mana ikan hasil tangkapan didaratkan. Jumlah SHTI yang diterbitkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2021 adalah sebanyak 184 dokumen dan pada tahun 2022 sebanyak 503 dokumen. dimana mengalami peningkatan sebesar (57.68%).

Tabel 49. Penerbitan SHTI di PPS Bungus Tahun 2022 dan 2023

No	Bulan	SHTI Tahun	
		2022	2023
1.	Januari	28	54
2.	Februari	17	77
3.	Maret	56	77
4.	April	45	23
5.	Mei	17	48
6.	Juni	14	62
7.	Juli	55	98
8.	Agustus	55	63
9.	September	51	34
10.	Oktober	41	9
11.	November	55	4
12.	Desember	69	0
<b>J U M L A H</b>		<b>503</b>	<b>549</b>



Gambar 34. Grafik Penerbitan SHTI di PPS Bungus Tahun 2021 dan 2022

### Penyaluran Air Bersih

Ketersediaan dan kecukupan air bersih di pelabuhan perikanan dipengaruhi oleh faktor pengelolaan (penyediaan dan pendistribusian) serta pemanfaatan (tingkat pemanfaatan dan kebutuhan) air bersih pada berbagai aktivitas di pelabuhan perikanan. Air bersih untuk berbagai kegiatan di PPS Bungus disediakan dan dikelola langsung oleh pihak pelabuhan. Sumber air baku PPS Bungus berasal dari aliran air permukaan. Sumber aliran air permukaan PPS Bungus berada pada salah satu bukit dari jajaran bukit barisan.

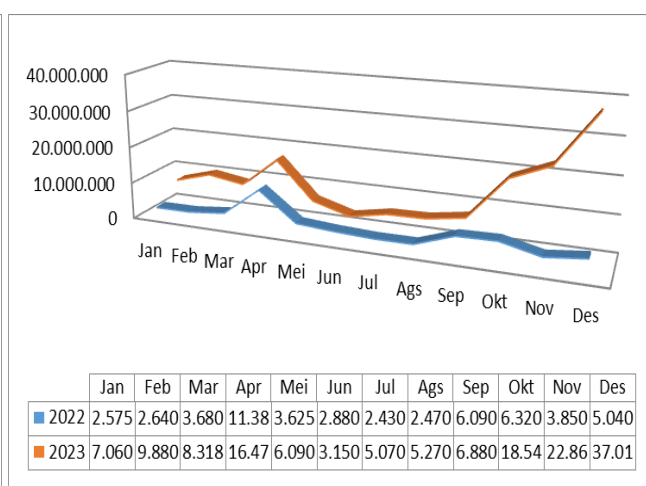
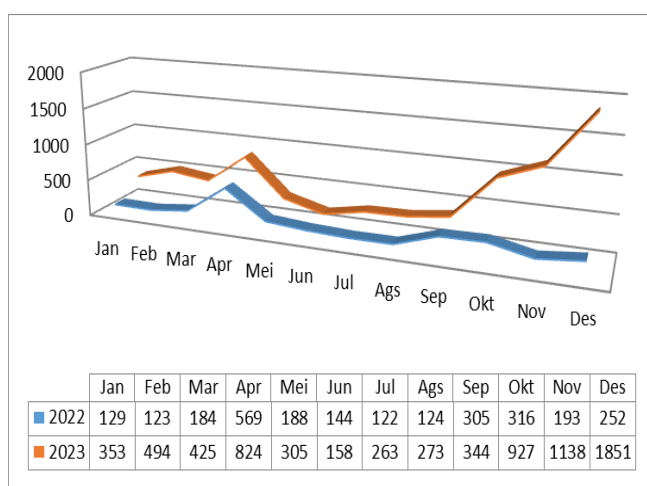
Secara vertikal, sumber air baku PPS Bungus berada pada ketinggian sekitar 15 m dan secara horizontal berjarak sekitar 250 m dari daerah pelayanan. Hasil pengujian menyebutkan, secara keseluruhan (fisik dan kimiawi) air baku PPS Bungus tergolong baik. sumber air baku PPS Bungus dapat dikategorikan air baku kelas satu, dapat digunakan sebagai bahan baku air minum dan atau untuk peruntukan lainnya yang mempersyaratkan mutu air yang sama. Pada umumnya, penyediaan air baku Suplai air bersih untuk keperluan kapal perikanan maupun kapal non perikanan dan pemakai jasa lainnya disuplai dari reservoir milik Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang telah dibangun melalui anggaran APBN Murni Kementerian Kelautan dan Perikanan dan melalui anggaran DIPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun anggaran 2023.

Pendistribusian air bersih di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dilakukan melalui jaringan transmisi distribusi air bersih. Penjualan air tahun 2022 sebanyak 2.649 Ton dengan nilai sebesar Rp. 52.981.000.- sedangkan tahun 2023 sebanyak 7.352 Ton dengan nilai sebesar Rp.

146.598.000.- Sehingga terjadi peningkatan volume sebesar 4.703 Ton atau sebesar 177.54% dan nilai sebesar Rp 93.617.000.- atau sebesar 176.70%. Perkembangan penyaluran air bersih di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 50. Volume dan Nilai Penyaluran Air Tawar Tahun 2022 dan 2023

No	Bulan	Volume (Ton)		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2022	2023	2022	2023
1	Januari	129	353	2.575.500	7.060.000
2	Februari	123	494	2.640.000	9.880.000
3	Maret	184	425	3.680.000	8.318.000
4	April	569	824	11.380.000	16.470.000
5	Mei	188	305	3.625.000	6.090.000
6	Juni	144	158	2.880.000	3.150.000
7	Juli	122	263	2.430.000	5.070.000
8	Agustus	124	273	2.470.000	5.270.000
9	September	305	344	6.090.500	6.880.000
10	Oktober	316	927	6.320.000	18.540.000
11	November	193	1138	3.850.000	22.860.000
12	Desember	252	1851	5.040.000	37.010.000
<b>Jumlah</b>		<b>2.649</b>	<b>7352</b>	<b>52.981.000</b>	<b>146.598.000</b>



Gambar 35. Grafik Volume Penyaluran Air Tawar Tahun 2022 dan 2023

Gambar 36. Grafik Nilai Penyaluran Air Tawar Tahun 2022 dan 2023

## Penyaluran BBM

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap menyebutkan bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar

dan mutu (spesifikasi). harga. volume. dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Minyak Solar (gas oil) dalam hal ini BBM bersubsidi diberikan kepada konsumen pengguna yaitu nelayan yang menggunakan kapal perikanan Indonesia dengan ukuran kapal 30 (tiga puluh) GT ke bawah yang terdaftar di SKPD provinsi/kabupaten/kota.

Pemberian Minyak Solar (gas oil) dalam hal ini BBM bersubsidi dilakukan setelah nelayan/pemilik kapal mendapatkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota apabila di lokasi tersebut tidak terdapat pelabuhan perikanan atau belum memiliki organisasi pengelola pelabuhan perikanan. Apabila terdapat kondisi Kepala Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota tidak berada ditempat. maka penerbitan Surat Rekomendasi dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

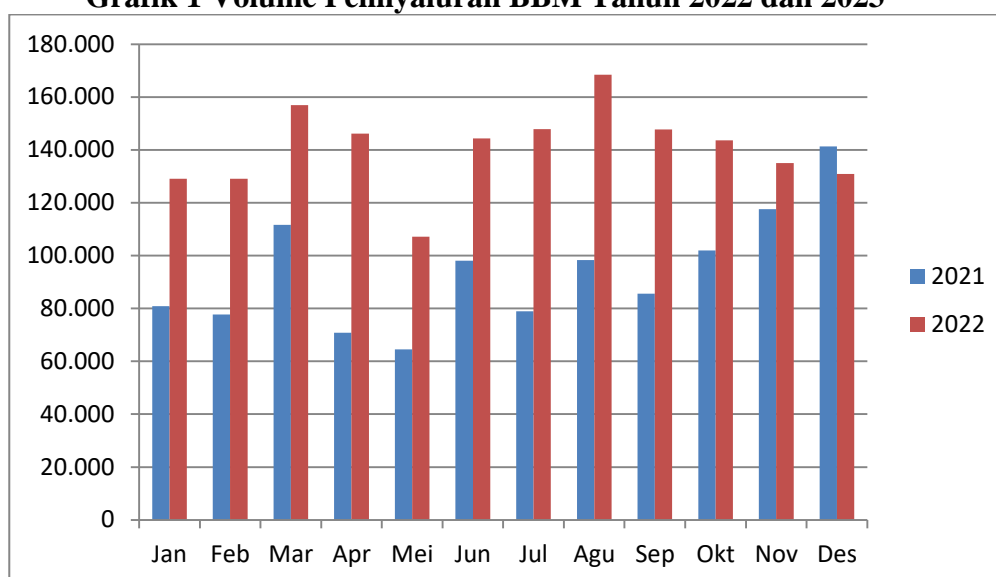
Penyaluran BBM (solar) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus untuk memenuhi kebutuhan kapal ikan dilaksanakan oleh unit usaha gabungan Koperasi Mina Utama Jakarta. KUD Mina Padang. dengan menyewa tangki BBM milik Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berkapasitas 75 KL serta bunker langsung melalui pertamina. Jumlah penyaluran BBM untuk Tahun 2021 sebanyak 1.127.440 Liter dengan nilai Rp. 5.806.316.000 sedangkan tahun 2022 sebanyak 1.686.087 Liter dengan nilai Rp. 9.602.719.800 sehingga terdapat peningkatan volume penjualan BBM sebesar 558.647 Liter atau (49.55%). Penyaluran BBM di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 4. Volume Penyaluran BBM (Solar) Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Bulan	Volume (Liter)		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2021	2022	2021	2022
1.	Januari	80.899	129.039	416.629.850	664.550.850
2.	Februari	77.744	129.039	400.381.600	664.550.850
3.	Maret	111.657	156.970	575.033.550	808.395.500
4.	April	70.841	146.156	364.831.150	752.703.400
5.	Mei	64.499	107.134	332.169.850	551.740.100
6.	Juni	98.055	144.299	504.983.250	743.139.850
7.	Juli	78.961	147.810	406.649.150	761.221.500
8.	Agustus	98.364	168.445	506.574.600	867.491.750
9.	September	85.600	147.737	440.840.000	1.004.611.600
10.	Oktober	101.980	143.550	525.197.000	976.140.000
11.	November	117.540	134.987	605.331.000	917.911.600
12.	Desember	141.300	130.921	727.695.000	890.262.800
<b>J U M L A H</b>		<b>1.127.440</b>	<b>1.686.087</b>	<b>5.806.316.000</b>	<b>9.602.719.800</b>



**Grafik 1 Volume Penyaluran BBM Tahun 2022 dan 2023**



### Penyaluran Es

Pabrik es merupakan salah satu fasilitas fungsional yang harus ada di setiap pelabuhan perikanan. Es merupakan salah satu bahan untuk mempertahankan mutu ikan. Kebutuhan es bagi kapal perikanan tradisional maupun kapal perikanan industri dan pedagang ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus disuplai oleh PT. Danitama Mina. Jumlah es yang disalurkan pada tahun 2021 sebesar 177.939 Batang dengan nilai Rp 3.847.831.500.- sedangkan pada tahun 2022 jumlah es yang disalurkan sebesar 158.552 Batang dengan nilai Rp 3.505.524.000.-. Terjadi penurunan penjualan es sebesar (10.90%). Secara rinci total penyaluran es oleh PT. Danitama Mina di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 5. Penyaluran Es PT. Danitama Mina Tahun 2021 dan 2022

No	Bulan	Volume (Liter)		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2021	2022	2021	2022
1.	Januari	10.165	14.321	208.382.500	307.901.500
2.	Februari	13.935	14.594	313.537.500	313.771.000
3.	Maret	18.373	18.427	413.392.500	396.180.500
4.	April	16.259	14.480	349.568.500	325.800.000
5.	Mei	12.828	3.164	275.802.000	71.190.000
6.	Juni	16.482	13.768	354.363.000	309.780.000
7.	Juli	14.217	11.891	305.665.500	267.547.500
8.	Agustus	13.620	14.612	292.830.000	328.770.000
9.	September	17.640	14.554	379.260.000	312.911.000
10.	Oktober	17.583	13.861	378.034.500	311.872.500
11.	November	13.628	12.754	293.002.000	286.965.000
12.	Desember	13.209	12.126	283.993.500	272.835.000
<b>J U M L A H</b>		<b>177.939</b>	<b>158.552</b>	<b>3.847.831.500</b>	<b>3.505.524.000</b>

## Pelayanan Bengkel. kebersihan dan Jasa lainnya

Pelayanan bengkel meliputi pekerjaan: Melaksanakan kegiatan bubut, perbaikan kapal, perbaikan mesin dan lain-lain. Jumlah order yang masuk Tahun 2021 sebanyak 103 order dan nilai sebesar Rp. 2.988.800.- sedangkan untuk Tahun 2022 sebanyak 79 order dan nilai sebesar Rp. 3.304.800.- Dengan demikian terjadi penurunan volume order sebesar sebesar 23%. Namun terjadi kenaikan nilai jasa pelayanan bengkel Rp. 316.000 atau (11%). Adapun perkembangan kegiatan di bengkel Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Table 6. Kegiatan Bengkel Tahun 2021 dan 2022

No	Bulan	Volume (Ton)		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2021	2022	2021	2022
1.	Januari	12	6	320.000	234.800
2.	Februari	8	0	220.000	0
3.	Maret	10	13	240.000	505.000
4.	April	0	6	0	235.500
5.	Mei	10	7	260.000	260.000
6.	Juni	8	7	210.000	260.000
7.	Juli	8	7	250.000	260.000
8.	Agustus	13	6	330.000	240.000
9.	September	7	7	254.800	280.000
10.	Oktober	9	8	354.000	300.000
11.	November	9	6	350.000	220.000
12.	Desember	9	6	200.000	240.000
<b>J U M L A H</b>		<b>103</b>	<b>79</b>	<b>2.988.800</b>	<b>3.304.800</b>

Table 7. Pelayanan penggunaan Jasa Listrik Tahun 2022

LISTRIK					
NO	Bulan	Jumlah Order		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2021	2022	2021	2022
1	Januari	13	20	2.221.083	1.682.769
2	Februari	10	27	1.700.032	2.271.438
3	Maret	4	10	939.173	1.720.690
4	April	5	35	903.995	1.929.664
5	Mei	12	13	1.765.549	5.938.095
6	Juni	20	14	2.214.714	4.888.223
7	Juli	20	16	2.121.033	6.295.687
8	Agustus	12	29	3.127.351	8.633.549
9	September	12	10	1.380.036	2.757.006
10	Oktober	22	13	1.883.228	4.279.503
11	November	23	27	3.879.322	4.056.197
12	Desember	12	13	1.785.722	36.804.057
<b>JUMLAH</b>		<b>165</b>	<b>227</b>	<b>23.921.238</b>	<b>81.256.878</b>

Table 8. Pelayanan penggunaan Penggunaan Forklift Tahun 2022

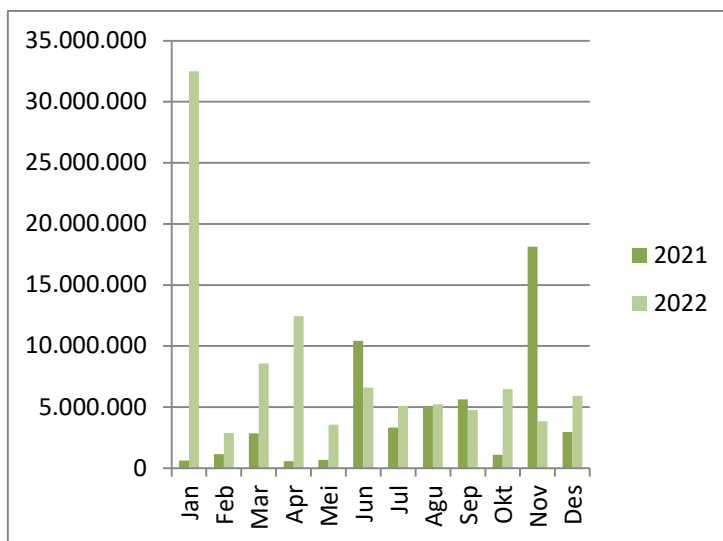
FORKLIFT					
NO	Bulan	Jumlah Order		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2021	2022	2021	2022
1	Januari	1	1	100.000	125.000
2	Februari	1	0	200.000	-
3	Maret	2	3	200.000	375.000
4	April	2	1	200.000	250.000
5	Mei	1	2	100.000	250.000
6	Juni	1	2	100.000	250.000
7	Juli	1	2	200.000	250.000
8	Agustus	1	2	100.000	375.000
9	September	1	2	125.000	250.000
10	Oktober	2	2	250.000	250.000
11	November	1	2	125.000	250.000
12	Desember	1	1	125.000	125.000
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>	<b>20</b>	<b>1.825.000</b>	<b>2.750.000</b>

Pelabuhan perikanan dalam pengelolaannya tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dan sosial. tetapi aspek ekologi juga penting di perhatikan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan. Perpaduan aspek ekologi. ekonomi dan sosial merupakan suatu model pendekatan pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan yang riil demi keberlanjutan pembangunannya. Pengelolaan pelabuhan yang melakukan pemeliharaan integritas ekologi atau pemeliharaan lingkungan merupakan inti dari konsep *Eco Port*. maka dari itu untuk tercapainya pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan. perlu penerapan manajemen pelabuhan yang pro lingkungan.

Penerapan manajemen pelabuhan yang pro lingkungan adalah menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna untuk kita semua karena dapat menciptakan kehidupan yang aman. bersih. sejuk dan sehat. Mencegah potensi risiko penyebaran penyakit. gangguan kesehatan. keamanan dan ketertiban yang dinamis sehingga tercipta Pelabuhan Sehat. Dari aspek kesehatan masyarakat. media lingkungan yang perlu mendapat perhatian dalam mewujudkan kualitas Lingkungan Pelabuhan yang sehat adalah upaya untuk mengawasi agen penyebaran penyakit (fisik. kimia. mikrobiologis). media perantara (air. udara. makanan/minuman. vektor penyakit seperti serangga dan binatang pengerat. sampah dan limbah. manusia beserta perilakunya). pengamatan penyakit dan keluhan masyarakat yang terkait dengan kegiatan di Pelabuhan. Pada Tahun 2022 Pelabuhan Perikanan telah menerapkan ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan di Pelabuhan Perikanan.

Table 9. Penerimaan Jasa Kebersihan di PPS Bungus Tahun 2021 dan 2022

No	Bulan	Jasa Kebersihan	
		Tahun	
		2021	2022
1.	Januari	632.200	32.497.950
2.	Februari	1.156.700	2.880.434
3.	Maret	2.861.100	8.574.382
4.	April	559.100	12.447.952
5.	Mei	665.700	3.569.610
6.	Juni	10.436.820	6.602.294
7.	Juli	3.312.600	5.112.552
8.	Agustus	5.013.706	5.233.102
9.	September	5.638.320	4.770.672
10.	Oktober	1.083.612	6.466.852
11.	November	18.140.350	3.837.922
12.	Desember	2.953.450	5.926.152
<b>J U M L A H</b>		<b>52.453.658</b>	<b>97.919.874</b>



Gambar 37. Penerimaan Jasa Kebersihan di PPS Bungus Tahun 2021 dan 2022

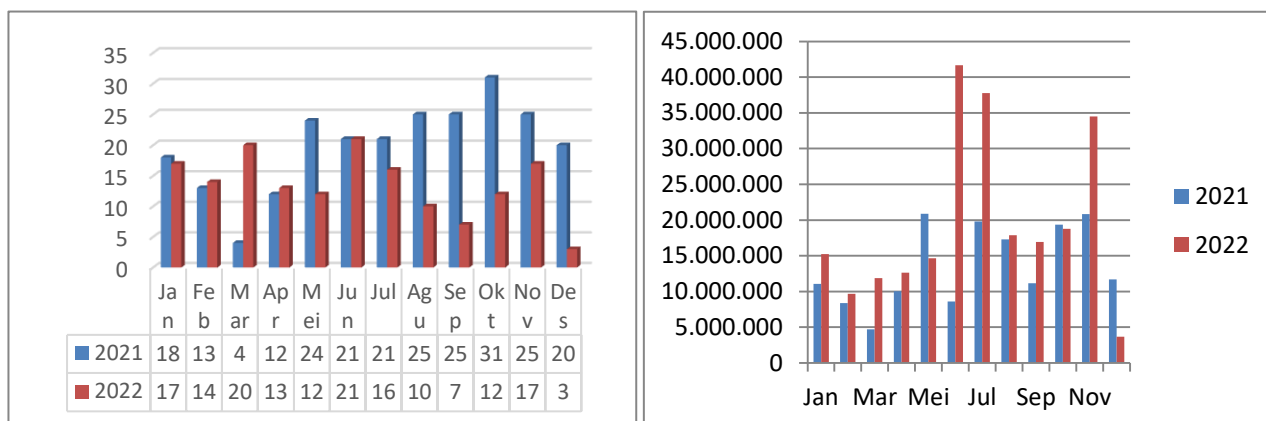
## Pelayanan Docking Kapal

Dock kapal terdiri dari 4 macam yaitu dock kolam (*graving dock*), dock apung (*floating dock*), landasan tarik (*dock slipway*) dan dock angkat (*synchrolift dry dock*). Untuk pelayanan Docking kapal yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menggunakan alat Wise/Vessel Lift. Alat ini dijalankan hingga ke dermaga, kemudian belt diturunkan disesuaikan panjang dept kapal. Setelah itu kapal memasuki area pinggir dermaga dan dilakukan pemasangan bantalan atau belt. Setelah sudah tepat pemasangannya, kapal diangkat dengan shiping lift secara perlahan dibantu oleh satu orang yang berada di atas landasan daratan yang bertugas mengontrol letak posisi kapal supaya tidak miring. Setelah stop block sudah diatur, kapal diturunkan di dock space dan segera kapal dapat direparasi.

Alat Wise/Vessel Lift yang ada dengan kapasitas angkat maksimal kapal-kapal berukuran 30 GT. Aktivitas kegiatan docking kapal untuk Tahun 2021 sebanyak 239 kapal dengan nilai sebesar Rp. 163.810.980.- sedangkan untuk Tahun 2022 sebanyak 139 kapal dengan nilai sebesar Rp. 235.288.000.- Dengan demikian terjadi penurunan volume kapal yang naik docking sebanyak 100 kapal atau (41.84%). Sedangkan nilai penerimaan dari Jasa docking mengalami peningkatan sebesar Rp. 71.477.020.- atau (43.63%). Perkembangan kegiatan docking kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 10. Kegiatan Docking Tahun 2021 dan 2022

No	Bulan	Volume (Kapal)		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2021	2022	2021	2022
1.	Januari	18	17	11.063.000	15.215.000
2.	Februari	13	14	8.381.500	9.668.000
3.	Maret	4	20	4.709.000	11.879.000
4.	April	12	13	10.023.000	12.632.000
5.	Mei	24	12	20.866.500	14.667.000
6.	Juni	21	21	8.620.000	41.652.000
7.	Juli	21	16	19.798.500	37.767.000
8.	Agustus	25	10	17.308.000	17.891.000
9.	September	25	7	11.169.480	16.957.000
10.	Oktober	31	12	19.355.000	18.779.000
11.	November	25	17	20.814.000	34.502.000
12.	Desember	20	3	11.703.000	3.679.000
<b>J U M L A H</b>		<b>239</b>	<b>162</b>	<b>163.810.980</b>	<b>235.288.000</b>



Gambar 39. Volume Kegiatan Docking Tahun 2021 dan 2022

Gambar 38. Nilai Kegiatan Docking Tahun 2021 dan 2022

### Pas Masuk Pelabuhan.

Dasar tarif pungutan pas masuk adalah Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penerimaan Pas Masuk Harian dan bulanan/langganan adalah sebagai berikut :

- 1.Pas Masuk Orang
- 2.Sepeda/ Becak/ Gerobak
- 3.Kendaraan bermotor Roda dua atau roda tiga
- 4.Kendaraan bermotor Roda Tiga
- 5.Mobil Penumpang. Angkutan Umum dan sejenisnya
- 6.Bus/ Truck
- 7.Truck Gandeng/Trailer/Container
8. Pas masuk Harian dan Pas Langganan

Pas Masuk harian pembayaran berlaku sekali masuk. sedangkan untuk pas

masuk berlangganan bulanan di bayar secara perbulanan. Untuk beberapa pas Masuk berlangganan ada yang berlaku selama 3 (tiga) bulanan yaitu untuk jasa Pas Masuk :

- a. Kendaraan Bermotor Roda dua
- b. Mobil Penumpang, angkutan Umum dan sejenisnya
- c. Bus/ Truck

Penerimaan Jasa pas masuk harian di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2021 sebesar Rp77.867.780.- sedangkan tahun 2022 sebesar Rp. 105.357.000.- sehingga terjadi peningkatan penerimaan pas masuk harian sebesar Rp. 27.489.220. Disamping Pas Masuk Harian Pelabuhan, pihak pengguna jasa dari perusahaan dan perorangan dapat juga membayar jasa pas masuk pelabuhan secara bulanan/berlangganan. Perkembangan jasa pas masuk di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Table 11. Penerimaan Pas Masuk Harian di PPS Bungus Tahun 2021 dan 2022

No	Bulan	Volume (Pengguna)		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2021	2022	2021	2022
1	Januari	814	4.942	1.571.000	56.489.000
2	Februari	710	547	1.323.000	2.266.000
3	Maret	936	1.401	1.680.000	13.732.000
4	April	618	1.228	1.114.000	10.582.000
5	Mei	649	679	1.116.000	2.582.000
6	Juni	3700	643	15.798.000	2.631.000
7	Juli	1229	569	3.871.000	2.481.000
8	Agustus	2078	495	7.830.000	2.539.000
9	September	2067	626	8.567.000	2.757.000
10	Oktober	322	488	2.930.000	2485.000
11	November	3450	500	29.415.780	3.834.000
12	Desember	619	584	2.642.000	2.979.000
<b>J U M L A H</b>		<b>17192</b>	<b>12.702</b>	<b>77.867.780</b>	<b>105.357.000</b>

Grafik 2 Penerimaan Pas Masuk Harian di PPS Bungus Tahun 2021 dan 2022

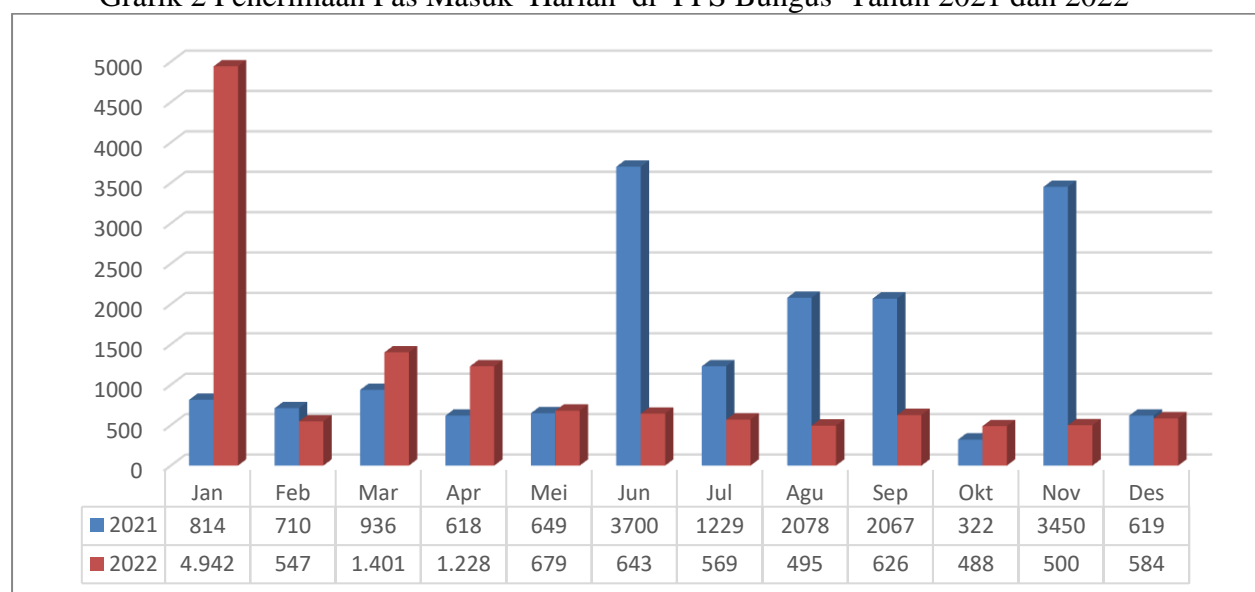
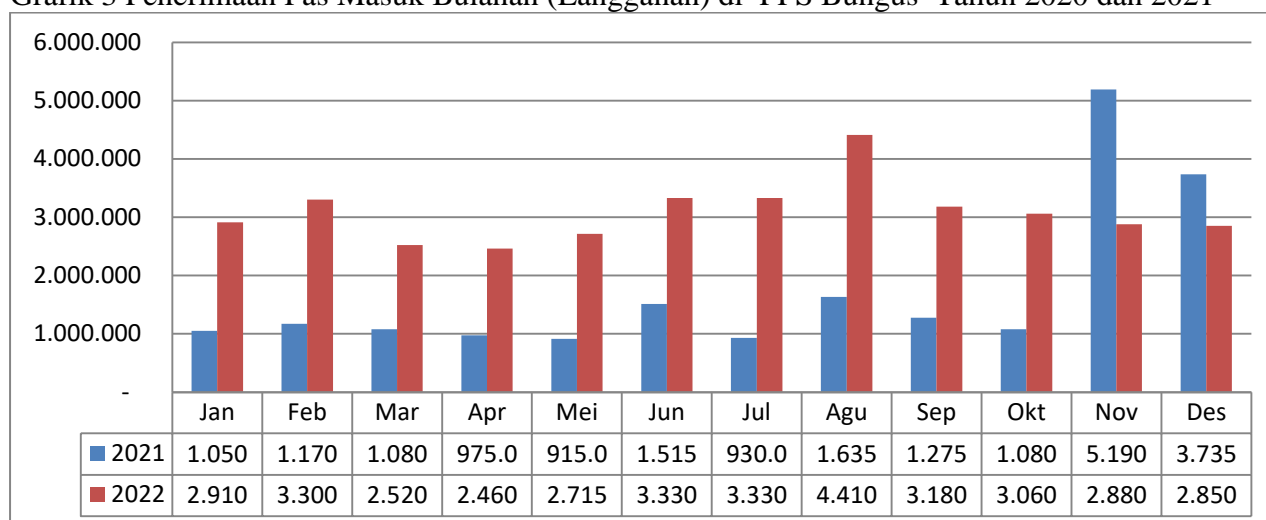




Table 12. Penerimaan Pas Masuk Bulanan Tahun 2021 dan 2022

No	Bulan	Volume (Pengguna)		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2021	2022	2021	2022
1	Januari	10	7	1.050.000	2.910.000
2	Februari	9	9	1.170.000	3.300.000
3	Maret	7	5	1.080.000	2.520.000
4	April	5	4	975.000	2.460.000
5	Mei	7	13	915.000	2.715.000
6	Juni	23	9	1.515.000	3.330.000
7	Juli	23	9	930.000	3.330.000
8	Agustus	14	13	1.635.000	4.410.000
9	September	15	19	1.275.000	3.180.000
10	Oktober	8	11	1.080.000	3.060.000
11	November	14	13	5.190.000	2.880.000
12	Desember	18	4	3.735.000	2.850.000
<b>J U M L A H</b>		<b>153</b>	<b>117</b>	<b>20.540.000</b>	<b>36.945.000</b>

Grafik 3 Penerimaan Pas Masuk Bulanan (Langganan) di PPS Bungus Tahun 2020 dan 2021



### Kegiatan Tambat Labuh

Tambat labuh termasuk dalam salah satu aktivitas pokok suatu pelabuhan. Untuk itu fasilitas tambat labuh merupakan fasilitas yang harus diperhatikan dalam suatu pelabuhan. Fasilitas tambat labuh yaitu dermaga dan kolam labuh. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Salah satu fasilitas tersebut adalah dermaga. Besar jasa tambat labuh kapal dipungut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penerimaan jasa tambat labuh kapal untuk tahun 2021 jumlah kapal yang tambat sebanyak 375 kapal dengan nilai sebesar Rp 310.939.786. Sedangkan tahun 2022 jumlah kapal yang tambat sebanyak 1.002 kapal dengan nilai sebesar Rp 920.578.260 sehingga jumlah kapal yang tambat

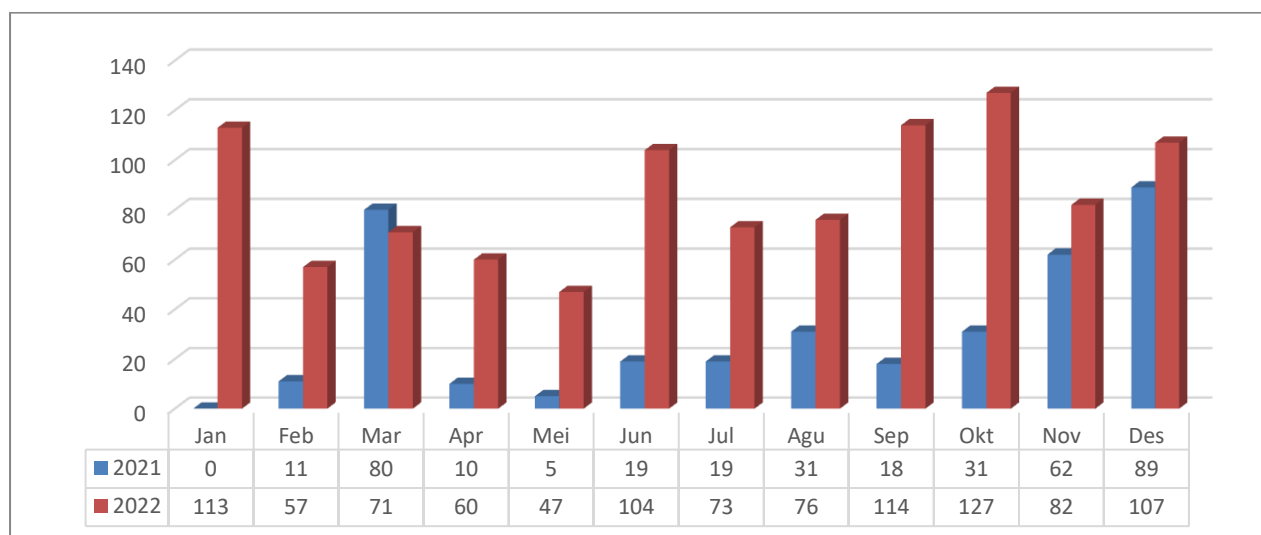
mengalami peningkatan sebanyak 627 kapal atau 167.2% dan nilainya mengalami peningkatan sebesar Rp 609.638.474 pada tahun 2022.

Perkembangan kegiatan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat dilihat pada table di bawah ini:

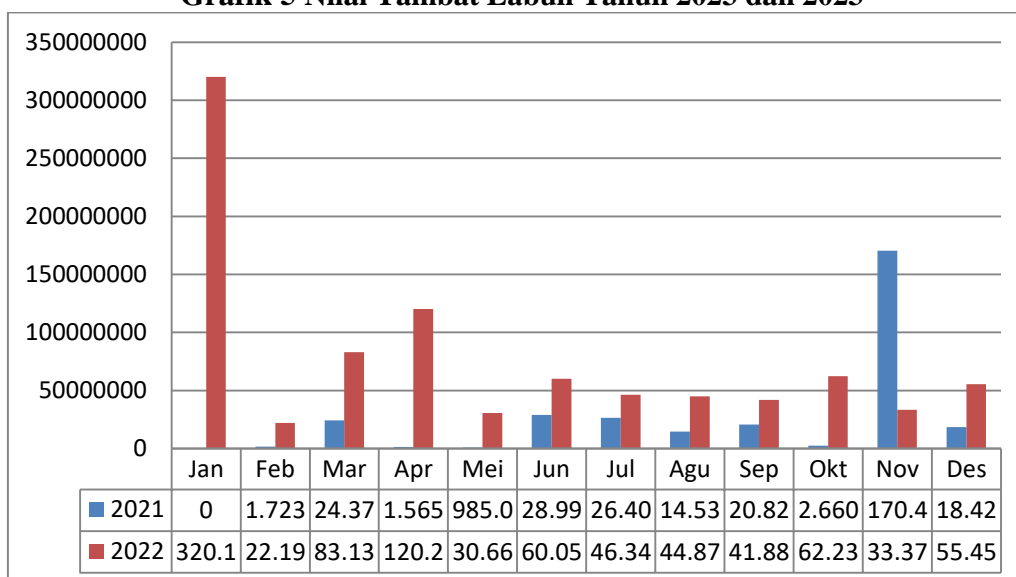
Table 13. Kegiatan Tambat Labuh Tahun 2021 dan 2022

No	Bulan	Volume (Kapal)		Nilai (Rp)	
		Tahun		Tahun	
		2021	2022	2021	2022
1.	Januari	-	113	-	320.103.800
2.	Februari	11	57	1.723.500	22.190.460
3.	Maret	80	71	24.371.000	83.135.180
4.	April	10	60	1.565.000	120.259.420
5.	Mei	5	47	985.000	30.663.620
6.	Juni	19	104	28.992.200	60.052.640
7.	Juli	19	73	26.403.000	46.341.050
8.	Agustus	31	76	14.538.060	44.875.855
9.	September	18	114	20.822.200	41.883.115
10.	Oktober	31	127	2.660.846	62.239.325
11.	November	62	82	170.454.560	33.375.415
12.	Desember	89	107	18.424.420	55.458.380
<b>J U M L A H</b>		<b>375</b>	<b>1.031</b>	<b>310.939.786</b>	<b>920.578.260</b>

Grafik 4 Kegiatan / Volume Kapal Tambat Labuh Tahun 2021 dan 2022



**Grafik 5 Nilai Tambat Labuh Tahun 2023 dan 2023**



### Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam konteks keuangan negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki kedudukan yang setara dengan penerimaan Pajak. Hal ini dapat terlihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memosisikan kedua sumber penerimaan ini sebagai komponen pendapatan dalam negeri. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. berdasarkan peraturan perundang-undangan. yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Beberapa strategi kunci untuk peningkatan PNBP yaitu:

1. memaksimalkan kualitas layanan jasa dengan sarana prasarana yang ada;
2. perbaikan dan penambahan sarana-prasarana pelabuhan;
3. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
4. meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait; dan
5. peningkatan pengawasan serta perbaikan aturan serta implementasinya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meliputi: Penjualan Air. Pas Masuk. Jasa Tambat. Jasa Docking. Sewa Gedung / Bangunan. Jasa Bengkel. Sewa Alat/forklift. Sewa Tangki dan Jasa lainnya. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2023 sebesar. Rp. 1.336.000.000.- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Realisasi Penerimaan PNBP tahun 2023 sebesar Rp. 2.062.922.097 (dua miliar enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah) atau 154,22% dari target. Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2023 mencapai jumlah yang di targetkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. dan melebihi target PNBP sebesar Rp. 726.922.097.- (tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

Table 14. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023

No.	Jenis Penerimaan	Jumlah
1	Jasa Bengkel	62.274.100
2	Jasa Docking	42.390.000
3	Jasa Forklift	146.598.000
4	Jasa Kebersihan	333.503.100
5	Jasa Listrik	2.148.000
6	Jasa Tambat	3.750.000
7	Pas Masuk Bulanan	9.880.450
8	Pas Masuk Harian	22.973.017
9	Penjualan Air	-
10	Sewa Bangunan	-
11	Sewa Pengembangan	7.038.626
12	Sewa Pemeliharaan	23.615.420
13	Sewa Kios BAP	2.550.000
14	Sewa Mess	11.161.078
15	Sewa tangki BBM	71.374.622
16	Penumpukan Barang	32.384.785
17	Jasa Kendaraan Berpendingin	396.329.463
18	Sewa Keranjang	971.385.908
19	Sewa Gerobak	87.310.382
20	Sewa Meja Sortir	1.768.000
21	Sewa Peti Ikan (Cool Box)	
22	Cold Storage ABF	193.626.319
23	Cold Storage CS	224.670.615
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2.646.731.884</b>

### Jumlah Nelayan dan Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang ada di PPS Bungus dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu pedagang ikan, nelayan, penyedia jasa dan transportasi dan tenaga kerja di industri pengolahan ikan. Tenaga kerja pada sektor perikanan masih perlu perhatian dari Negara saat sedang bekerja di atas kapal, baik di dalam maupun luar negeri. Karena banyak pekerja yang diperlakukan tidak adil, dan adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dari perusahaan tempat bekerja.

Mencegah hal itu terjadi. Pemerintah Indonesia mendorong perusahaan untuk melaksanakan sertifikasi usaha mereka dan menerapkan perlindungan HAM, seperti memberikan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, dan melaksanakan perjanjian kerja laut (PKL). Jumlah nelayan yang beraktifitas berasal dari nelayan pukat cincin, rawai tuna, pancing tonda, pancing ulur, bagan perahu, serok dan bubu yang kapalnya membongkar hasil tangkapannya, sebanyak 998 orang.

Sedangkan jumlah tenaga kerja non nelayan yang terserap sebanyak 498 orang. Penyerapan tenaga kerja non nelayan ini berasal dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, instansi pemerintah dan swasta serta tenaga lepas di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Table 15. Jumlah tenaga kerja Non Nelayan di PPS Bungus tahun 2023

No	Nama Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	
1	PT. Dempo Andalas Samudera	60	Orang
2	PT. Danitama Mina	32	Orang
3	KUD Mina Padang	9	Orang
4	Buruh Docking	12	Orang
5	Sopir Angkutan Ikan	3	Orang
6	Buruh Bongkar Muat	30	Orang
7	Warung Perlengkapan Kapal	3	Orang
8	Tenaga Kerja Warung	18	Orang
<b>Jumlah</b>		<b>167</b>	<b>Orang</b>

### Investasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Perkembangan investasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2023 dan Lahan industri yang sudah dimanfaatkan oleh investor di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus seluas **9.098** m<sup>2</sup>. Investor yang beraktivitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebanyak 6 (enam) investor, dengan rincian sebagai berikut :

Table 16. Daftar Investor dan Lahan Industri Perikanan yang dimanfaatkan di PPS Bungus Tahun 2023

No	Nama Pengguna (Badan Usaha/Perorangan/Instansi)	Jenis Fasilitas/BMN Yang Digunakan	Nilai Perolehan BMN (Rp)
1	Meri Lenggo	Tanah dan Bangunan (Kios)	237.938.000
2	Sherliana Sundari	Tanah dan Bangunan (Kios)	237.938.000
3	Yulmi	Tanah dan Bangunan (Kios)	237.938.000
4	El Wati	Tanah dan Bangunan (Kios)	237.938.000
5	Shilvia Okteviache Buggi	Tanah dan Bangunan (Kios)	237.938.000
6	Busnar	Tanah dan Bangunan (Kios)	237.938.000
7	Nurhamsar	Tanah dan Bangunan (Kios)	237.938.000
8	Rosni	Tanah dan Bangunan (Kios)	237.938.000
9	Agusna Wati	Tanah dan Bangunan (Kios)	333.760.000
10	Syafridon	Tanah dan Bangunan (Kios)	333.760.000
11	Maiyeni	Tanah dan Bangunan (Kios)	333.760.000
12	Anna Yulia	Tanah dan Bangunan (Kios)	333.760.000
13	Satrio Panjaitan	Tanah dan Bangunan (Kios)	333.760.000
14	Fitri Yanti	Tanah dan Bangunan (Kios)	333.760.000
15	Wahyu Burhandi	Tanah dan Bangunan (Kios)	333.760.000

16	PT. Dani Tama Mina	Bangunan Permanen	1.175.115.358
19	PT. Dempo Andalas Samudera	Tanah/Lahan	95.834.815.000
21	PT. Amar Mandiri	Tanah/Lahan	95.834.815.000
22	Adrias	Tanah/Lahan	95.834.815.000
23	PT. Lintas Laut Samudera	Bangunan Permanen	1.175.115.358
24	KUD Mina Padang	Tangki BBM	22.707.969
26	Werry Erwin	Tanah dan Bangunan	27.553.252





# **BAB VI**

## **PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH**

## Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah sebagai berikut :

- a. Beberapa Sarana/Prasarana pelabuhan sudah mengalami penurunan daya dukung akibat batas usia teknis ekonomis seperti dermaga. jetty. fender. tempat pembongkaran ikan. lampu penerangan dan lainnya;
- b. Belum adanya Docking untuk kapal di atas 30 GT;
- c. Belum semua kapal yang mempunyai izin Pangkalan Pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mendaratkan ikannya sesuai dengan Izin yang diberikan oleh KKP di PPS Bungus.

## Upaya Pemecahan Masalah

Dari berbagai permasalahan di atas. maka upaya alternatif untuk pemecahannya adalah sebagai berikut:

- a. Menata ulang kebutuhan sarana prasarana pelabuhan melalui program pengembangan dan pemeliharaan dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat perikanan;
- b. Mengundang/mencari investor untuk pengadaan docking bagi kapal di atas 30 GT;
- c. Melakukan Monev pangkalan pendaratan ikan yang tertera di SIPI dan berkoordinasi dengan Direktorat Perijinan dan Kenelayanan DJPT;



# BAB VII

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. maka dapat dihasilkan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2023 secara keseluruhan telah memenuhi target;
2. Realisasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 untuk keuangan tercatat sebesar 98.11%;
3. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2023 masih belum memadai atau belum optimal.





# BAB VIII

## RENCANA PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dilakukan untuk mendorong perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah dengan didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan RPJPN tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan rencana pembangunan kelautan dan perikanan dengan visi yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”. Dalam pengembangan ekonomi maritim dan kelautan salah satu cara dapat diimplementasikan melalui pembangunan prasarana perikanan tangkap berupa pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan.

Beberapa isu strategis bidang kelautan dan perikanan lima tahun ke depan yang akan dihadapi oleh pemerintah Indonesia antara lain masih adanya kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) dan destructive fishing, perbaikan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan daya saing dan nilai tambah industri kelautan dan perikanan, daya saing sumber daya manusia, inovasi teknologi dan riset, serta pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan. Sesuai dengan Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni sebagai berikut: (i) penyedia bahan pangan dari perairan yang mempunyai nilai tinggi dari, ditinjau dari aspek nutrisi maupun ekonomi. (ii) penyedia lapangan kerja bagi masyarakat di daerah pesisir. (iii) salah satu bidang andalan dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang turut serta dalam menjaga kedaulatan bangsa di laut. (iv) penyumbang potensial untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, serta (v) identitas budaya negara maritim yang perlu dijaga dan dilestarikan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut:

**“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan”.**

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka Visi PPS Bungus adalah “*Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perikanan Terpadu yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*”. serta Misi PPS Bungus yaitu (1) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Memadai dan Ramah Lingkungan. (2) Meningkatkan Produktivitas, Nilai Tambah (*value added*) dan Daya Saing Produk Perikanan Untuk Kesejahteraan Nelayan. (3) Meningkatkan Pengembangan Sistem

Data/Informasi Perikanan yang Akurat dan *Update*. maka kegiatan Operasional PPS Bungus diharapkan mampu menjadi titik sentral pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis industri perikanan tangkap.

Lima tahun ke depan. arah kebijakan di bidang kelautan dan perikanan adalah membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu. kita akan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab. berdaya saing. dan berkelanjutan. Tak kalah penting. meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan dengan terus melawan praktik IUUF dan destructive fishing melalui pendekatan penegakkan hukum dan mengimplementasikan HAM perikanan. Untuk meningkatkan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berupaya untuk mengoptimalkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya. Selain itu. 11 wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan konservasi keanekaragaman hayati perlu dikelola dengan baik. “Pengelolaan WPP kita akan wujudkan melalui sistem kuota yang berbasis data serta menginisiasi model pngelolaan berbasis elektronik-WPP.

Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus mengembangkan sistem rantai dingin terutama di sentra-sentra produksi dan daerah pinggiran. “Untuk memperkuat daya saing industri perikanan. perlu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk perikanan. standardisasi mutu. sertifikasi. dan kepatuhan. Kita juga perlu membangun sistem rantai dingin dan sistem logistik serta meningkatkan akses pasar terutama untuk meningkatkan nilai dan volume ekspor produk perikanan

Kebijaksanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus TA. 2023 merupakan akumulasi berbagai kebijaksanaan diantaranya kebijaksanaan publik. teknis. alokasi sumberdaya. personalia. keuangan dan pelayanan masyarakat perikanan. Dalam Tahun 2023. kebijaksanaan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:



## **Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus:**

- |   |  |
|---|--|
| a) Peninggian Elevasi Tanah Gedung Syahbandar | l) Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor       |
| b) Rehabilitasi Gedung Syahbandar             | m) Pemeliharaan Pos Satpam                   |
| c) Rehab Lantai Dan Kanopi TPI                | n) Pemeliharaan Taman Permanen               |
| d) Pemeliharaan Saluran Air Kotor             | o) Pemeliharaan Saluran Air Kotor            |
| e) Pemeliharaan Rumah Dinas                   | p) Pemeliharaan Rumah Dinas                  |
| f) Pemeliharaan Gedung Pengepakan             | q) Pemeliharaan Gedung Pengepakan            |
| g) Pemeliharaan Bangunan TPI                  | r) Pemeliharaan Bangunan TPI                 |
| h) Pemeliharaan Bak Penampung                 | s) Pemeliharaan Pagar Permanen               |
| i) Pemeliharaan Shelter Nelayan               | t) Pemeliharaan Bak Penampung                |
| j) Pemeliharaan Candi atau Tugu               | u) Pemeliharaan Shelter Nelayan              |
| k) Pemeliharaan dan Operasional Cold Storage  | v) Pemeliharaan Candi atau Tugu              |
|   | w) Pemeliharaan dan Operasional Cold Storage |

## **Saran**

Adapun saran-saran guna menunjang operasional PPS Bungus dimasa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Agar pengelolaan pembangunan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan rencana kegiatan anggaran yang telah ditetapkan;
2. Untuk meningkatkan operasional PPS Bungus perlu adanya dukungan dari instansi terkait seperti Pemda, Pertamina dan Dinas Kelautan dan Perikanan. (Kargo) . untuk mendukung kegiatan revitalisasi perikanan tuna di Sumatera Barat.
3. Lebih mengintensifkan koordinasi dan promosi tentang peluang investasi di PPS Bungus dengan jaminan dapat memenuhi harapan dari calon investor sesuai ketentuan yang berlaku;



# **BAB IX**

# **PENUTUP**

Demikian Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus ini dibuat untuk menjadi perhatian dalam proses perencanaan, pembinaan maupun sebagai evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pengembangan dan operasional lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap khususnya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada masa mendatang. Untuk memudahkan tercapainya tujuan jangka panjang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan tersebut, diperlukan arah kebijakan dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, serta tahapan dan strategi dalam pencapaiannya.

Guna mewujudkan tahapan pembangunan pelabuhan perikanan, dibutuhkan dukungan sumberdaya manusia yang berkompeten di bidang perikanan, kesyahbandaran, pelayanan kepelabuhan perikanan, teknologi informasi serta keterlibatan nelayan dan pelaku usaha dalam menumbuhkan industri perikanan di pelabuhan perikanan. Harapan kami, kiranya usulan dan saran guna memacu atau mengoptimalkan kegiatan operasional pelabuhan, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai. Semoga laporan ini dapat menjadi sumber informasi supaya bermanfaat bagi masyarakat perikanan lainnya.

Lampiran: Rekapitulasi Pemanfaatan Lahan

**REKAPITULASI PEMANFAATAN LAHAN DI PPS BUNGUS**

TAHUN PENGADAAN	URAIAN KEGIATAN	VOLUME LUAS	
		KETERSEDIAAN LAHAN	PEMANFAATAN
	<b>Luas Area Pelabuhan</b>		
1989	1 Tanah bangunan kantor permanen	140.380 x 1 = 140.380 m <sup>2</sup>	
1995	2 Tanah hasil reklamasi	61.402 x 1 = 35.770 m <sup>2</sup>	
	<b>Pemanfaatan Lahan Stakeholder</b>		
2006	1 PT. SAMU		120 m <sup>2</sup>
2006	2 PT. DEMPO		6.700 m <sup>2</sup>
2006	3 Lajuardin (Perseorangan)		1.000 m <sup>2</sup>
2006	4 PT. NISKI JAYA ABADI		918 m <sup>2</sup>
	5 Kantor Satker PSDKP		500 m <sup>2</sup>
	6 Kantor BLPPMHP		500 m <sup>2</sup>
	7 Mess Kapal HIU		250 m <sup>2</sup>
2011	8 Kantor LPSDKP		1.000 m <sup>2</sup>
2013	9 Mess PSDKP		12 x 13 = 156 m <sup>2</sup>
			22 x 23 = 506 m <sup>2</sup>
	<b>ASET</b>		
1991	1 Balai Pertemuan Nelayan (Dialihfungsikan untuk gedung Satker BRKP)	19.10 x 11.80 =	225 m <sup>2</sup>
		=	- m <sup>2</sup>
		=	- m <sup>2</sup>
1991	2 Pos Jaga depan		= - m <sup>2</sup>
1991	3 Rumah Kepala Pelabuhan		= - m <sup>2</sup>

## REKAPITULASI PEMANFAATAN LAHAN DI PPS BUNGUS

TAHUN PENGADAAN	URAIAN KEGIATAN	VOLUME LUAS		
		KETERSEDIAAN LAHAN	PEMANFAATAN	
1991	4 Rumah Dinas Tipe C		=	- m2
1991	5 Rumah Dinas Tipe D		=	- m2
1991	6 Kantor Administrasi	270 x	1 =	270 m2
1991	7 Kantor Bengkel	250 x	1 =	250 m2
1991	8 Tempat Penginapan Nelayan	319 x	1 =	319 m2
1991	9 Tempat Peribadatan	50 x	1 =	50 m2
1991	10 MCK	50 x	1 =	50 m2
1991	11 Tandon Air Metal	100 x	1 =	100 m2
1991	12 Tangki Air + Instalasi	1.522 x	1 =	1.522 m2
1991	13 Ground Reservoir Air	350 x	1 =	350 m2
1991	14 Bak Pengolahan Air	169 x	1 =	169 m2
	15 Pabrik Es (swasta)	1522 x	1 =	1.522 m2
	16 Kolam Pemancingan	1300 x	1 =	1.300 m2
1991	17 Receiving Hall & Tempat Processing	96.6 x	36.9 =	3.565 m2
1991	18 Galangan Kapal	60 x	52 =	3.087 m2
1991	19 Hanggar Vessel Lift	80 x	1 =	80 m2
1991	20 Tempat perbaikan jaring/Net loft	53.8 x	14 =	753 m2
1991	21 Gedung Pengepakan	30.1 x	20 =	602 m2
1991	22 Jalan Utama	662 x	7 =	4.633 m2
1991	23 Jalan Kompleks	265 x	5 =	1.323 m2
1994	24 Pos Pelayanan Terpadu		=	- m2
2002	25 Drainase	220 x	1 =	220 m2
2005	26 Mess Tamu		=	- m2
2005	27 Pos Jaga Pintu Gerbang		=	- m2

## REKAPITULASI PEMANFAATAN LAHAN DI PPS BUNGUS

TAHUN PENGADAAN	URAIAN KEGIATAN	VOLUME LUAS	
		KETERSEDIAAN LAHAN	PEMANFAATAN
2005	28 Pos Jaga Pas Masuk		= - m2
2005	29 Pos Jaga depan kantor Administrasi		= - m2
2005	30 Kios BAP Tahap I :	250 x 1	= 250 m2
2006	31 Jalan Lingkungan I	146 x 420	= 61.320 m2
2006	32 Jalan Lingkungan II	165 x 4.7	= 777 m2
2006	33 Transit Sheed	40.9 x 5.2	= 213 m2
2006	34 Kios BAP Tahap II :	250 x 1	= 250 m2
2006	35 Gudang Kantor	30 x 1	= 30 m2
2009	36 Gedung Prossing tuna	59 x 10	= 590 m2
2011/2012	37 Gudang Kantor Administrasi PP tahap	800 x 1	= 800 m2
2011	38 MASJID	160 x 1	= 160 m2
2012	39 Perluasan Masjid		= 250 m2
2012	40 Landscape Kantor ADPEL		= 1.000 m2
2013	41 Jalan inspeksi di Gedung dry ice		= 150 m'
2013	42 Peningkatan jalan di gedung prossing tuna		= 215 m'
2013	43 Pembangunan Water treatment dan sumur bor berikut instalasinya		= 400 M2
	<b>TOTAL</b>	<b>176.150 m2</b>	<b>97.680 m2</b>
	<b>SISA LAHAN YANG MASIH BISA DIMANFAATAKAN</b>	<b>78.470 m2</b>	



Lampiran 9 Data Sarana dan Prasarana

**DATA SARANA DAN PRASARANA  
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS  
TAHUN 2022**

**1. Fasilitas Pokok**

No	FASILITAS	Unit /Kapasitas	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pemanfaatan (sudah/belum) dimanfaatkan
A	<b>Areal Pelabuhan</b>	22 Ha		Baik	
	a. Tanah sertifikat	140.380 m <sup>2</sup>	1989	Baik	
	b. Tanah reklamasi	61.402 m <sup>2</sup>	1995	Baik	
	c. Tanah DKP Prop Sumatera Barat	2 ha		Baik	
	d. Lahan industri	7.5 ha		Baik	
	e. Difungsikan pihak ke-3	1.4 ha		Baik	
	f. Lahan belum dimanfaatkan	6.1 ha		Baik	
B	<b>Kolam Pelabuhan</b>	4 ha		Baik	
	a. Alur pelayaran			Baik	
C	<b>Dermaga</b>				
	a. Dermaga bongkar (100 m x 15 m)	1500 m <sup>2</sup>	1989	Baik	
	b. Dermaga bunker (10 m x 36 m)	360 m <sup>2</sup>	1989	Baik	
	c. Dermaga tambat (180 x 4 m)	720 m <sup>2</sup>	1989	Baik	
	d. Dermaga jetty II (100 m x 8 m)	800 m <sup>2</sup>	2000	Baik	
D	<b>Jalan</b>			Baik	
	a. Jalan utama	6.220 m <sup>2</sup>		Baik	
	b. Jalan komplek	464 m <sup>2</sup>		Baik	
	c. Jalan lingkungan I	621 m <sup>2</sup>		Baik	
	d. Jalan lingkungan II	254 m <sup>2</sup>		Baik	

No	FASILITAS	Unit /Kapasitas	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pemanfaatan (sudah/belum) dimanfaatkan
	e. Jalan Inspeksi di Gedung Dry Ice	150 m <sup>2</sup>	2013	Baik	
	e. Jalan Inspeksi di Gedung Processing Tuna	215 m <sup>2</sup>	2013	Baik	
E	<b>Drainase dibelakang kantor administrasi</b>	220 m <sup>2</sup>		Baik	
F	<b>Drainase di gedung Dry Ice</b>	200 m <sup>2</sup>		Baik	
G	<b>Gorong-gorong</b>	1 paket		Baik	

## 2. Fasilitas Fungsional

No	FASILITAS	Unit /Kapasitas	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pemanfaatan (sudah/belum) dimanfaatkan
<b>1</b>	<b>Kantor</b>				
	<input type="checkbox"/> Kantor administrasi	270 m <sup>2</sup>		Baik	
	<input type="checkbox"/> Kantor bengkel	260 m <sup>2</sup>		Baik	
	<input type="checkbox"/> Kantor KP	30 m <sup>2</sup>		Baik	
	<input type="checkbox"/> Kantor BLPPMHP	250 m <sup>2</sup>		Baik	
	<input type="checkbox"/> Kantor P2SDKP	304 m <sup>2</sup>		Baik	
	<input type="checkbox"/> Kantor LPSDKP	1.274 m <sup>2</sup>		Baik	
	<input type="checkbox"/> Kantor administrasi Pelabuhan	800 m <sup>2</sup>	2011-2012	Baik	
	<input type="checkbox"/> Landscape Kantor administrasi Pelabuhan	1.000 m <sup>2</sup>	2012	Baik	
	<input type="checkbox"/>				
2	Receiving Hall	3.342 m <sup>2</sup>		Baik	

No	FASILITAS	Unit /Kapasitas	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pemanfaatan (sudah/belum) dimanfaatkan
3	Gedung Processing Tuna	450 m <sup>2</sup>		Baik	
4	Transit Sheet	212.68 m <sup>2</sup>		Baik	
5	Keranjang ikan Kapasitas 50 Kg	200 unit		Baik	
6	Fish box				
	Kapasitas 2 ton	4 unit		Baik	
	Kapasitas 1 ton	6 unit		Baik	
	Kapasitas 250 kg	25 unit		Baik	
7	Ice Cruiser	1 unit		Baik	
8	Kereta dorong	2 unit		Baik	rusak
9	Mesin packing box	1 unit		Baik	
10	Galangan kapal/hanggar terbuka	2.500 m <sup>2</sup>		Baik	
11	Vessel lift	1 unit		Baik	
12	Hanggar vessel lift	80 m <sup>2</sup>		Baik	
13	Fork lift	3 unit		Baik	1 disel x2 metrik
14	Net loft/tempat perbaikan jaring	525 m <sup>2</sup>		Baik	
15	Gedung dry ice	825 m <sup>2</sup>		Baik	
16	Tandon air metal	100 m <sup>2</sup>		Baik	
17	Tanki air + instalasi	1.522 m <sup>2</sup>		Baik	
18	Ground recevoir air	350 m <sup>2</sup>		Baik	
19	Bak pengolahan air	169 m <sup>2</sup>		Baik	
20	Bangunan intake	10 ltr/detik		Baik	
21	Sumur artesis + instalasinya	1 paket	2009	Baik	
	Water treatmen dan Sumur Bor 1	1 paket	2013	Baik	
22	Mersin Bubut	1 unit		baik	

No	FASILITAS	Unit /Kapasitas	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pemanfaatan (sudah/belum) dimanfaatkan
23	Pabrik Es DANITAMA	1.522 m <sup>2</sup>		Baik	
24	Coldstorage	3.940 m <sup>2</sup>	2018	Baik	
25	Genset				
	<input type="checkbox"/> Genset 35 KVA	1 unit		Baik	
	<input type="checkbox"/> Genset 15 KVA	1 unit		Baik	
26	Jaringan listrik PLN	550 KVA		Baik	
27	Tangki BBM + Instalasinya	75 m <sup>3</sup>		Baik	
28	Hidrant	3 unit		Baik	rusak
29	Lampu suar	2 unit		Baik	
30	Rambu-rambu				
	<input type="checkbox"/> Papan pengumuman	7 unit		Baik	
	<input type="checkbox"/> Papan petunjuk	4 unit		Baik	
	<input type="checkbox"/> Papan perhatian	3 unit		Baik	
	<input type="checkbox"/> Portal	2 unit		Baik	
31	CCTV	2 unit		Baik	
32	SSB	1 unit		Baik	
33	Jaringan LAN	1 paket		Baik	
34	Telepon	3 unit		Baik	

### 3. Fasilitas Penunjang

No	FASILITAS	Unit /Kapasitas	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pemanfaatan (sudah/belum) dimanfaatkan
1	Balai pertemuan nelayan	243 m <sup>2</sup>		Baik	
2	Mess tamu	1 unit		Baik	
3	Pos				
	<input type="checkbox"/> Pos jaga pintu gerbang	1 unit		Baik	
	<input type="checkbox"/> Pos jaga depan	1 unit		Baik	
	<input type="checkbox"/> Pos jaga masuk	1 unit		Baik	
	<input type="checkbox"/> Pos jaga depan kantor administrasi	1 unit		Baik	
	<input type="checkbox"/> Pos pelayanan terpadu	1 unit		Baik	
4	Rumah				
	<input type="checkbox"/> Rumah kepala pelabuhan	1 unit		Baik	
	<input type="checkbox"/> Rumah dinas tipe C	9 unit		Baik	
	<input type="checkbox"/> Rumah dinas tipe D	8 unit		Baik	
5	Tempat peribadatan	50 m <sup>2</sup>		Baik	
	Tempat peribadatan/Masjid 2	160 m <sup>2</sup>	2011	Baik	
	Perluasan Masjid	250 m <sup>2</sup>	2012	Baik	
6	Kios BAP				
	Kios BAP tahap I	250 m <sup>2</sup>		Baik	
	Kios BAP tahap II	250 m <sup>2</sup>		Baik	
7	MCK	50 m <sup>2</sup>		Baik	
8	Kendaraan				
	<b>a. Roda 4</b>			Baik	
	Toyota Kijang/LSX	1 unit		Baik	
	Nissan . Z 24 Terano Spirit	1 unit		Baik	
	Toyota Kijang pickup	1 unit		Rusak Berat	

No	FASILITAS	Unit /Kapasitas	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pemanfaatan (sudah/belum) dimanfaatkan
	Toyota Kijang Komando	1 unit		Rusak Berat	
	Mitsubishi Micro Bus FE 304	1 unit		Baik	
	Nissan Grand Livina 1.8	1 unit		Baik	
	Ford Everes	1 unit		Baik	
	Kijang Inova Diesel 2.5	1 unit		Baik	
	Rush 1.5 M/T	1 unit		Baik	
	Toyota Avanza Veloz 1.3	1 unit		Baik	
	Honda HRV	1 unit		Baik	
	Mitsubishi L200 PU. 4x2	1 unit		Baik	
	Ford Ranger 4x2. 2.5	1 unit		Baik	
	Toyota Hilux Pick Up	1 unit		Baik	
	Isuzu Box Berefrigasi	1 unit		Baik	
	<b>b. Roda 3</b>				
	Viar VR 150 3 R	1 unit		Baik	
	Nasha NSR 315 A	1 unit		Baik	
	Motora/Alat Angkut Sampah	2 unit		Baik	
	Motora Yanmar	1 unit		Baik	
	<b>c. Roda 2</b>				
	Yamaha RX King	1 unit		Baik	
	Suzuki FD 125 XRM	1 unit		Baik	
	Honda Supra X 125 D	2 unit		Baik	
	Suzuki EN. 125/Thander	2 unit		Baik	



No	FASILITAS	Unit /Kapasitas	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pemanfaatan (sudah/belum) dimanfaatkan
	Honda CS 1	1 unit		Baik	
	Honda Supra X NF 125 TR M/T	1 unit		Baik	
	Honda NF 12A 1CF M/T	1 unit		Baik	
	Honda Supra X 125 PGM F1 NF 12A 1CF M/T	3 unit		Baik	
	Honda New Vario 110F1	2 unit		Baik	
	Honda Supra X 125 CW F1	3 unit		Baik	
	Honda Revo CW F1	2 unit		Baik	
	Yamaha Vino 125 BJ8/Fino	1 unit		Baik	
	Yamaha N-Max 2DP Non ABS/NMAX	1 unit		Baik	
	Yamaha Mio M3 125 SE88/Mio	4 unit		Baik	
	Yamaha Aerox	1 unit		Baik	
9	K3				
	Mesin pemotong rumput	20 unit		Baik	
	Motora	2 unit		Baik	
	Bak sampah	2 unit		Baik	
	Mesin penyemprot rumput	1 unit		Baik	
10	Timbangan			Baik	
	Kapasitas 1 ton	1 unit		Baik	
	Kapasitas 100 kg	1 unit		Baik	
11	Pagar keliling	4.000 m <sup>2</sup>		Baik	
12	Kolam pemancingan	1.300 m <sup>2</sup>		Baik	
13	Sound system	1 unit		Baik	